



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU LAMTUK
INDONESIA EMAS **KKP**
2025

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TRIWULAN IV
TAHUN 2025



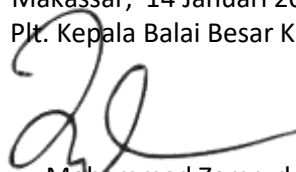
KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya kegiatan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2025 dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan Kinerja ini sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan misi organisasi yang dituangkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKj ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi tentang pencapaian kinerja operasional perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditetapkan untuk periode triwulan IV tahun 2025 yang disusun dengan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC). LKj menyajikan realisasi IKU yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Kami menyadari bahwa LKj masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Makassar, 14 Januari 2026
Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar



Mohammad Zamrud



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
3. Arah Kebijakan dan Strategis	3
4. Sistematika dan Penyajian	4
II. PERENCANAAN KINERJA	6
1. Visi dan Misi	6
2. Tujuan Strategis	7
3. Sasaran , Indikator dan Kinerja	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
1. Capaian Kinerja	10
2. Analisis dan evaluasi	12
IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	13
IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produk produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	22
IK3. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)	30
IK4. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)	35
IK5. Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan eksport lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	40
IK6. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	50
IK7. Nilsi kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	56
IK8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	62
IK9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	70
IK10. Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	77



IK11. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	81
IK12. Penilaian Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	93
IK13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	97
IK14. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	101
IK15. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berprediksi menuju wilayah bebas	106
IK16. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Nilai)	120

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan	126
2. Rekomendasi	127
3. Tindaklanjutan.....	127



LAMPIRAN

Lampiran Capaian Kinerja (LCK)

- IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
- IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produk produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
- IK3. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)
- IK4. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)
- IK5. Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan eksport lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
- IK6. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)
- IK7. Nilsu kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
- IK8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
- IK9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
- IK10. Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar
- IK11. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)
- IK12. Penilaian Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
- IK13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)
- IK14. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
- IK15. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berprediksi menuju wilayah bebas
- IK16. Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar...
- IK17. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Nilai)



RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 109 (istimewa) Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

Pada Triwulan IV tahun 2025 ada perubahan perjanjian Kinerja yang semula 17 Indikator kinerja Utama menjadi 16 Indikator kinerja dimana Indikator Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar sudah termasuk dalam Indikator Balai Besar KIPM Makassar. Adapun capaian realisasi dapat dilihat pada table berikut :

No	Indikator	Traget	Realsiasi Triwulan IV
1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	70	100
2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	70	97,66
3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)	1	1
4.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)	1	1





5.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	99	100
6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75	91,23
7.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75	90,96
8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	92	94,58
9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	71,5	100
10.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	100	100
11.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	82	87,97
12.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	86	90
13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	85	100
14.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	76	100
15.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75	75,51
16.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	3.36	3,93



Kinerja Keuangan Balai Besar KIPM Makassar Triwulan IV Tahun 2025 Pagu sebesar Rp 10,350,854,000 dan realisasi Rp 9,974,943,171 atau 96.37%



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instrument pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dalam peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) maupun tahunan (LKj Tahunan) Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah mengukur kinerja evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan



Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), dalam melaksanakan tugas dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP.

1.2. Tugas dan Struktur Organisasi Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai Besar KIPM) Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Balai Besar KIPM Makassar terdiri dari (1). Sub bagian Umum, (2) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Besar KIPM Makassar dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

(Nomor: 43/KEPMEN-KP/2023)



1.3. Arah Kebijakan dan Strategis

Arah kebijakan dan strategis pembangunan Balai Besar KIPM Makassar disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka sasaran strategis Balai Besar KIPM Makassar adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan Perikanan dengan didukung 1). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi Primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 3). Lokasi Pengawasan Mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 4). Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 5) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Makassar
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar yang didukung 1). Nilai



- kualitas penerapan sistem mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2) . Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.
3. Tata kelola pemerintahan yang efektif , lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang di dukung
- 1). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2). Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 3). Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 4). Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 5). Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 6). Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 7). Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 8). Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 9). Indeks Kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.

1.4 Sistematika dan penyajian

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Bab I. Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi;
- b. Bab II. Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang



- digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV. Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
 - e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi Presiden 2025-2029 mengusung komitmen "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", yang melanjutkan fondasi yang telah dibangun dan mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Visi ini mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan berkolaborasi demi meraih tujuan bersama, dan diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi yang dikenal dengan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat keharmonisan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.2 Tujuan Strategis

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025 – 2029 maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *output/impact* yang diinginkan dapat dicapai BPPMHKP dari program yang dilaksanakan , maka Balai Besar KIPM Makassar telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

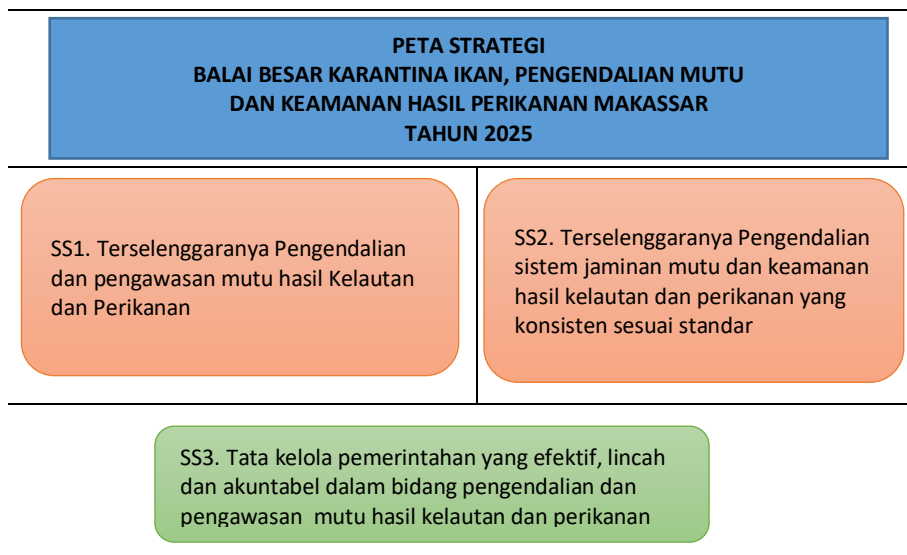
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Sasaran Strategis | 1. Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan |
| 2. Sasaran Strategis | 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar |
| 3. Sasaran Strategis | 3. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan |

3.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran strategis Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar merupakan penjabaran operasional dari visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini menggambarkan hasil yang hendak dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan Penyusunan IKU pada KKP mampu membangun sistem mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

Peta Strategis adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi nasional. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai Balai Besar KIPM Makassar pada tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPPMHKP.



Gambar 1. Peta Strategi Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM Makassar dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2025. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan analisis lebih mendalam terutama terhadap indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target. Hal ini perlu dilakukan untuk mengenali faktor penyebabnya selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan strategi untuk peningkatan kinerja (*performance improvement*) di tahun-tahun selanjutnya.

Hasil capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM Makassar untuk triwulan IV tahun 2025 yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel : 2.1

Capaian Kinerja Balai Besar KIPM Makassar Triwulan IV Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025				
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	125	70	70	100	142,86	142,86
	2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	98,1	70	70	97,66	139,51	139,51
	3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar						1	1	1	100,00	100,00
	4. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	5	4	4	100	1	1	1	100,00	100,00
	5. Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	99,99	99,99	101,99	100	99	99	100	101,01	101,01



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2025				
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6	-	-	-	-	83,1	75	75	91,23	121,64	121,64
	7	-	-	-	-	-	75	75	90,96	121,28	121,28
Terselenggaranya Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	8	88	89	98,44	96,38	97,16	92	92	94,58	102,80	102,80
	9		86	87,87	86,2	98,37	71,5	71,5	100	139,86	139,86
	10	-	-	-	100	100	100	100	100	100,00	100,00
	11	68,01	81,44	82,23	90,27	90,78	87	81	87,97	108,60	108,60
	12	91,93	98	95,3	87,13	83,8	86	86	90	104,65	104,65
	13	82	65	100	100	100	85	85	100	117,65	117,65
	14			79,56	78,26	84,34	76	76	100	131,58	131,58
	15						75	75	75,51	100,68	100,68
	16	-	-	89,8	91,12	3,77	3,36	3,36	3,93	116,96	116,96



3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Elaborasi capain kinerja berdasarkan sasaran strategi secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diperlukan dukungan 5 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 5 indikator kinerja tersebut disajikan pada table dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :	
1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1. 70 %
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	2. 70 %
3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	3. 1 Lokasi
4. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	4. 1 Lokasi
5. Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	5. 99 %

IK. 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025- 2029	
			2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamaann pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	125	70	70	100	142,86	142,86	70	-

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BPPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

BPPMHKP Makassar saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan

dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.

Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.

Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.

Cara Pembuatan pakan ikan yang baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah

serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.

Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.

Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk rumahan dan pengawasan mutu guna menghasilkan yang aman bermutu dan berkhasiat.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
- A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B = Persentase Unit menerapkan CPIB
- C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
- E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- Xn = Jumlah dari Unsur Pembentuk

$$A/B/C/D/E/F = \frac{\text{Jumlah sertifikat yang terbit}}{\text{Jumlah permohonan}} \times 100 \%$$

Adapun jumlah permohonan dan jumlah sertifikat yang terbit dapat dilihat pada matriks berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Permohonan Yang Lolos Verifikasi Berkas	Jumlah Sertifikat yang Terbit	Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Sertifikasi
1	Sertifikasi CPIB Kapal	4	4	100 %
2	Sertifikasi CBIB	0	0	0
3	Sertifikasi CPIB	2	2	100 %
4	Sertifikasi CPPIB	0	0	0
5	Sertifikasi CPOIB	0	0	0
6	Sertifikasi CDOIB	0	0	0

Dengan demikian realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Triwulan IV adalah 100 % sehingga capaian kinerja sebesar 142,85 %.

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian Triwulan IV Tahun 2024 dengan realisasi capaian Triwulan IV tahun 2025, maka realisasi pada triwulan IV tahun 2025 adalah sama yaitu 100%. karena seluruh permohonan yang masuk dapat ditindaklanjuti sampai dengan terbitnya sertifikat, namun dari segi anggaran dan jumlah output sertifikasi berbeda. Untuk anggaran di tahun 2024 di Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar Rp. 133.511.000 sedangkan anggaran yang tersedia di triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar Rp. 29.140.000 terjadi penurunan anggaran sebesar 21,82 % karena adanya efisiensi anggaran.

Pada triwulan IV tahun 2025 tidak terdapat Permohonan sertifikasi CBIB,CPPIB,CPOIB dan CDOIB, namun telah dilakukan pengawasan mutu melalui kegiatan surveilan pada unit pembudidaya yang telah tersertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) sebanyak 1 unit. Adapun ouput kegiatan tersebut berupa Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS) yang diterbitkan setelah dilakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian. Untuk SKHS, telah diserahkan ke Pelaku Usaha atas nama PT. 2512. Pada triwulan IV tahun

2025 juga telah terbit 2 (dua) SKHS CPPIB tertanggal 27 dan 30 Oktober 2025 atas nama Koperasi Syariah Gapoktan Lanrisang dan BPBAP Takalar sebagai output dari kegiatan surveilan CPPIB yang telah dilaksanakan pada triwulan III.

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan Inspeksi CPIB Kapal dan Sosialisasi CPIB Kapal di Kabupaten Bone pada Triwulan IV sebanyak 7 orang, yang terdiri atas 4 Inspektur Mutu dan 3 Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Surveilans CBIB pada TW IV sebanyak 4 orang yang terdiri dari 3 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar dan 1 Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar;

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan inspeksi CPIB pada TW IV sebanyak 4 orang yang kesemuanya adalah Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 95.000.000 kemudian direvisi menjadi Rp 18.820.000 yang digunakan untuk Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer Rp. 18.820.000.

Untuk anggaran pelaksanaan kegiatan sertifikasi produksi primer semula Rp. 18.820.000 menjadi Rp. 29.140.000 karena adanya revisi anggaran (relaksasi blokir) .

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP " penangkapan ikan terukur berbasis kuota " yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan

keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP “ pembangunan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan “ yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Pemanfaatan realisasi anggaran TW IV Tahun 2025 sebesar Rp 13.493.000,- atau 46,30%, untuk perjalanan dinas inspeksi CPIB, surveilen dan belanja bahan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan IV yaitu :

- Pada tanggal 1-2 Oktober 2025 mengikuti kegiatan Sosialisasi CBIB dan CPIB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- Pada tanggal 8 Oktober 2025 mengikuti kegiatan Webinar Inovasi Teknologi dan Pengelolaan Perikanan Budidaya Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Profesi Akuakultur Indonesia (PROAKSI).
- Pada tanggal 22 -24 Oktober 2025, telah mengikuti pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) yang dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui metode Blended Learning.
- Pada tanggal 27 Oktober 2025 mengikuti FGD Inovasi Nutrisi dan Pakan Fungsional untuk meningkatkan kesehatan dan produktifitas dalam mendukung budidaya udang berkelanjutan di Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)

bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin.

- Pada tanggal 29–30 Oktober 2025, menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal dalam rangka pemberdayaan nelayan kecil di wilayah Kabupaten Bone, yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bone dan diikuti oleh 50 orang nelayan.
- Pada tanggal 24–25 November 2025, menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal dalam rangka pemberdayaan nelayan kecil di wilayah Kabupaten Bone, yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bone dan diikuti oleh 50 orang nelayan.
- Pada tanggal 1 Desember 2025, telah dilaksanakan pemahaman produksi pakan serta pengelolaannya dalam mendukung pembudidayaan ikan yang dilaksanakan secara hybrid.
- Pada tanggal 8 Desember 2025, telah mengikuti kegiatan sosialisasi proses sertifikasi CPIB Kapal melalui aplikasi SIAPMUTU yang dilaksanakan secara virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Statistik, Data dan Informasi Sekretariat Jendral KKP.
- Pada tanggal 15 Desember 2025 telah terbit Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2076/XII/Tahun 2025 Tentang Satuan Gugus Tugas Pengendalian Penyakit Ikan Provinsi Sulawesi Selatan yang melibatkan BPPMHKP Makassar sebagai anggota Satgas.

Akar Masalah

Pencapaian sertifikasi penjaminan mutu hulu masih dapat dimaksimalkan namun terkendala dengan : Masih kurangnya literasi dan kesadaran teknis unit pembudidaya dan unit pembenihan akan pentingnya sertifikasi CPIB dan CBIB.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melaksanakan sosialisasi sertifikasi CPIB dan CBIB kepada penyuluh perikanan dan pelaku usaha.

Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi adalah telah memperbanyak pengumpulan data dukung inspeksi secara virtual berupa dokumentasi kondisi lokasi secara menyeluruh, baik melalui foto maupun video, sebelum pelaksanaan kegiatan inspeksi.



Keg. Inspeksi CPIB di UKKAS Hamzah Kab. Maros 27 – 28 Oktober 2025



Keg. Inspeksi CPIB di UPTD Balai Benih (BBI) Air Tawar Tanralili Kab. Maros 26
November 2025



Surveilen Cara Pembesaran Ikan yang Baik (CBIB) PT. 2512 Kab. Bulukumba
19-20 Desember 2025



Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang baik di atas kapal

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025- 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	98,1	70	70	97,66	139,51	139,51	-	-

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak

praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu;

Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Pada triwulan IV 2025 melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)
2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)

Kegiatan Sertifikasi Pasca Panen merupakan salah satu IKU yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua dan keempat KKP yaitu

1. Prioritas kedua KKP yaitu Penerapan sistem kuota dalam penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian sumber daya dimana, setiap hasil tangkapan harus dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikasi SKP dan HACCP sebelum dapat diekspor ke negara tujuan, sehingga keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar global dapat meningkat.
2. Prioritas keempat KKP yaitu Pengembangan budidaya perikanan di laut, pesisir, dan darat yang memperhatikan aspek keberlanjutan dimana, setiap hasil budidaya harus dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikasi SKP dan HACCP sebelum dapat diekspor ke negara tujuan, sehingga keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar global dapat meningkat.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan melalui kegiatan inspeksi/sertifikasi SKP dan HACCP diperlukan sumberdaya manusia (Inspektur Mutu) yang berkompeten- ASN harus terus belajar dan mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

CARA PENGUKURAN

Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

Dimana

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
 A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
 B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
 xn = Total dari unsur pembentuk (2)

Adapun target sertifikasi HACCP pada tahun 2025 sebanyak 272 sertifikat sedangkan target sertifikasi SKP pada tahun 2025 sebanyak 319 sertifikat. Pada rumus perhitungan di atas belum dijelaskan rumus perhitungan untuk memperoleh A dan B. Untuk memudahkan perhitungan maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat HACCP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah sertifikat yang expired (target)}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sertifikat SKP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100\%$$

Persyaratan dalam penerbitan SKP mengacu pada Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan SKP, sedangkan persyaratan dalam penerbitan sertifikasi HACCP mengacu pada Permen KP NO 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Pencapaian IKU ini dapat dilihat pada matriks berikut :

No	Kegiatan	TW IV 2025		
		Target/Rekomendasi	Realisasi	Persentase
1	Sertifikasi HACCP (A)	61	69	113,11%
2	Sertifikasi SKP (B)	90	74	82,22%

Catatan :

1. Realisasi sertifikasi HACCP mencapai 113,11%, karena terdapat beberapa UPI yang proses sertifikasi SKPnya sudah terbit sehingga bisa dilanjutkan ke sertifikasi HACCP.
2. Realisasi sertifikasi SKP mencapai 82,22%, karena terdapat beberapa rekomendasi SKP dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan revisi.

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{113,11 + 82,22}{2} \\ &= 97,66 \%\end{aligned}$$

Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sebesar 97,66 %, dari target 70%. Dengan demikian capaian IKU ini adalah sebesar 139,51 %.

Adapun kegiatan pendukung pada IKU pasca panen adalah kegiatan sertifikasi Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan, sertifikat SPDI (Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan) diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan penyimpanan, pengadaan, sortasi dan grading serta yang melakukan kegiatan distribusi ikan dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai KBLI terkait, menerapkan cara distribusi ikan yang baik (CDIB) dan memenuhi persyaratan pembinaan dari Direktorat Teknis.

Kegiatan sertifikasi SPDI atau Sertifikasi Penerapan HACCP di Supplier mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan No 31 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point di Supplier.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, inspeksi penerapan HACCP di Supplier dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) unit pemasok dan telah diterbitkan sertifikat Penerapan *Hazard Analysis And Critical. Control Point* di Supplier sebanyak 11 (sebelas) lembar sesuai ruang lingkup sertifikasi. Ke delapan unit pemasok tersebut berada di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai, kegiatan dilaksanakan secara virtual.

Jika dibandingkan dengan Triwulan III 2025, telah dilaksanakan inspeksi sertifikasi Penerapan Hazard Analysis And Critical di supplier kepada 16 (enam belas) unit pemasok dan diterbitkan sertifikat sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar sesuai dengan ruang lingkup. Output dari kegiatan ini berupa sertifikat SKP dan HACCP serta didukung oleh sertifikasi SPDI atau CPIB supplier. Dengan adanya sertifikasi SKP dan HACCP ini, Unit Pengolahan Ikan atau UMKM dapat melakukan kegiatan ekspor produk perikanan dengan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terjamin serta memenuhi standar negara tujuan ekspor. Hal ini didukung dengan adanya sertifikasi SPDI atau CPIB supplier yang dapat menjamin mutu dan keamanan pasokan bahan baku yang masuk ke unit pengolahan dan UMKM.

Adapun kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada TW IV 2025 sebagai berikut :

1. Pada tanggal 8 – 10 Oktober 2025 Telah dilakukan Goes To Supplier dalam rangka Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Selayar, kegiatan ini merupakan kolaborasi Balai Besar KIPM Makassar dengan Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI);
2. Pada tanggal 20 - 21 Oktober 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan workshop pemindaian dan pengambilan sampel produk udang yang diekspor bebas

- dari radiasi radionuklida Sesium -137 yang dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP KKP;
3. Pada tanggal 11 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan Sosialisasi SHTI dan CoA Perikanan Tangkap yang diselenggarakan oleh PP Untia;
 4. Pada tanggal 11 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan Sosialisasi Penerbitan CoA Perikanan Budidaya yang diselenggarakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP KKP;
 5. Pada tanggal 21 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar berkolaborasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Maros mengadakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM pada Level UMKM dan Supplier yang dilaksanakan di Kantor Bupati Maros;
 6. Pada tanggal 24 November 2025, Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu telah mengikuti Sosialisasi Teknis Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) untuk Penerbitan sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana, DJPDSP KKP;
 7. Pada tanggal 17 Desember 2025 Balai Besar KIPM Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Hulu Hilir kepada Peserta Magang dan Penyuluh Perikanan BRPBAPP Maros;

Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 16 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengendalian dan pengawasan mutu serta pelayanan sertifikasi mutu hasil perikanan.

Anggaran awal kegiatan pasca panen pada tahun 2025 sebesar Rp. 210.000.000.- di blokir sebesar Rp. 169.228.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 43.012.000,- realisasi ditriwulan IV sebesar Rp.2.239.000,- atau sebesar (5,20%). Jika dibandingkan dengan realisasi sampai

dengan TW IV tahun. 2024 sebesar (99,55%), maka realisasi di Triwulan IV 2025 mengalami penurunan menjadi 94,35% atau 5,25%.

Akar Masalah

- Terdapat beberapa rekomendasi SKP dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan revisi.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan koordinasi dengan Pembina mutu daerah dalam rangka pembinaan

Tindaklanjut Rekomendasi sebelumnya

Telah dilengkapi dokumentasi kegiatan inspeksi HACCP/SKP di Unit Pengolahan Ikan (Terlampir)



Kegiatan Inspeksi Konsistensi Penrapan HACCP

IK.3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025- 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar					1	1	1	100,00	100,00	-	-

Pada tahun 2025 terdapat penambahan IKU baru yaitu Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi), yang ditahun sebelum hanya berupa IKU pendukung.

Balai Besar KIPM Makassar adalah salah satu unit kerja yang mendapatkan target lokasi monitoring cemaran perairan dari Kepala Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP pada, tahun 2025 lokasi monitoring 1 lokasi yaitu perairan wilayah Takalar yang terdiri dari 1 titik monitoring yaitu TPI Beba.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui apakah komoditi perikanan yang diperoleh dari perairan terpapar racun hayati laut dan logam berat serta mendapatkan data dan informasi pengujian kandungan racun hayati laut dan logam berat pada ikan sebagai bahan rekomendasi kepada Otoritas Kompeten.

Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu pada setiap semester dengan sasaran titik pendaratan ikan yang ditangkap di perairan Takalar atau di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan adanya data monitoring yang mutakhir sehingga menjadi bahan rekomendasi pengelolaan perikanan di perairan Makassar.

Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan monitoring cemaran perairan meliputi :

- Sarana dan Prasarana : Penerapan standar sanitasi dan higienis pada TPI/PPI merupakan indikator jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipasarkan sehat dan aman untuk konsumsi
- Pengambilan Contoh uji yang diambil kemudian dibawa ke Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar untuk pengujian parameter logam berat (*Pb, Cd, Hg*) dan pengujian mikrobiologi untuk parameter *E.Coli, Salmonella* dan dikirim ke Laboratorium BUSKIPM untuk pengujian racun hayati laut parameter *ciguatoksine* dikarenakan pengujian racun hayati belum masuk ruang lingkup di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar.

Kegiatan monitoring cemaran perairan merupakan salah satu IKU yang mendukung Asta Cita ke - 2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu perikanan melalui kegiatan monitoring cemaran perairan di perlukan

sumberdaya manusia (Inspektur mutu) yang berkompeten ASN harus terus belajar dan mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

Kegiatan monitoring cemaran perairan, berdasarkan program Tahunan yang telah disusun pada tahun 2025 memiliki 1 target lokasinya yaitu TPI Beba Kab. Takalar, dan dilaksanakan dalam 2 (dua) kali setahun.

Kegiatan monitoring cemaran perairan telah dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025 dengan titik lokasi monitoring cemaran perairan di TPI Beba Kab. Takalar .

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan IV meliputi :

1. Menyampaikan hasil pengujian monitoring cemaran perairan di TPI Beba Kab. Takalar pada tanggal 2 Desember 2025 pada Penanggungjawab TPI Beba
2. Mengikuti kegiatan Work shop Marine biotoxin yang dilaksanakan oleh Singapore food Agency (SFA) pada tanggal 12 Nopember 2025
3. Mengikuti Rapat Evaluasi dan koordinasi dengan tim Pusat Mutu Produksi Primer pada tanggal 24 Desember 2025

Tabel Hasil pengujian monitoring cemaran perairan di PPI Beba

No	Lokasi	Jenis ikan	Parameter Uji			E coli	Hasil Uji	
			Logam berat (Hg, Cd, Pb)	Ciguato xin	Salamone lla		TW III	TW IV
1	PPI Beba	Ikan Barakuda	√	<i>Negativ</i>	√	√	Bawah ambang batas	
		Ikan kaneke	√	<i>Negativ</i>	√	√	Bawah ambang batas	
		Ikan Katamba	√	<i>Negativ</i>	√	√	Bawah ambang batas	

Pada triwulan IV tahun 2025 tanggal 9 Oktober 2025 telah diterima hasil pengujian untuk parameter Ciguatoxin dari BUSPM Jakarta dengan hasil pengujiannya negatif /tidak terdeteksi pada ke 3 (tiga) sampel.

Anggaran awal kegiatan monitoring cemaran perairan pada tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- setelah buka blokir anggaran bernilai Rp. 8.240.000,-

Realisasi anggaran triwulan IV sebesar Rp. 1.170.000,- yang digunakan untuk pembelian sampel pengawasan mutu domestik dan pemantauan ketersediaan ikan pada masa natal tahun 2025 dan tahun baru 2026, dengan demikian realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar 99,90%

Sebagai perbandingan anggaran triwulan III sebesar Rp. 3.650.000,- atau sebesar 44,30% yang digunakan untuk pembelian sampel Pengawasan mutu dan biaya ATK computer supplies sehingga terjadi kenaikan realisasi dari triwulan III ke triwulan IV sebesar 55,6 %.

Akar Masalah

Pada Keputusan Kepala BKIPM No. 96 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis monitoring cemaran perairan dinyatakan frekuensi pengambilan contoh dilakukan minimal 1 (satu) kali per triwulan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Rekomendasi Rencana Aksi

Mengikuti kegiatan rapat persiapan monitoring cemaran perairan yang dilaksanakan oleh pusat mutu produksi primer untuk mendapatkan penjelasan detail terkait juknis tersebut

Tindaklanjut Rekomensi sebelumnya

Pada tanggal 1 desember 2025 telah menyampaikan hasil pengujian ke insatansi terkait yaitu Dinas Perikanan Kab. Takalar



Nomor : B.3743/BDKPM/MSD-TU/210-XA/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pemberitahuan Hasil Pengujian Monitoring Cernam
Peranan dan Perilaku Kontrol Lingkungan

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
Di Takalar

Selubungan dengan adanya kegiatan monitoring cernam perikanan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar di semester II tahun 2025 dimana salah satu titik monitoring adalah PPI Beta Takalar, maka bersama ini disampaikan hasil pengujian pada lokasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan/standar. Adapun hasil penilaian kontrol lingkungan PPI Beta Takalar masih terdapat beberapa ketidaksesuaian pada fasilitas konstruksi serta sanitasi dari hygiene. Untuk itu, kami merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan sarana prasarana terutama ventilasi serta, saluran pembuangan air, program pemeliharaan tangki-ongg, fasilitas toilet, kebersihan es serta kebersihan peralatan dan alat angkut yang digunakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala BDKPM Makassar,



Muhammad Zamrud

Dikirimkan ke: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Takalar, menggunakan surat resmi dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar.



Kegiatan Rapat Evaluasi dan kegiatan Workshop

IK 4. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025- 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4 Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	5	4	4	100	1	1	1	100,00	100,00	-	-

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik merupakan salah satu IKU yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas KKP yaitu:

- Program Prioritas Kedua KKP yaitu penerapan sistem kuota dalam penangkapan dan memastikan keberlanjutan sumber daya ikan, dimana pada kegiatan pengawasan

mutu BPPMHKP Makassar memastikan produk hasil perikanan tangkap yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

- Program Prioritas Ketiga KKP yaitu pengembangan budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, baik untuk komoditas ekspor maupun konsumsi lokal, dimana pada kegiatan pengawasan mutu BPPMHKP Makassar memastikan produk hasil perikanan hasil budidaya yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain dan instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir. Dalam hal ini BPPMHKP memiliki peran penting antara lain:

1. Pengawasan Mutu: BPPMHKP melakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.
2. Pengendalian Mutu: BPPMHKP melakukan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kualitas dan keamanan pangan.

Dengan demikian BPPMHKP juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan

mutu perikanan, diperlukan sumberdaya manusia (Inspektur Mutu) yang berkompeten: ASN harus terus belajar mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

Pada tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebanyak 1 lokasi yaitu kota Makassar dengan jumlah 1 lokus. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester. Adapun lokasi pengawasan sentra penyedia pangan sehat yaitu pasar tradisional.

Pada Triwulan IV tahun 2025 telah terbit hasil pengujian sampel pengawasan mutu domestik yang dilaksanakan pada Triwulan III 2025. Adapun hasil pengujian sampel pada parameter pengujian Organoleptik, ALT, *Echerichia coli*, *Salmonella spp*, Formalin dan Histamin menunjukkan tidak adanya penyimpangan hasil uji.

Pada triwulan IV tahun 2025 tidak terdapat target pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik, namun Balai Besar KIPM Makassar hanya melaporkan hasil pengawasan perikanan domestik yang dilaksanakan pada triwulan III tahun 2025 dan telah diverifikasi oleh tim BPPMHKP Oleh Pusat Mutu Pasca Panen. Selain itu Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam negeri sehubungan ketersediaan stok ikan pada Pelaksanaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Berbagai upaya dilaksanakan antara lain turun langsung ke lapangan memantau stok ikan di sentra penyedia pangan sehat (TPI Labuang Kab. Maros), melakukan diskusi dengan pelaku utama yang melakukan aktivitas jual beli ikan serta melakukan pengawasan mutu produk perikanan untuk memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan bermutu.

Rangkaian kegiatan terdapat pengambilan sampel yang dilakukan di TPI Labuang, terdapat 5 jenis sampel yaitu ikan cakalang segar, ikan ekor kuning segar, udang vannamei segar, cumi-cumi segar dan ikan bandeng segar. Telah terbit hasil pengujian sampel pengawasan mutu

domestik sehubungan ketersediaan stok ikan pada Pelaksanaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di laboratorium penguji Balai Besar KIPM Makassar dengan target pengujian Organoleptik, ALT, *Echerichia coli*, *Salmonella spp*, Formalin dan Histamin. Hasil pengujian menunjukkan tidak adanya penyimpangan hasil uji atau sesuai yang dipersyaratkan.

Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik tahun 2025 merupakan salah satu indikator kinerja yang tidak mendapatkan alokasi anggaran karena adanya kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran. Namun kebijakan pemerintah tersebut tidak menjadi penghalang pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik.

Sebagai pembanding pagu anggaran untuk kegiatan pengawasan mutu domestik pada triwulan IV tahun 2024 sebesar sebesar Rp. 60.000.000. Adapun realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp. 57.235.865 atau 95,39%.

Akar Masalah

1. Balai Besar KIPM Makassar belum menyampaikan hasil pengujian sampel pada kegiatan pengawasan mutu domestik dan pemantauan ketersediaan pasokan ikan menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada instansi terkait.
2. Keterlibatan Balai Besar KIPM Makassar pada kegiatan operasi pasar tradisional yang dilaksanakan secara berkala oleh Pemerintah Kota Makassar belum optimal.

Rekomendasi rencana aksi

Rekomendasi rencana aksi di triwulan I tahun 2026 yaitu:

1. Menyampaikan hasil pengujian sampel pada kegiatan pengawasan mutu domestik dan pementauan ketersediaan pasokan ikan menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada instansi terkait.
2. BPPMHKP Makassar akan berkoordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan kegiatan pengawasan mutu domestik di tahun 2026.

Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

Telah dilaporkan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik Triwulan III kepada Dinas Perikanan dan pertanian Kota Makassar pada bulan November 2025



Keg. Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam negeri sehubungan dengan NaTaRu

IK 5. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan Ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025- 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5 Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	99,99	99,99	101,99	99	99	100	101,01	101,01	-	-

Sistem Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tumbuh seiring dengan perkembangan tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan pangan di tataran internasional yang semakin ketat, dan tidak hanya fokus pada mutu dan keamanan dari produk akhir. Sistem jaminan mutu dan keamanan terhadap proses merupakan tuntutan dan penerimaan masyarakat dunia (internasional) akan keberterimaan pangan, termasuk hasil perikanan. Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh internasional, harus dipenuhi oleh seluruh negara pengekspor, yang dinyatakan pada sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang menyertai setiap produk yang dipasarkan, baik untuk pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor.

Meningkatnya daya saing produk perikanan harus diiringi dengan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berbasis kualitas sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar KIPM Makassar tahun 2025 -2029. Salah satu isu strategisnya adalah peningkatan gizi anak melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan, yang kaya akan nutrisi seperti ikan dan rumput laut

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektifitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Usaha Pembenihan, Pembesaran dan Unit Pengolahan Ikan serta hasil pengujian contoh.

Peningkatan ekspor perikanan ke negara tujuan merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pada Asta Cita ke 5 terdapat tiga kegiatan utama yaitu peningkatan ekspor produk perikanan tangkap, pembangunan industri hilir dan industri penangkapan ikan serta penjaminan mutu dan keamanan pangan akuatik komoditas perikanan budi daya.

Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Balai Besar KIPM Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil

perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ke negara tujuan.

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rasio kegiatan pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar wilayah Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini dibuktikan diterimanya SMKHP di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan dari negara tujuan.

Perhitungan IKU ini berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$X = \frac{A - B}{A}$$

A

X : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A : SMKHP yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B : Jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan

Indikator Kinerja Utama ini menggunakan formulasi diatas sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$X : \frac{\text{Jumlah SMKHP ekspor yang memenuhi syarat mutu} - \text{penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah SMKHP mutu ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$$

$$\frac{(3.349 - 0)}{3.349} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU ini di triwulan IV tahun 2025 adalah 100% karena tidak ada penolakan dari negara tujuan. Jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan

didapatkan nilai yang sama antara Triwulan IV tahun 2025 dan triwulan IV tahun 2024 yaitu 100 %.

Pada triwulan IV tahun 2025 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 47.997,14 ton senilai Rp. 1,95 T dengan jumlah sertifikat ekspor (SMKHP) yang diterbitkan sebanyak 3.349 sertifikat. Sebagai perbandingan, pada triwulan III tahun 2025 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 49.982,96 ton senilai Rp. 1,75 T dengan jumlah SMKHP yang diterbitkan sebanyak 3.358 sertifikat. Berdasarkan data tersebut pada triwulan IV terjadi penurunan frekwensi penerbitan SMKHP sebesar 0,27 % dan volume ekspor sebesar 3,97 % jika dibandingkan triwulan IV tahun 2024, namun terjadi kenaikan persentase nilai ekspor sebesar 11,42 %.

Sebagai perbandingan, volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan pada triwulan IV tahun 2024 sebanyak 53,62 ton senilai Rp. 1,847 T dengan jumlah SMKHP yang diterbitkan sebanyak 2.796 sertifikat. Jika dibandingkan triwulan IV tahun 2025 dan triwulan IV tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah SMKHP sebesar 19,78 % dan nilai sebesar 5,6 % di triwulan IV tahun 2025, namun dari jumlah volume ekspor terjadi penurunan sebesar 10,5 %.

Data pada triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan tidak terdapat kasus penolakan produk perikanan yang dikirim ke negara tujuan. Pada triwulan IV tahun 2025 memiliki kondisi yang sama dengan triwulan IV tahun 2024 yaitu tidak adanya kasus penolakan produk perikanan.

Kegiatan sertifikasi ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu sebanyak 20 orang serta didukung oleh tenaga PPPK sebanyak 13

orang dan PJLP sebanyak 2 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu, serta pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Sejalan dengan peningkatan pelayanan sertifikasi ekspor produk perikanan, terdapat beberapa kegiatan peningkatan kompetensi, pemberian penghargaan, undangan mengikuti kegiatan eksternal maupun kunjungan dari pihak eksternal untuk mendukung IKU ini. Kegiatan tersebut diikuti oleh petugas pelayanan maupun inspektur mutu antara lain sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Waktu Kegiatan
1.	Peningkatan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan	BPPMHKP Makassar	08 Oktober 2025
2.	Briefing Siang Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	14 Oktober 2025
3.	Pelepasan ekspor komoditi perikanan dari kab. Maros yang dirangkaikan dengan peringatan hari ikan nasional	BPPMHKP Makassar	21 November 2025
4.	BPPMHKP Makassar menghadiri ekspor perdana frozen cephalopod	PT. Nirvana Niaga Sejahtra	15 Desember 2025
5.	BPPMHKP Makassar menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Maros sebagai Instansi yang Berperan Aktif Dalam Peningkatan Ekspor Produk Perikanan	Pemerintah Kabupaten Maros	17 Desember 2025
6.	BPPMHKP Makassar menghadiri pelepasan ekspor serentak sinergi Nusantara dari delapan penjurur wilayah Indonesia	Kementerian Perdagangan RI	17 Desember 2025
7.	Rapat koordinasi penguatan SMKHP dan pengembangan laboratorium rujukan wilayah Indonesia Timur	BPPMHKP Makassar	29 Desember 2025

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu :

1. Monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra.
2. Monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP
3. Investigasi kasus penolakan ekspor di negara tujuan.

I. Monitoring dan Evaluasi Nomor Registrasi Negara Mitra

Pada triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra sebanyak 4 (empat) UPI. Adapun UPI yang telah di monitoring adalah :

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan	Inspektur Mutu
1.	PT. Aiki Mega Jaya Utama	05 November 2025	Waode Suharni Arfiandi
2.	PT. Biru Laut Nusantara	05 November 2025	Fatima Tayang Wara Zakaria
3.	PT. Jireh Komoditi	05 November 2025	Kamaruddin Patmawati
4.	PT. Buana Laut Nusantara	05 November 2025	Anugrah Ekayani Taufiq

Monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra (Noreg) dilakukan untuk mengetahui efektifitas penggunaan nomor registrasi oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI). Sasaran kegiatan pada triwulan IV tahun 2025 adalah 4 (empat) UPI yang memiliki nomor registrasi di beberapa negara mitra seperti China, Republik Korea, Arab Saudi, Kanada dan Vietnam. Berdasarkan hasil monev noreg yang paling aktif digunakan oleh UPI tersebut adalah ekspor dengan tujuan negara China. Di triwulan IV tahun 2025 terjadi buka blokir anggaran tetapi belum mengakomodir kegiatan perjalanan dinas sehingga kegiatan ini dilakukan secara daring.

II. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan SMKHP

Pada triwulan IV tahun 2025 BPPMHKP Makassar telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada 3 (tiga) UPI yang melaksanakan ekspor ke negara tujuan. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut ini.

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan	Inspektur Mutu
1.	CV. Anugrah Bintang Cemerlang	02 Oktober 2025	Suprianto Andi.Muh. Haedar
2.	PT. Giwang Citra Laut	02 Oktober 2025	Mohammad Zamrud Taufiq Erwin Wijaya
3.	PT. Lintas Antar Nusa	08 Oktober 2025	Waode Suharni Fatima Tayang Erwin Wijaya

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada UPI dilakukan berdasarkan profiling Unit Pengolahan Ikan dalam kegiatan pelayanan sertifikasi ekspor ke negara tujuan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan monev adalah memastikan bahwa kegiatan penilaian kesesuaian penerbitan SMKHP pada pelaku usaha berjalan sesuai ketentuan regulasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai serta memudahkan BPPMHKP Makassar dalam melakukan penilaian ke pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya pelaku usaha ekspor. Hasil dari kegiatan monev ini menjadi dasar dalam pemberian skoring tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penerbitan SMKHP. Kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP dilaksanakan secara tatap muka dengan memanfaatkan kendaraan dinas. Pada triwulan IV telah dilakukan buka blokir anggaran tetapi belum mengakomodir kegiatan perjalanan dinas.

III. Investigasi Kasus Penolakan Ekspor Di Negara Tujuan

Pada triwulan IV tahun 2025 tidak terdapat notifikasi penolakan ekspor dari negara tujuan di UPT BPPMHKP Makassar, namun berdasarkan data hasil uji laboratorium terdapat beberapa produk perikanan yang menyimpang sehingga dilakukan investigasi secara virtual. Adapun UPI yang di investigasi adalah sebagai berikut:

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan Investigasi	Produk	Penyebab	Inspektur Mutu
1.	PT. Wahyu Pradana Bina Mulia	20 Oktober 2025	Air dan Es	Penyimpangan Hasil Uji Laboratorium kimia (Fe)	A. Rahmانيar DJ Ardiana
2.	PT. Lintas Antar Nusa	23 Oktober 2025	Air Asin	Penyimpangan Hasil Uji Lab Total Zat padat terlarut	Habrin Yake Muzakir
3.	CV. Maros Timur Jaya	03 November 2025	Air dan Es	Penyimpangan hasil uji parameter Besi (Fe) Terlarut pada Air dan Es serta Total Zat Padat Terlarut (TDS) pada Es	Habrin Yake Muzakir
4.	PT. Global Maju Pratama	27 November 2025	Air	Penyimpangan hasil uji laboratorium parameter Zat Padat Terlarut (TDS)	Habrin Yake Muzakir
5.	PT. Sinar Graha	04 Desember 2025	Frozen Pelagic Fish (Steak Tenggiri)	Penyimpangan hasil uji parameter kimia Timbal (Pb)	Habrin Yake Muzakir

Kegiatan yang mendukung IKU ini beserta pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Lock Pagu	Realisasi Anggaran TW IV 2025	Persentase Realisasi
1.	7010.ABR.001 Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0

	Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor				
2.	3989.QIC.002 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	0	0
3.	3989.BIA.001 Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0

Alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini pada tahun 2025 sebesar Rp. 45.000.000. Adapun anggaran untuk indikator kinerja sampai dengan TW IV tidak terealisasi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 57.000.000 dengan realisasi Rp. 56.841.000 dimana terjadi penurunan pagu anggaran sebesar 25%.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 belum ada anggaran yang terealisasi disebabkan buka blokir anggaran telah dilaksanakan tetapi belum mengakomodir kegiatan perjalanan dinas.

Pada triwulan IV tahun 2024 dan triwulan IV tahun 2025 telah terealisasi kegiatan pendukung yaitu monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi negara mitra sebesar 100 %, namun dari segi anggaran tidak berjalan maksimal di tahun 2025 disebabkan karena buka blokir anggaran telah dilaksanakan tetapi belum mengakomodir kegiatan perjalanan dinas.

Akar Masalah

Belum tersedia prosedur internal terhadap penyimpangan hasil uji setelah dilakukan investigasi

Rekomendasi rencana aksi

- Pertemuan/sharing session inspektur mutu terkait prosedur internal terhadap penyimpangan hasil uji setelah dilakukan investigasi

Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

Telah dilaksanakan kegiatan monev nomor registrasi negara mitra dibulan November sebanyak 4 (empat) UPI.



Keg. Eksport Produk Perikanan

Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar di dukung 2 Indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 2 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar 1. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar 2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1. 75 Nilai 2. 75 Nilai

IK6. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	-	75	75	91,23	121,64	121,64	-	-

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa

laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

dimana :

$\bar{X}$	= Rata-rata
$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$	= Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, ..., n
n	= Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Hasil verifikasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji di Balai Besar KIPM Makassar dihitung oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP berdasarkan rumus di atas.

Berdasarkan surat dari Kepala Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP Nomor B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Penyampaian Capaian Kinerja Sistem Manajemen Mutu sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, maka Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai sebesar 91,23 dari target sebesar 75. Sehingga output kegiatan penerapan sistem manajemen mutu telah terealisasi sebesar 121,64 %.

Sebagai perbandingan, capaian nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu dengan beberapa UPT BPPMHKP dapat disandingkan sebagai berikut :

- Balai KIPM Semarang dengan nilai 92,02. Maka untuk perbandingan ini, masih lebih rendah dengan selisih 1,06 poin.
- Balai KIPM Denpasar dengan nilai 86,57. Maka untuk perbandingan ini, Balai Besar KIPM Makassar lebih tinggi dengan selisih 4,39 poin.

Dari bechmarking tersebut diatas maka Balai Besar KIPM Makassar masih memerlukan perbaikan berkelanjutan terhadap indikator-indikator penilaian terutama pada indikator yang menjadi temuan ketidaksesuaian.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium penguji adalah kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar. Selama Triwulan IV Tahun 2025, terdapat 1.923 kali pengujian laboratorium yang terdiri dari :

1. Pengujian Organoleptik sebanyak 149 kali
2. Pengujian Mikrobiologi sebanyak 1.161 kali
3. Pengujian Kimia sebanyak 443 kali
4. Pengujian Air dan Es sebanyak 170 kali

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 18 orang mulai dari Manager Puncak hingga analis dan staf laboratorium yang kompeten dalam melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium.

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan dengan memberikan pelayanan laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan.

Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar pada semula Rp 36.537.000,- Triwulan IV tahun 2025 menjadi Rp. 112.446.000,-. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2025 meningkat sebesar 60,6% dari sebelumnya sebesar Rp. 70.000.000,- di tahun 2024.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu telah direalisasikan sebesar Rp. 103.003.210,- atau sebesar 91,60% dari anggaran tahun 2025. Sisa anggaran sebesar Rp. 9.442.790,- sudah tidak dapat direalisasikan karena adanya anggaran penanganan limbah laboratorium yang berlebih.

Pada Triwulan IV Tahun 2025 ini telah dilakukan beberapa kali kegiatan peningkatan kompetensi laboratorium diantaranya :

- 16/10/2025 Webinar Growth Promotion Test as Part of Microbiology Media ISO 11133 oleh DKSH
- 03/11/2025 Pelatihan Online Pengelolaan Limbah oleh Maja Sains
- 12/11/2025 ASEAN Training Workshop Online on Marine Biotoxins oleh Singapore Food Agency
- 25/11/2025 Webinar Basic & Analisa Atomic Absorption Spectrophotometer oleh Maja Sains
- 26/11/2025 Pelatihan Online Good Laboratory Practices oleh Pusat Manajemen Mutu
- 27/11/2025 Pelatihan Online Pemahaman Pengujian Proximat Produk Perikanan oleh Pusat Manajemen Mutu
- 2-3/12/2025 Workshop Teknik Audit SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Pusat Manajemen Mutu
- 18/12/2025 Webinar Safety Microbiology Laboratory oleh Maja Sains
- 23/12/2025 Pelatihan Online Essential Microbiology Testing From ISO Standards to Innovative Alternative Methods oleh DKSH

Pada tanggal 25 November 2025 Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP melaksanakan Verifikasi Official Control untuk melihat konsistensi pengujian laboratorium dalam rangka official control di Balai Besar KIPM dengan evaluator Martono dan Danar Kristiasari. Hasilnya terdapat 5 temuan yang telah dilakukan tindakan perbaikan pada tanggal 24 Desember 2025. Hasil verifikasi official control Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai 88,33 (sangat baik).

Pada tanggal 10 November 2025 terdapat kunjungan praktek kerja lapang mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin sebanyak 40 orang dalam

rangka menggali ilmu dan pengalaman pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar.

Selama Triwulan IV tahun 2025, terdapat 7 mahasiswa Jurusan Perikanan Universitas Hasanuddin yang melaksanakan magang di Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar dan terdapat 4 orang lulusan perguruan tinggi yang melaksanakan magang berdasarkan program pemagangan nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Program magang ini memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada peserta magang dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan khususnya di bidang pengujian laboratorium.

Pada tanggal 7 – 8 November 2025 terdapat kunjungan Kepala Pusat Manajemen Mutu ke Balai Besar KIPM Makassar dalam rangka memantau progress persiapan pembangunan laboratorium rujukan yang di biyai dari anggaran SBSN tahun 2026. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Pusat Manajemen Mutu memberikan arahan rencana strategis pembangunan laboratorium rujukan. Rencananya Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar akan mendapatkan peralatan tambahan untuk penambahan ruang lingkup uji laboratorium Balai Besar KIPM Makassar.

Pada tanggal 29-31 Desember 2025 Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Rapat Koordinasi Penguatan SMKHP dan pengembangan Laboratorium Rujukan Wilayah Timur yang diikuti oleh 6 UPT BPPMHKP lingkup kawasan Indonesia Timur untuk mengkonsolidasikan rencana pengembangan metode uji laboratorium rujukan.

Akar Masalah

Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar akan dijadikan laboratorium rujukan Wilayah Timur Indonesia dengan beberapa ruang lingkup baru. Potensi masalah yang ada adalah

kemampuan analis dalam melaksanakan pengujian untuk ruang lingkup yang akan di tambahkan.

Rekomendasi Rencana Aksi

Peningkatan kemampuan dan kompetensi analis laboratorium dalam bentuk sharing session ataupun mengikuti pelatihan internal atau eksternal dalam melakukan pengujian laboratorium sesuai standar internasional SNI ISO/IEC 17025:2017

Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

Telah dilakukan pelatihan peningkatan kompetensi analis laboratorium pada Triwulan IV Tahun 2025.



Keg. Verifikasi Official Control Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP

IK7. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan	7 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM	-	-	-	-	-	75	75	90,96	121,28	121,28	-	-

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga Inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (ISO 17020).

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah kegiatan surveilan penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Selama Triwulan IV Tahun 2025, terdapat 75 kali pelaksanaan surveilan penerapan HACCP.

Perhitungan nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi berdasarkan manual IKU menggunakan rumus sebagai berikut :

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

dimana :

$$\bar{x} = \text{Rata rata}$$

$$\frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} = \text{Nilai tingkat pemenuhan ke-1, 2, 3, ..., n}$$

$$n = \text{Banyaknya nilai tingkat pemenuhan}$$

Hasil verifikasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji di Balai Besar KIPM Makassar dihitung oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP berdasarkan rumus di atas. Berdasarkan surat dari Kepala Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP Nomor B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Penyampaian Capaian Kinerja Sistem Manajemen Mutu sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, maka Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai sebesar 90,96 dari target sebesar 75. Sehingga output kegiatan penerapan sistem manajemen mutu telah terealisasi sebesar 121,64 %.

Sebagai perbandingan, capaian nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu dengan beberapa UPT BPPMHKP dapat disandingkan sebagai berikut :

- Balai KIPM Semarang dengan nilai 92,02. Maka untuk perbandingan ini, masih lebih rendah dengan selisih 1,06 poin.
- Balai KIPM Denpasar dengan nilai 86,57. Maka untuk perbandingan ini, Balai Besar KIPM Makassar lebih tinggi dengan selisih 4,39 poin.

Dari bechmarking tersebut diatas maka Balai Besar KIPM Makassar masih memerlukan perbaikan berkelanjutan terhadap indikator-indikator penilaian terutama pada indikator yang menjadi temuan ketidaksesuaian.

Puncak hingga inspektur mutu hasil perikanan yang telah memiliki nomor registrasi inspektur mutu dan/atau telah mengikuti pelatihan HACCP dasar.

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi ini mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi memberikan

jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Kompeten dimana ASN dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas sesuai dengan tantangan yang ada. Dengan adanya perubahan tugas dan fungsi dalam penjaminan mutu hulu hingga hilir, ASN inspektur mutu dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan mengupdate regulasi-regulasi terbaru.

Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar Triwulan IV tahun 2025 yang mengalami perubahan menjadi Rp. 27.304.000,- dari sebelumnya sebesar Rp. 3.500.000,- di Triwulan I Tahun 2025. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2025 meningkat sebesar 36,52% bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 20.000.000,-.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu telah direalisasikan sebesar Rp. 27.254.000,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 50.000,- merupakan sisa anggaran dari kegiatan yang tidak terserap.

Pada tanggal 25 November 2025 Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP melaksanakan Verifikasi Quality Management System untuk melihat konsistensi pelaksanaan SNI ISO/IEC 17020:2012 di Balai Besar KIPM dengan evaluator Martono dan Danar Kristiasari. Hasilnya terdapat 7 temuan yang telah dilakukan tindakan perbaikan pada tanggal 24 Desember 2025. Dari hasil verifikasi tersebut, lembaga inspeksi Balai Besar KIPM Makassar memperoleh penilaian 88,33 (sangat baik).

Pada tanggal 26 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti Webinar Integrasi Sistem Manajemen Mutu yang diikuti oleh inspektur mutu Balai Besar KIPM Makassar untuk meningkatkan pemahaman inspektur mutu mengenai penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012 yang diintegrasikan dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO 9001:2015.

Pada tanggal 1 – 2 Desember 2025 telah dilakukan re-akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 oleh Badan Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup Surveilans HACCP. Hasilnya terdapat 17 temuan penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012 dan 3 temuan penyaksian (witness). Tindakan perbaikan paling lambat harus diselesaikan pada tanggal 1 Februari 2026.

Akar Masalah

Sertifikat Akreditasi Lembaga Inspeksi Balai Besar KIPM Makassar SNI ISO/IEC 17020:2012 dengan nomor akreditasi LI-089-IDN telah dilakukan re-akreditasi. Terdapat 17 temuan penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012 dan 3 temuan witness lembaga inspeksi. Potensi masalah yang perlu diperhatikan adalah belum efektifnya tindak lanjut tindakan perbaikan temuan re-akreditasi yang memiliki tenggat waktu yang semakin dekat, yaitu tanggal 1 Februari 2026.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan penyelesaian temuan re-akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 sesegera mungkin sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

Berdasarkan rekomendasi tindak lanjut triwulan sebelumnya, telah dilakukan re-Akreditasi terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012 pada tanggal 1-2 Desember 2025.

Sasaran Kegiatan 3

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, untuk mencapai sasaran kegiatan ini diperlukan dukungan 9 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan . adapun penjelasan pencapaian 9 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :	
1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UPT Lingkup Balai Besar KIPM Makassar)	1. 92 Nilai
2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	2. 71,5 Nilai
3. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	3. 100 %
4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	4. 87 Indeks
5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	5. 86 Nilai
6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	6. 85 persen
7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	7. 76 Persen
8. Nilai minimal yang di persyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	8. 75 Nilai
9. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	9. 3,36 Index

IK8. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	8 Nilai Indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar	88	89	98,44	96,38	97,16	92	92	94,58	102,80	102,80	-	-

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi OM-SPAN. Penilaian IKPA diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

xxx Ruang lingkup :

PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 mengatur mengenai pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objektif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA dan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh DJPB.

xxx Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja

Pengukuran IKPA meliputi 3 aspek :

1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan

ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:

- a. Revisi DIPA bobot 10 %
 - b. Deviasi halaman 3 DIPA bobot 15%
2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
- a. Penyerapan anggaran bobot 20%
 - b. Belanja Kontraktual bobot 10%
 - c. Penyelesaian Tagihan bobot 10%
 - d. Pengelolaan UP dan TUP bobot 10%
 - e. Dispensasi Surat Perintah Membayar bobot 0%
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini adalah capaian output. Bobot capaian output adalah 25%.

Total Konversi Bobot pada Aspek pengukuran dan Indikator Kinerja pada TW IV Tahun Anggaran 2025 adalah 100%

Capaian nilai IKPA Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 94,58 persen dari target 92 persen.

Capaian Kinerja IKPA diperoleh sebagai berikut:

Capaian kinerja IKPA = (Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran) / Konversi Bobot 100 %

Perhitungan perolehan dari Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran, Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan Indikator pendukung pada masing-masing adalah hasil perhitungan otomatis dari Aplikasi Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi Monev PA

Berikut tampilan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran Triwulan IV tahun 2025 pada Balai Besar KIPM Makassar.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sumber Data: DKS/3.000.00

No	Kode KPN	Kode BA	Kode Saker	Uraian Saker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispersi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penggunaan Anggaran	Belanja Konstruktif	Penyelesaian Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP	Capaian Output				
1	136	032	427586	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100.00	77.96	96.48	80.00	100.00	100.00	100.00	94.58	100%	0.00	94.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.68	19.90	8.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Rata-rata	88.93			94.67			100.00				

Dibawah ini merupakan tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran:

- Tabel perbandingan capaian kinerja pelaksanaan anggaran TW III 2025 dan TW IV 2025



Indikator kinerja	Periode TW III 2025 (TQ4=92)		Periode TW IV 2025 (TQ4=92)	
	Bobot	Nilai Akhir	Bobot	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	10
Deviasi Hal III DIPA	15	11,56	15	11,68
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	20	19,86	20	19,9
Belanja Kontraktual	10	10	10	8
Penyelesaian Tagihan	10	10	10	10
Pengelolaan UP dan TUP	10	10	10	10
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	25	25	25
Dispensasi SPM (Pengurang)	0	0	0	0
Nilai Total	100	96,42	100	94,58
Nilai IKPA setelah konversi		96,42		94,58
Capaian (Realisasi/Target Q2)		104,80		102,80

Pada tabel diatas terlihat adanya penurunan nilai IKPA pada TW IV 2025 dibandingkan TW III 2025 sebesar 2 persen namun capaian realisasi masih melampaui target IKU 8 yang telah ditetapkan di awal tahun. Penurunan TW IV 2025 dipengaruhi oleh Belanja kontraktual.

Tidak maksimalnya realisasi Belanja Kontraktual pada IKPA bulan Desember 2025 disebabkan oleh adanya rencana kegiatan kontraktual pada tahun anggaran 2025 berupa pekerjaan penambahan daya listrik dari 23.000 VA menjadi 66.000 VA dengan nilai sebesar Rp68.820.000. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan karena adanya pertimbangan teknis dan penyesuaian kondisi lapangan yang menyebabkan pekerjaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 belum mencapai 100% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp10.350.854.000. Sisa anggaran yang tidak terserap terutama disebabkan oleh beberapa faktor administratif dan kebijakan yang berada di luar pelaksanaan program utama kantor Balai Besar KIPM Makassar. Yaitu:



1. Terdapat pagu anggaran yang diblokir sebesar Rp189.258.000 sehingga tidak dapat direalisasikan.
2. Terdapat pengembalian belanja pegawai berupa uang makan dan tunjangan kinerja, baik ASN maupun PPPK, dengan total pengembalian sebesar Rp101.672.000, yang merupakan hasil penyesuaian hak kepegawaian dan koreksi administratif.
3. Terdapat belanja yang tidak terealisasi akibat kebutuhan yang tidak jadi dilaksanakan, seperti kegiatan kalibrasi sebesar Rp9.314.000, akumulasi sisa belanja barang lainnya dalam jumlah relatif tidak material
4. Pembatalan kontrak penambahan daya listrik senilai Rp68.820.000 yang tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan teknis dan kehati-hatian pelaksanaan.

Secara keseluruhan, total anggaran yang tidak dapat diserap akibat blokir dan belanja tersebut hanya sekitar 3,7% dari total pagu, sehingga realisasi anggaran secara umum tetap mencerminkan kinerja pelaksanaan anggaran yang baik dan efektif.

Tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran TW IV 2025 dan TW IV 2024

Indikator kinerja	Periode TW IV 2024 (TQ4=93,78)		Periode TW IV 2025 (TQ4=92)	
	Bobot	Nilai Akhir	Bobot	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	10
Deviasi Hal III DIPA	15	13,82	15	11,68
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	20	19,15	20	19,9
Belanja Kontraktual	10	9,2	0	8
Penyelesaian Tagihan	10	10	0	10
Pengelolaan UP/TUP	10	9,93	10	10
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	25	25	25
Dispensasi SPM (Pengurang)	0	0	0	0
Nilai Total	100	97,16	100	94,58
Nilai IKPA setelah konversi		97,16		94,58
Capaian (Realisasi/Target Q2)		103,60		102,80

Pada tabel diatas terlihat adanya penurunan nilai IKPA pada TW IV 2025 dibandingkan TW IV 2024 sebesar 0,8. Salah satu indikator penyebab penurunan tersebut terdapat pada indikator perencanaan anggaran Deviasi Hal III DIPA

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 10 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK

- Surat Perintah Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor: B.005/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tgl 2 Januari 2025 dengan beranggotakan 1 Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan manajemen keuangan dan layanan perkantoran gaji dan tunjangan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan manajemen keuangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp23.450.000. Pagu pada kegiatan ini terblokir sepenuhnya.
- Layanan perkantoran gaji dan tunjangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp6.734.232.000 setelah revisi. Pada TW IV 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 6.632.028.852 atau 98,48 persen. Output dari layanan perkantoran gaji dan tunjangan adalah pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar.

Total pagu anggaran untuk mendukung capaian kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebesar Rp6.757.682.000 dengan realisasi anggaran 6.632.028.852 atau 98,14 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan IV 2024, kegiatan pada indikator kinerja ini hanya didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp9.468.000 Setelah revisi dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.440.000 atau 99,70 persen. terdapat penurunan realisasi anggaran pada Triwulan IV 2025. Hal ini disebabkan pada Triwulan IV 2025 pagu anggaran kegiatan layanan manajemen keuangan masih terblokir seluruhnya dan pagu anggaran sebagai pendukung pada indikator yang sama pada Triwulan IV 2024 sangat kecil.

Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita.

Akar masalah

Kurang optimalnya monitoring pelaksanaan belanja kontraktual



Rekomendasi rencana aksi

Melaksanakan monitoring belanja kontraktual melalui briefing pagi/sharing session antar pengelola anggaran di awal tahun untuk meminimalisir tidak terserapnya kegiatan belanja kontraktual di akhir tahun.

Hasil Tindakanlanjut Rekomendasi

- Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan RPD 2026 yang dirangkaikan dengan rapat evaluasi kegiatan operasional tgl 19 Desember 2025
- Pengelola anggaran telah memaksimalkan realisasi sesuai dengan RPD.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : 19/12/2025

No	Kode APBN	Kode SA	Kode Suber	Uraian Suber	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispenasi SPN (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penyerapan Anggaran	Salutir Kontraktual	Penyerapan Tagihan	Pengalokasian UP dan TUP	Capaian Output				
1	136	002	427598	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100.00	77.86	99.45	80.00	100.00	100.00	100.00	94.58	100%	0.00	94.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Aktor	10.00	11.68	19.90	8.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Rapor	88.93			94.07			100.00				

Kegiatan penyusunan RPD yang dirangkaikan dengan Rapat Evaluasi dan Kegiatan Operasional tgl 19 Desember 2025



IK9. Nilai Kinerja Perencanaan anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	9 Nilai kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar		86	87,87	86,2	98,37	71,5	71,5	88,93	124,38	124,38	-	-

Menteri keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk

mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

- Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
- Penyusunan revidi angka dasar;
- Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenan; dan
- Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga; dan/atau pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar dan praktisi.

Untuk memantau Nilai Kinerja Anggaran, Kementerian Keuangan telah membuat suatu aplikasi yaitu Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap organisasi dapat selalu memantau dashboard kinerja anggaran dan melakukan peningkatan pada aspek-aspek penunjang Nilai Kinerja Anggaran tersebut.

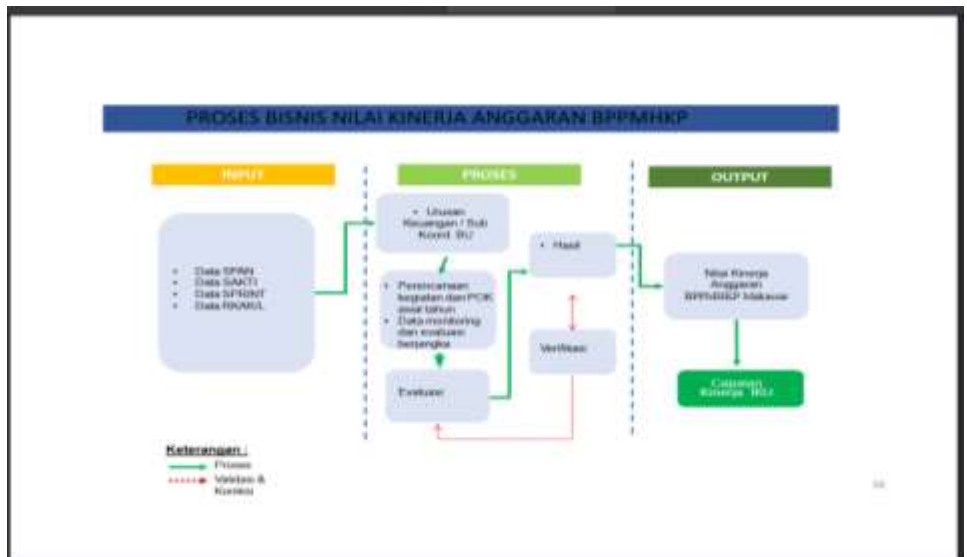
Pada triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja ini antara lain :

- Penyusunan revisi anggaran

Aplikasi Monev Kementerian Keuangan pengukuran Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan pada 2 kategori yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya Nilai Kinerja

Anggaran didasarkan dari 4 aspek yaitu Aspek Penyerapan, Konsistensi, Capaian realisasi Output, dan Nilai Efisiensi.

Berikut adalah proses bisnis terbentuknya data pada dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu



Dasboard Aplikasi Monev Kemenkeu

Penjelasan Dasboard Nilai Kinerja Anggaran Triwulan IV tahun 2025



1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 47,29 %
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 50 %

Nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 47,29% yang terlihat pada aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id> sudah dapat menjelaskan kondisi riil nilai kinerja perencanaan anggaran yang ada di Balai Besar KIPM Makassar. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id> sudah terupdate yang dibuktikan dengan statemen pada aplikasi yaitu “Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi”.

Jika dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2025 anggaran sebesar 9,2% terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada Triwulan IV Tahun 2025 menjadi 47,29%. Hal ini disebabkan karena sudah optimalnya realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV sebesar 77,86% dibandingkan pada TW III anggaran sebesar 77,05%.

Capaian nilai perencanaan anggaran Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 100 persen dari target 71,5, dimana nilai perencanaan juga berintegrasi dengan nilai IKPA. Nilai tersebut tidak menggambarkan nilai sebenarnya, hal ini disebabkan karena adanya Nota Dinas dari Sekretaris Jenderal KKP Nomor: 138/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan IV TA 2025.



Untuk mendukung tercapainya IKU ini, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 9 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK

Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas Balai Besar KIPM Makassar.

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran dan layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

➤ Layanan Perencanaan dan penganggaran

Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 17.407.000,-. Pada TW IV 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 17.406.459,- Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.

➤ Layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan

Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 313.110.000,-. Pada TW IV 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 312.839.527,- Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.

Pada Triwulan IV Tahun 2025 terdapat buka blokir anggaran sebesar Rp. 1.620.576.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan dukungan manajerial (3987) sebesar Rp. 1.420.698.000, kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu (3989) sebesar Rp. 159.628.000 dan kegiatan manajemen mutu (7010) sebesar Rp. 40.250.000. Buka blokir anggaran berdampak positif terhadap kinerja anggaran Triwulan IV disebabkan anggaran yang tersedia dapat segera dibelanjakan sesuai kegiatan, program yang sempat tertunda akibat blokir anggaran dapat dilanjutkan dan diselesaikan tepat waktu serta target fisik dan manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Selain itu buka blokir anggaran menyebabkan ketidaksesuaian rencana penarikan dana yang telah disusun pada awal Triwulan.

Pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang

Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta cita.

Akar masalah

- Buka blokir anggaran akhir tahun belum terserap secara maksimal terutama di belanja 52;
- Buka blokir anggaran diakhir tahun berpotensi terjadinya pembelanjaan yang kurang efektif, tidak tepat sasaran dan ketidaksesuaian prioritas.

Rekomendasi rencana aksi

- Rapat/briefing terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- Identifikasi resiko buka blokir anggaran.

Tindaklanjut Rekomendasi sebelumnya

Briefing personil dukungan manajerial terkait percepatan penyerapan anggaran tanggal 22 Oktober 2025;



IK 10. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	10 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	100	100	100	100	100	100,00	100,00	-	-

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemerisa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir;

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan

pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern;

Indikator kinerja “Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)” dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$\% P = (A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

%P = Persentase penyelesaian temuan;

A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan;

B = Nilai temuan BPK tahun 2025;

Pada TW IV tahun 2025 terdapat kegiatan audit BPK berdasarkan Surat Pemberitahuan BPK nomor 184/B/S/DJPKN-IV/PPA.02/11/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang akan dilaksanakan selama 30 hari sejak tanggal 24 November s/d 31 Desember 2025. Adapun lokasi sampling audit di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTT dan Kalimantan Barat. Provinsi Sulawesi Selatan tidak menjadi lokasi sampling audit tetapi mengumpulkan data Rekapitulasi Belanja Modal dan Belanja Barang Kontraktual TA 2025.

Pada triwulan IV tahun 2025 tidak ada temuan BPK karena Balai Makassar tidak termasuk sample audit BPK, sehingga realisasi dari IKU ini dinilai mencapai 100%, jika dibandingkan TW III, TW II dan TW I 2025 yaitu 100% jadi Tahun 2025 ini capaian realisasinya 100%.

Dengan demikian penyelesaian temuan BPK pada lingkup Balai Besar KIPM Makassar dinilai konsisten.

Kegiatan yang Dilaksanakan :

Pada triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan guna mendukung tercapainya indikator ini, yakni dengan melakukan pemeriksaan, verifikasi dan validasi terhadap seluruh bukti tagihan belanja untuk menentukan bahwa tagihan tersebut layak untuk dilakukan pembayaran. Dengan aktivitas tersebut diharapkan pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku sehingga tidak ada temuan dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional baik internal maupun eksternal;

Persentase penyelesaian temuan BPK mendukung Misi Asta Cita ke-7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan Korupsi dan Narkoba”. Hal ini karena dengan adanya IKU ini dapat mendorong instansi pemerintah dalam hal ini Balai Besar KIPM Makassar untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta mematuhi penyelesaian temuan BPK tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu “Akuntabel” ASN bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;

- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;
- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja 3987.EBA.994.002.0C dan 0H adalah sebesar Rp. 196.283.000,- yang terdiri dari :

- Layanan Perkantoran, Perawatan Kendaraan Bermotor semula Rp. 135.310.000,- menjadi 141.683.000,-;
- Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu anggaran sebesar Rp. 54.600.000,-

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah direalisasikan anggaran Rp. 196.143.552,- atau 99.9% yang digunakan untuk Layanan perkantoran, Perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp. 141.564.319,- dan Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu sebesar Rp. 54.579.233,-

Akar Masalah

Belum optimalnya Sistem pengendalian internal keuangan terkait verifikasi berjenjang;

Rekomendasi rencana aksi

Melaksanakan rapat SPIP membahas verifikasi keuangan secara berjenjang;

Tindakanlanjutan Rekomendasi sebelumnya

Telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh bukti tagihan belanja, dan dituangkan dalam lembar checklist;

IK 11. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	11 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar	68,01	81,44	82,23	90,27	90,78	82	82	87,97	107,28	107,28	-	-

Menurut UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu

kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Target Tahunan IP ASN Tahun 2025 adalah 82 dengan periode pelaporan Semester II. Nilai Realisasi IP ASN sampai dengan triwulan IV 2025 adalah **87.97**

Dengan keterbatasan anggaran, TIM Kepegawaian Balai Besar KIPM Makassar berupaya melakukan pengembangan kompetensi ASN dengan Optimalisasi teknologi, perencanaan strategis dan kolaborasi.

❖ Optimalisasi teknologi

1. Cara Budi Daya Ikan yang Baik diikuti oleh 4 orang Inspektur Mutu Ahli Muda dan Ahli Pertama
2. Penggunaan aplikasi Portal KKP bagi PPPK diikuti oleh 1 orang PPPK
3. Growth Promotion Test as Microbiology iso 11133 diikuti oleh 13 orang ASN
4. Kupas Tuntas Soal Udang diikuti oleh 5 orang ASN
5. Penguatan sektor Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pembangunan ekonomi bali diikuti oleh 1 orang ASN
6. Radiation Awareness Dialogue on Aquatic diikuti oleh 8 orang ASN
7. Asistensi penilaian arsip usul musnah di lingkungan SKIPM Cirebon diikuti 2 orang ASN
8. Ketidakpastian pengukuran kualitatif dan Kuantitatif mikrobiologi diikuti oleh 12 orang ASN
9. Rakor Penyelamatan Arsip Kabinet Indonesia Maju dan Arsip Kemaritiman diikuti oleh 1 orang
10. Penanganan dan Pengelolaan Limbah Laboratorium diikuti oleh 1 orang ASN
11. Temu teknis sub jejaring Laboratorium pengujian pangan indonesia sektor Kelautan dan Perikanan diikuti oleh 2 orang ASN
12. ASEAN Training Workshop on Marine Biotxin diikuti oleh 1 orang ASN
13. Sosialisasi CDIB untuk penerbitan SPDI diikuti oleh 1 orang ASN

14. Basic & teknik Analisa dengan Instrument Atomic Absorption Spectrohometer diikuti oleh 15 orang ASN
15. Pemahaman Integrasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, dan SNI ISO/IEC 17020:2012 diikuti oleh 5 orang ASN
16. Pemahaman Good Laboratory Practices diikuti oleh 3 orang ASN
17. SCS_E-Certificate_Monthly Microbiology Webinar diikuti oleh 1 orang ASN
18. Pemahaman Pengujian Proksimat (Kadar Air, Kadar Garam, dan Kadar Abu) pada Produk Hasil Perikanan diikuti oleh 11 orang ASN
19. Pemahaman Produksi Pakan serta Pengelolaannya dalam Mendukung Pembudidayaan Ikan diikuti oleh 14 orang ASN
20. Pemahaman Prinsip-prinsip Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), dan Jenis Obat Ikan dan Penggunaan yang Aman dan Efektif diikuti oleh 3 orang ASN
21. Seminar Diseminasi Hasil Laboratorium Acuan BUSPM diikuti oleh 2 orang ASN
22. Inovasi Produksi Pakan Alami Perikanan Budi Daya diikuti oleh 1 orang ASN
23. Forum Konsultasi Publik Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi yang dikecualikan KKP diikuti oleh 2 orang ASN
24. Budaya Kerja ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan diikuti oleh 2 orang ASN
25. Panduan Praktis Mengoptimalkan Pajak UMKM diikuti oleh 1 orang ASN
26. Peningkatan Produksi Udang Windu berbasis Ekosistem ISPIKANI diikuti oleh 8 orang ASN
27. FGD Pengembangan Budi Daya Rumput Laut diikuti oleh 7 orang ASN

❖ Perencanaan strategis dan kolaborasi :

1. Pelatihan HACCP Dasar dalam rangka mendukung kontaminasi pencegahan Cesium-137 diselenggarakan Pusat Mutu Pasca Panen bekerjasama dengan BPPSDM yang diikuti oleh 1 orang ASN
2. Pelatihan pembentukan Inspektur Mutu (Noreg) diselenggarakan Pusat Mutu Pasca Panen bekerjasama dengan BPPSDM diikuti oleh 1 orang ASN
3. Badan Mutu KKP Makassar berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Penataran Peserta Magang Batch III yang diselenggarakan oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros
4. Badan Mutu KKP Makassar gelar forum konsultasi publik, dengan narasumber dari Badan Mutu KKP Makassar, Ombudsmen RI Perwakilan Sulsel dan Bank Papua cabang Makassar
5. Badan Mutu KKP Makassar menjadi salah satu narasumber kegiatan penyadartahuan publik dalam Peringatan Hari Ikan Nasional dengan tema “Konsumen Cerdas : Penuhi Gizi, Laut Lestari” yang diselenggarakan oleh Marine Buddies Makassar
6. Dinas Perikanan Kabupaten Bone bekerja sama dengan Badan Mutu KKP Makassar melaksanakan kegiatan Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal sebagai narasumber
7. Badan Mutu KKP Makassar bekerja sama dengan Bank Papua Cab.Makassar melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada level UMKM dan Supplier sebagai narasumber
8. Badan Mutu KKP Makassar mengikuti kegiatan Sosialisasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan Certificate of Admissibility (CoA) Perikanan Tangkap yang dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Untia
9. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar menghadiri kegiatan Forum Ilmiah Kepiting Berkelanjutan dengan tema “Masa Depan Kepiting: Inovasi Keberlanjutan”

yang diselenggarakan oleh Pusat Kolaborasi Riset Kepiting Berkelanjutan Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

10. Dinas Perikanan Kabupaten Bone bekerja sama dengan Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Makassar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal
11. Badan Mutu KKP Makassar mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pusat Kolaborasi Riset Shrimp Tech Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan Universitas Hasanudin bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros
12. Badan Mutu KKP Makassar menjalin kerja sama dengan lembaga Balla Inklusi dengan kegiatan pelayanan publik yang ramah bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas

Peningkatan kompetensi menjadikan budaya kerja berupa sikap dan perilaku Aparatur Sipil negara untuk melaksanakan tugas sesuai pelatihan/keterampilan yang telah dimiliki. Pelatihan yang dilaksanakan akan menambah wawasan yang akan merubah pola pikir dalam menyesuaikan diri dengan perubahan jangka pendek dan jangka panjang sehingga bisa menangani masalah atau tugas yang tidak terduga secara efektif.

Indikator Nilai IP ASN tercapai selain pengembangan kompetensi sebagai berikut :

1. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN BBKIPM Makassar, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 = -
 - b. Pendidikan S-2 :
 - S2 Keahlian : 7 orang :
 1. Ir Habrin Yake, M.M



2. Andi Rahmaniar Dj, ST.,M.Si
3. Kamaruddin, S.P, M.S
4. Kamdani, S.Pi, M.M
5. Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P
6. Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi., M.Sc
7. Fatima Tayang, S.St.Pi, MM

- S2 Pelaksana : 1 orang

1. Rahma Tenri Aben

c. Pendidikan S-1 /D-IV :

– S-1 /D-IV Keahlian : 12 orang

1. Waode Suharni, S.Pi
2. Bakhtiar, S.Pi
3. Moh. Fahri, S. Pi
4. Wara Zakaria Sapan, A.PI
5. Muhammad Irfan Rais, S.Pi
6. Patmawati M, S.St.Pi
7. Erlina Kadang, S.Kom
8. Junaedi, S.E
9. Muzakkir, S.Pi
10. Taufiq, S.PKP
11. Anugra Ekayani A. Lantara Pawiseang, S.St.Pi
12. Suprianto, A.Md.Pi., S.Pi

– S-1 /D-IV Pengawas : 1 orang

1. Karwit, S.Pi

- S-1 /D-IV Keterampilan : 1 orang



1. Arfiandi

– S-1 /D-IV Pelaksana : 5 orang :

1. Darmawan, SP
2. Hapi, SAP
3. Muhammad Arman, SAP
4. Arniyanti
5. Oktovianus, SAP

d. Pendidikan D-III ;

– D-III Keterampilan : 4 orang

1. Idawati Barung
2. Rosdiana
3. Zulyana Arlina
4. Ardiana

- D-III Pelaksana : 1 orang

1. Jumhana

e. SLTA :

– SLTA Keterampilan : 2 orang

1. Erwin Wijaya
2. Andi Muhammad Haedar

– SLTA Pelaksana : 3 orang

1. Halim
2. Niza Mahaputri Zainal

3. Irma Syam

2. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

Predikat Kinerja yang diperoleh ASN BBKIPM Makassar pada tahun 2024 adalah BAIK dan SANGAT BAIK

3. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir Aparatur Sipil Negara Lingkup Balai Besar KIPM Makassar tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sehingga semua ASN mendapatkan nilai 5

Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Sebagai perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Balai Besar KIPM Jakarta I dengan nilai IP ASN 84.89 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 87.97 masih lebih tinggi dengan selisih 3.08

BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	16	2312	9248%	3177	7942%	25	8333%	5	100%	84.89	TINGGI
----------------------------	----	------	-------	------	-------	----	-------	---	------	-------	--------

2. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Pesisir dan Pulau Pulau kecil dengan nilai IP ASN 83.63 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 87.97 masih lebih tinggi dengan selisih 4.34

DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	44	2352	9408%	2899	7232%	25.91	8637%	5	100%	83.66	TINGGI
---	----	------	-------	------	-------	-------	-------	---	------	-------	--------

Sumber data : <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/1296> pertanggal 4 Januari 2026

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN

Balai Besar KIPM Makassar, mempunyai SDM Aparatur Sipil Negara sebanyak 37 Pegawai yang sebelumnya 34 pegawai, pegawai mutasi masuk sebanyak 3 orang yang UPT sebelumnya Adalah Stasiun KIPM Palu, Stasiun KIPM Ternate dan Stasiun KIPM Kendari

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Subbagian Umum	1
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2

5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
7.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	3
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2
10.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
11.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1
12.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	1
13.	Pelaksana	10
	Total	37

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2024 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 77.285.000
- Anggaran Setelah revisi sebesar Rp. 73.833.000
- Realisasi Rp. 73.434.365 (99.46%)

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2025 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 18.064.000
- Anggaran setelah blokir Rp. 0

Triwulan IV

- Anggaran Setelah Blokir sebesar Rp.8.600.000

- Realisasi Rp. 8.542.000 (99.32%)

Pada indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar KIPM Makassar memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita, dengan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara akan meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan publik.

Kompetensi ASN Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar bermanfaat bagi kemajuan organisasi dan individu, IP ASN merupakan area pengembangan diri dalam Upaya peningkatan profesionalitas sebagai ASN dan IP ASN sebagai kontrol sosial agar ASN bertindak professional dalam kaitan pelayanan publik.

Akar masalah

- Potensi permasalahan dapat timbul dengan adanya pengurangan alokasi anggaran yang dapat berdampak pada peningkatan kompetensi pegawai khususnya untuk pelatihan yang membutuhkan pertemuan klasikal dan praktek langsung.
- Kesadaran ASN dalam mengentry data sertifikat pada aplikasi MyASN tepat waktu perlu ditingkatkan

Rekomendasi rencana aksi

- Aparatur Sipil Negara mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi secara luring dan daring
- Pelatihan dengan pemanfaatan Sumberdaya internal

Tindaklanjutan Rekomendasi sebelumnya

- Aparatur Sipil Negara telah mengikuti Pelatihan secara daring dengan dibuktikan nilai IP ASN yang meningkat.



- Penyampaian update sertifikat pada aplikasi MyASN di Whatsapp group

IP ASN 2025										
Tahun 2025										
Fase 1										
Fase 2										
Fase 3										
Fase 4										
Fase 5										
Fase 6										
Fase 7										
Fase 8										
Fase 9										
Fase 10										
Fase 11										
Fase 12										
Fase 13										
Fase 14										
Fase 15										
Fase 16										
Fase 17										
Fase 18										
Fase 19										
Fase 20										
Fase 21										
Fase 22										
Fase 23										
Fase 24										
Fase 25										
Fase 26										
Fase 27										
Fase 28										
Fase 29										
Fase 30										
Fase 31										
Fase 32										
Fase 33										
Fase 34										
Fase 35										
Fase 36										
Fase 37										
Fase 38										
Fase 39										
Fase 40										
Fase 41										
Fase 42										
Fase 43										
Fase 44										
Fase 45										
Fase 46										
Fase 47										
Fase 48										
Fase 49										
Fase 50										
Fase 51										
Fase 52										
Fase 53										
Fase 54										
Fase 55										
Fase 56										
Fase 57										
Fase 58										
Fase 59										
Fase 60										
Fase 61										
Fase 62										
Fase 63										
Fase 64										
Fase 65										
Fase 66										
Fase 67										
Fase 68										
Fase 69										
Fase 70										
Fase 71										
Fase 72										
Fase 73										
Fase 74										
Fase 75										
Fase 76										
Fase 77										
Fase 78										
Fase 79										
Fase 80										
Fase 81										
Fase 82										
Fase 83										
Fase 84										
Fase 85										
Fase 86										
Fase 87										
Fase 88										
Fase 89										
Fase 90										
Fase 91										
Fase 92										
Fase 93										
Fase 94										
Fase 95										
Fase 96										
Fase 97										
Fase 98										
Fase 99										
Fase 100										

IK 12. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	12. Nilai Penilaian Mandiri SAOP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar	91,93	98	95,3	87,13	83,8	86	86	90	104,65	104,65	-	-

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %

Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa :

Renstra 2025-2029, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi.

Yang sudah dilaksanakan sampai triwulan IV tahun 2025 yaitu : penyusunan RKAKL dan Rencana Aksi Renja dan Renstra mencapai 30 %.

2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 %

Pengukuran Kinerja ini telah terselesaikan Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa :

Penyusunan Manual IKU tahun 2025 yang telah diselesaikan pada triwulan I terealisasi mencapai 30%

3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %

Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2025, dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Kinerja Triwulan I , Triwulan II, Triwulan III, triwulan IV dan Tahunan.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah disampaikan Laporan Kinerja Triwulan I , II, III, dan IV sehingga realisasi tercapai 15 %

4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai Besar KIPM Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai Besar KIPM Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja . Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerjaku yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan evaluasi kinerja secara internal dan eksternal realisasi tercapai 25 % .

Bobot realisasi capaian :

= Parameter 1 (30 %) + parameter 2 (30 %) + parameter 3 (15 %) + parameter 4 (25 %)
= 100 %.

$$\begin{aligned}\text{Realisasi capaian} &= \frac{\text{Bobot realisasi capaian}}{\text{Target}} \times 100 \% \\ &= \frac{100}{86} \times 100 \\ &= 116,27 \%\end{aligned}$$

Namun dilihat dari Aplikasi Kinerjaku dan Surat Kepala Badan BPPMHKP Nomor Surat 1/BPPMHKP.1/RC.610/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA. 2025 UPT lingkup BPPMHKP, terdapat perbedaan hasil penilaian yaitu 90 (A), dengan rincian sebagai berikut :

No	Parameter	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	27
2.	Pengukuran Kinerja	30	27
3	Pelaporan Kinerja	15	13,5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,5
Jumlah			90

Dengan demikian untuk kinerja AKIP diperlukan upaya peningkatan kinerja pada semua parameter kinerja.

Adapun pencapaian indikator ini Triwulan IV tahun 2025 yaitu 90 (A) ini melebihi dari target 86 sehingga capaian kinerja ini 104,65 %. Jika dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2025 yaitu 93,31 %, mengalami peningkatan sebesar 11.34 %. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan IV tahun 2024 yaitu 102.19 % maka tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2.46 %.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan IV adalah :

1. Telah melakukan penginputan data dukung rencana aksi triwulan III pada aplikasi kinerja berupa pagu anggaran yang mendukung setiap indikator, realisasi anggaran, masalah, rekomendasi dan tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, penginputan data dukung tersebut dilakukan setiap triwulan.
2. Tanggal 13 Oktober 2025 finalisasi Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025-2029.
3. Tanggal 28 November 2025 telah dilakukan penilaian kinerja AKIP dari Sekretariat Badan BPPMHKP dan telah dilakukan perbaikan LKE pada Aplikasi Kinerja untuk Penilaian Mandiri SAKIP.

Penilaian Mandiri SAKIP mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu “ Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi

dan narkoba”. Hal ini disebabkan karena dengan adanya penilaian mandiri sapip dapat meningkatkan output dari program kegiatan yang terdapat dalam Tugas dan Fungsi Balai Besar KIPM Makassar.

IKU ini mendukung terciptanya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu “Akuntabel” ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, hal ini disebabkan karena setiap pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi dipertanggungjawabkan secara tertulis dan disertai dengan dokumentasi kegiatan yang detail dan lengkap.

Untuk pemanfaatan melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 42.795.000 yang mengalami blokir sebanyak 100 %. jika dibandingkan pemanfaatan anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dengan pagu Rp 38.668.000,- teralisasi anggaran sebesar sebesar Rp 38. 655.199 atau 99.96 %

Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)

Akar Masalah

Potensi masalah dapat terjadi jika monitoring terhadap capaian kegiatan tidak berjalan optimal

Rekomendasi rencana aksi

Melakukan monitoring output kegiatan dan realisasi anggaran

Tindakan lanjut Rekoemendasi sebelumnya

Briefing personil dukungan manajerial terkait percepatan penyerapan anggaran tanggal 22 Oktober 2025;

IK 13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar	82	65	100	100	100	85	85	100	117,65	117,65	-	-

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat

mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makassar berdasarkan LHP dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh unit kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan pada unit kerja}} \times 100 \%$$

Pada triwulan IV tahun 2025 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga realisasi indikator kinerja ini mencapai 100. Jika dibandingkan dengan pencapaian nilai Indikator Kinerja pada triwulan yang sama pada Tahun 2024 sama-sama mencapai nilai 100. Demikian pula jika dibandingkan dengan periode sebelumnya triwulan III tahun 2025 realisasi indikator kinerja ini mencapai 100.

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan anggaran dari DIPA Tahun 2025 pada mata anggaran 3987.EBA.994.002.0A, 3987.EBA.994.002.0G dan 3987.EBA.994.002.0I, dengan pagu anggaran semula Rp. 1.850.843.000,- setelah adanya revisi anggaran menjadi Rp.2.064.505.000,- yang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.2.060.401.068,- atau 99,80% yang digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, belanja honor output kegiatan, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

Jika dibandingkan alokasi anggaran pada triwulan IV tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 822.011.000,- maka terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 60,18%. Demikian pula dengan besaran persentase penggunaan anggaran jika dibandingkan dengan periode yang sama triwulan IV tahun 2024 yang hanya mencapai 86,30%.

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang.

Indikator kinerja ini jika tercapai maka akan mendukung keberhasilan program prioritas KKP maupun Program Prioritas Nasional Asta Cita. Indikator kinerja ini secara spesifik mendukung Program Prioritas Nasional Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”.

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja Ber-AHLAK di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu “Akuntabel” dimana ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Tercapainya target kinerja ini memncerminkan bahwa organisasi telah melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan dengan akuntabel dan tepat waktu.

Aspek pemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan IKU ini yaitu memberikan informasi mengenai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, sehingga dapat mengambil tindakan dan Keputusan secara cepat, tepat dan akurat.

Akar Masalah

Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen.

Rekoemndasi rencana aksi

Operator SIDAK melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Itjen secara berkala.

Tindaklanjut Rekomendasi sebelumnya

Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Itjen pada aplikasi SIDAK periode Triwulan IV Tahun 2025.



IK 14. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	14 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	-	-	79,56	78,26	84,34	76	76	100	131,58	131,58	-	-

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Dengan adanya kebijakan pemanfaatan anggaran yang posisi Blokir anggaran pengadaan barang/ jasa (*lock pagu*) pada triwulan IV sehingga pagu anggaran Rencana Umum Pengadaan (RUP) mengalami perubahan atau peningkatan yang semula pada triwulan III sebesar Rp. 2.892.982.000,- menjadi Rp. 3.241.329.000,-.

Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%) menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SiRUP

$$= \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 3.242.871.000}}{\text{Rp. 3.242.871.000}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU pada triwulan IV adalah sebesar 100 % dari target 76 % atau capaiannya sebesar 131,57 %. Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan III sebesar 131,57 %. Jadi untuk capaian realisasi Rencana Umum Pengadaan pada triwulan III dan triwulan IV yang nilai pagu paket yang diinput dengan nilai yang diumumkan adalah sama.

Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai Besar KIPM Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diupload di aplikasi SIRUP. Pada triwulan IV telah dilakukan revisi kegiatan dan anggaran sehingga Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/ Jasa perlu menyesuaikan, diinput serta diumumkan ke dalam portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Adapun paket RUP yang telah diupload dan diumumkan sebesar Rp. 3.242.871. 000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Paket Penyedia sebanyak 7 kegiatan Manajemen Mutu dengan jumlah anggaran Rp. 164.750.000,-
- b. Paket Penyedia sebanyak 10 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 16.368.000,-
- c. Paket Penyedia sebanyak 31 kegiatan Dukungan Manajemen Internal dengan jumlah anggaran Rp. 2.992.933.000,-
- d. Paket E-Purchasing sebanyak 1 kegiatan Dukungan Manajemen Internal dengan jumlah anggaran Rp. 68.820.000,-

Pada tahun anggaran 2025 nilai paket pengadaan barang dan jasa Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah mengalami perubahan (revisi) menjadi Rp. 3.241.329.000,-.. Keadaan dan posisi realisasi RUP sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Kode	Nama Program	Pagu Program (Rp.)	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu terumumkan (Rp.)	Selish (Rp.)	Persentase
1	EC	Program dan Nilai Tambah Daya Saing Industri	403,122,000	195,558,000	181,118,000	14,440,000	92.62 %
2	WA	Program Dukungan Manajemen	3,213,500,000	3,061,753,000	3,061,753,000	0	100 %

Nilai Pagu Pengadaan Rp. 195.558.000,- yang selisih dengan Pagu terumumkan sebesar Rp. 14.440.000,- dalam posisi Blokir Anggaran (*Look Pagu*) dan tidak bisa diumumkan di RUP.



No	Kode	Nama Program	Pagu Program	Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selish	Persentase
1	EC	Program dan Nilai Tambah Daya Saing Industri	403,122,000	195,558,000	181,118,000	14,440,000	92.62%
2	WA	Program Dukungan Manajemen	3,213,500,000	3,061,753,000	3,061,753,000	0	100.00%

Adapun periode pelaporan untuk IKU ini adalah tahunan sehingga capaian triwulan tidak bisa diukur hanya menggambarkan progres kegiatan PBJ yang diperoleh setiap triwulan. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Rencana Umum Pengadaan (RUP) Balai Besar KIPM Makassar yang telah diinput ke dalam aplikasi SIRUP LKPP.go.id yang dilaksanakan oleh tim Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, BPPMHP persentase capaian IKU ini adalah 100 %

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan IV sebagai berikut :

- Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP pada tanggal 24 s.d 25 November 2025;
- Mengikuti Desiminasi Pencatatan RUP untuk Tahun Anggaran 2026 Lingkup KKP

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2025 sebanyak 7 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).

Pada triwula IV telah dilakukan pergeseran/ revisi anggaran sehingga Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp. 110.652.000,- yang terdiri dari :

1. 3987.EBA.994, 002.OE Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja = Rp. 37,152,000,-
2. 3987.EBA.994, 002.OF Kesehatan dan Daya Tahan Tubuh = Rp. 73.500.000,-

Pada triwulan IV 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. 110.650.000,- dengan persentase 99,99 %.

Indikator Kinerja Utama ini tidak bisa dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2024 karena IKU ini merupakan IKU baru di Tahun Anggaran 2025.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis Web (*Web based*) mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini disebabkan karena dengan adanya aplikasi SIRUP maka transparansi pada pengelolaan

sistem pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, masyarakat dapat secara langsung mengakses pengadaan barang dan jasa.

Manfaatnya sebagai berikut :

1. SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
2. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.
3. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.
4. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/sirup;
5. Untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi Balai Besar KIPM Makassar dalam pengadaan barang/ jasa

Akar Masalah

Potensi masalah : Update perubahan kegiatan dan anggaran (revisi) belanja pengadaan barang dan jasa tidak tersampaikan ke bagian admin pengelola aplikasi SIRUP.

Rekoemndasi rencana aksi

Setiap perubahan kegiatan dan anggaran pengadaan (revisi) disampaikan atau dikomunikasikan dengan pengelola aplikasi SIRUP

Tindaklanjut Rekomendasi sebelumnya

Operator telah menginput data kegiatan dan anggaran dalam portal SIRUP.go.id dengan cermat dan lebih teliti sehingga nilai paket pengadaan yang diinput sesuai dengan nilai paket yang terumumkan

IK 15. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	15 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar						75	75	75,51	100,68	100,68		-

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, perlu melakukan pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja di instansi pemerintah;

Balai Besar KIPM Makassar telah menyandang predikat WBK sejak tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2018. Untuk mempertahankan predikat tersebut, maka Balai Besar KIPM Makassar

harus konsisten dalam penerapannya khususnya penanaman nilai-nilai integritas kepada seluruh jajaran pegawai Balai Besar KIPM Makassar beserta *stakeholder* yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

Sesuai surat Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.360/BPPMHKP.1/OT.720/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal Persiapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan PPMHKP Tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar bersama 4 UPT lainnya ditetapkan sebagai unit kerja yang akan dilakukan penilaian implementasi WBK dan WBBM oleh TPI (Tim Penilai Internal) KKP Tahun 2025-2026;

Target indikator kinerja ini bersifat tahunan, sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah diperoleh hasil penilaian dari BPPMHKP. Berdasarkan penilaian dari tim penilai internal BPPMHKP diperoleh nilai total 75,51 atau 100,68 % dari target, yang terdiri dari komponen pengungkit 37,16 dan komponen hasil 38,03.

Kegiatan yang Dilaksanakan :

Pada triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai wujud implementasi zona integritas WBK pada Balai Besar KIPM Makassar, diantaranya adalah :

- (a) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa penataan ruang pelayanan dan ruang tunggu, penataan papan informasi digital, dan pemasangan poster pengelolaan pengaduan;
- (b) Melaksanakan apel pagi setiap hari Senin yang dipimpin oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar atau pejabat lain yang ditunjuk. Pada apel pagi tersebut disampaikan himbauan penerapan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai, penerapan nilai-nilai kebangsaan dan internalisasi ASN Ber-AKHLAK;

- (c) Guna meningkatkan kualitas pelayanan khususnya untuk pelanggan berkebutuhan khusus, pada tanggal 8 Oktober 2025 dilakukan sosialisasi “Etika Berinteraksi untuk Penyandang Disabilitas” dengan nara sumber dari Balla Inklusi Makassar yang diikuti oleh seluruh pegawai. Pada sosialisasi tersebut dipaparkan materi dan dipraktekkan teknik melayani pelanggan berkebutuhan khusus dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab untuk pendalaman terhadap materi yang disampaikan. Pada akhir sesi dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar KIPM Makassar dengan Balla Inklusi Makassar;
- (d) Pada bulan Oktober 2025 beberapa pegawai yang terpilih telah melakukan pengisian SPI (Survei Penilaian Integritas) yang dilaksanakan oleh KPK. Tujuan SPI tersebut adalah untuk memetakan risiko korupsi, mengukur tingkat integritas di instansi publik (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah), dan mendorong perbaikan sistem pencegahan korupsi agar pelayanan publik lebih bersih, transparan, dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi publik (pegawai, pengguna layanan, dan ahli);
- (e) Pada tanggal 14 Oktober 2025 telah dilakukan briefing bagi petugas pelayanan oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar yang diikuti oleh seluruh pegawai yang bertugas dalam pelayanan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam briefing tersebut disampaikan langkah- langkah strategis yang harus dilaksanakan petugas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima serta menghindari adanya komplain dari pelanggan;
- (f) Pada tanggal 22 Oktober 2025 dilaksanakan briefing pegawai lingkup Dukungan Manajemen oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar. Tujuan dilaksanakannya briefing adalah untuk menyelaraskan pemahaman, memberikan instruksi atau arahan, meningkatkan motivasi kerja pegawai serta memastikan bahwa koordinasi di tingkat tim dukungan manajemen terjalin dengan baik guna mendukung kinerja organisasi;



- (g) Pada tanggal 3 November 2025 dilaksanakan internalisasi oleh tim agen perubahan dengan tema “Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja”. Pada internalisasi tersebut disampaikan pola pikir yang merupakan pergeseran cara pandang, sikap mental, dan keyakinan dasar seseorang atau organisasi untuk menjadi lebih konstruktif, adaptif, dan profesional, sementara perubahan budaya kerja diartikan sebagai transformasi nilai, kebiasaan, perilaku, dan praktik kerja kolektif dalam organisasi agar selaras dengan tujuan baru, yang keduanya sering kali dilakukan bersamaan untuk meningkatkan integritas, kinerja, dan pelayanan;
- (h) Pada tanggal 26 November 2025 dilakukan sosialisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPPMHKP dengan nara sumber Inspektorat IV Inspektorat Jenderal KKP yang diikuti peserta dari UPT lingkup BPPMHKP. Balai Besar KIPKM Makassar mengikuti kegiatan tersebut secara daring. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan seluruh pegawai lingkup BPPMHKP dapat memahami dan menerapkan kebijakan pengelolaan konflik dan pengendalian gratifikasi sesuai regulasi yang berlaku;
- (i) Pada bulan Desember 2025, Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dengan sasaran 24 orang responden para pengguna layanan. Survey tersebut bertujuan untuk memetakan persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan publik dan penerapan WBK pada Balai Besar KIPM Makassar. Hasil yang dicapai adalah (1) Nilai : 95,55; (2) Mutu Pelayanan : A; dan (3) Kinerja Unit Layanan : Sangat Setuju;
- (j) Pada tanggal 4 Desember 2025 Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan dengan tujuan untuk menyusun standar pelayanan serta momentum untuk memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan mutu dan keamanan hasil perikanan. Peserta dalam forum tersebut berasal dari instansi terkait yang secara fungsional



mempunyai hubungan kerja, unsur Pemerintah Daerah, akademisi, asosiasi usaha perikanan, LSM dan media massa;

- (k) Pada tanggal 22 Desember 2025 bertepatan dengan Hari Ibu, dilakukan sosialisasi oleh tim agen perubahan dengan tema “Disiplin dan Pengembangan Diri”. Pada sosialisasi disampaikan betapa pentingnya disiplin dan pengembangan diri guna menunjang kinerja organisasi. Tujuan disiplin dan pengembangan diri adalah untuk membangun kehidupan yang teratur, produktif, dan memuaskan dengan menciptakan kebiasaan baik, meningkatkan fokus, serta memperkuat karakter untuk mencapai tujuan hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, memperbaiki hubungan, dan membangun ketahanan diri menghadapi tantangan. Keduanya saling melengkapi, di mana disiplin menjadi fondasi untuk terus berkembang secara pribadi dan profesional, sementara pengembangan diri memberikan alat untuk memperkuat disiplin tersebut menuju kesuksesan;

Perhitungan nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebagai berikut :

- (1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- (2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- (3) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,50 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,00;
- (4) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15,00;
- (5) Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP;

Sumberdaya manusia yang terlibat dalam penerapan kinerja ini adalah seluruh pegawai lingkup Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 60 orang, yang terdiri dari ASN (PNS 37 orang, PPPK 12 orang, PPPK Paruh Waktu 6 orang) dan non ASN 5 orang;

Alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja ini pada tahun 2025 semula sebesar Rp. 12.489.000,-, namun setelah adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah, anggarannya dialihkan menjadi Rp. 0,-. Anggaran untuk operasional zona integritas WBK menyatu dengan anggaran keperluan perkantoran.

Penerapan zona integritas WBK merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini berarti Asta Cita ke 7 fokus pada peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang adil dan upaya berkelanjutan dalam memberantasan korupsi dan pemberantasan narkoba. Asta Cita ke 7 juga sejalan dengan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan makanan dan susu gratis di sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan produktivitas lahan pertanian;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir, Balai Besar KIPM Makassar secara konsisten telah menerapkan zona integritas WBK. Hal ini dapat mendukung terwujudnya program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan ke 3 “Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, serta ke 4 “Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”.

Aspek Pemanfaatan :

Penerapan nilai-nilai integritas menuju WBK pada suatu unit kerja memiliki berbagai manfaat, yakni :

- (a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
- (b) Mencegah terjadinya korupsi;
- (c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
- (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- (e) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
- (f) Meningkatkan reputasi instansi pemerintah;
- (g) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024;

Target indikator kinerja ini bersifat tahunan. Berdasarkan penilaian dari tim penilai internal BPPMHKP diperoleh nilai total 75,51 atau 100,68% dari target, yang terdiri dari komponen pengungkit 37,48 dan komponen hasil 38,03. Rekapitulasi hasil penilaian tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

No.	Unsur	Bobot Nilai	Perolehan Nilai	%
1	2	3	4	5
A.	Pengungkit :	60,00	37,48	
I.	Pemenuhan :	30,00	27,61	92,02
1	Manajemen Perubahan	4,00	3,55	88,63
2	Penataan Tatalaksana	3,50	2,92	83,33
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,36	87,16
4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	4,57	91,38
5	Penguatan Pengawasan	7,50	7,22	96,25
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00	100,00
II.	Reform :	30,00	9,88	32,92
1	Manajemen Perubahan	4,00	3,17	79,17
2	Penataan Tatalaksana	3,50	2,33	66,62
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	3,50	70,00

4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	5,00	100,00
5	Penguatan Pengawasan	7,50	6,88	91,67
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00	100,00
	Total Pengungkit		37,48	62,47
B.	Hasil	40,00	38,03	
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,50	22,50	100,00
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survey Eksternal; Indeks Persepsi Anti Korupsi/IPAK)	17,50	17,50	100,00
b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	5,00	100,00
2	Pelayanan Publik yang Prima	17,50	15,53	88,75
a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50	15,53	88,75
	Total Hasil		38,03	95,08
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi		75,51	

Akar masalah

Potensi kelambatan pemenuhan dokumentasi bukti penerapan zona integritas WBK oleh masing-masing penanggung jawab unsur dikarenakan penanggung jawab unsur lambat mengolah data penerapan WBK yang menjadi tanggung jawabnya;

Rekomendasi rencana aksi

- Ketua tim WBK mengingatkan penyampaian dokumen implementasi WBK secara berkala kepada penanggung jawab unsur;
- Tim Sekretariat memastikan pemenuhan fasilitas pendukung penerapan WBK;

Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

- Nota Dinas Ketua Tim WBK kepada penanggung jawab unsur WBK tentang penyampaian dokumen implementasi WBK;
- Diakukan pemenuhan fasilitas pendukung penerapan WBK (spanduk, banner, dan penataan ruang pelayanan);



IK 16. Indeks kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	16 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar	-	-	89,8	91,12	3,77	3,36	3,36	3,93	116,96	116,96	-	-

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14> .

Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SURvey kepuasSAN masyarakat) melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.

Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM Makassar survey dilakukan terhadap 11 (Sebelas) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu:

- Laporan hasil uji mutu produk perikanan
- Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)
- Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
- Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)
- Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)
- Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:



Formula Isaac & Michael

$S = X^2 NP (1-P) / d^2 (N-1) + X^2 P (1-P)$

X^2 = Nilai chi square tabel = 3,841
dimana df = 1 dan $\alpha = 5\% = 0.05$
P = Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka P = 0.5)
N = Jumlah Populasi
d = tingkat toleransi kesalahan (0.05)

$$S = \frac{3.841 \times 48 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05^2 \times 47) + (3.841 \times 0.5 \times 0.5)}$$

$$S = \frac{46.092}{1.106} = 41.766 \approx 42$$

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
15	15	235	145	1335	207
16	16	240	144	1340	208
17	17	245	143	1345	209
18	18	250	142	1350	210
19	19	255	141	1355	211
20	20	260	140	1360	212
21	21	265	139	1365	213
22	22	270	138	1370	214
23	23	275	137	1375	215
24	24	280	136	1380	216
25	25	285	135	1385	217
26	26	290	134	1390	218
27	27	295	133	1395	219
28	28	300	132	1400	220
29	29	305	131	1405	221
30	30	310	130	1410	222
31	31	315	129	1415	223
32	32	320	128	1420	224
33	33	325	127	1425	225
34	34	330	126	1430	226
35	35	335	125	1435	227
36	36	340	124	1440	228
37	37	345	123	1445	229
38	38	350	122	1450	230
39	39	355	121	1455	231
40	40	360	120	1460	232
41	41	365	119	1465	233
42	42	370	118	1470	234
43	43	375	117	1475	235
44	44	380	116	1480	236
45	45	385	115	1485	237
46	46	390	114	1490	238
47	47	395	113	1495	239
48	48	400	112	1500	240
49	49	405	111	1505	241
50	50	410	110	1510	242
51	51	415	109	1515	243
52	52	420	108	1520	244
53	53	425	107	1525	245
54	54	430	106	1530	246
55	55	435	105	1535	247
56	56	440	104	1540	248
57	57	445	103	1545	249
58	58	450	102	1550	250
59	59	455	101	1555	251
60	60	460	100	1560	252
61	61	465	99	1565	253
62	62	470	98	1570	254
63	63	475	97	1575	255
64	64	480	96	1580	256
65	65	485	95	1585	257
66	66	490	94	1590	258
67	67	495	93	1595	259
68	68	500	92	1600	260
69	69	505	91	1605	261
70	70	510	90	1610	262
71	71	515	89	1615	263
72	72	520	88	1620	264
73	73	525	87	1625	265
74	74	530	86	1630	266
75	75	535	85	1635	267
76	76	540	84	1640	268
77	77	545	83	1645	269
78	78	550	82	1650	270
79	79	555	81	1655	271
80	80	560	80	1660	272
81	81	565	79	1665	273
82	82	570	78	1670	274
83	83	575	77	1675	275
84	84	580	76	1680	276
85	85	585	75	1685	277
86	86	590	74	1690	278
87	87	595	73	1695	279
88	88	600	72	1700	280
89	89	605	71	1705	281
90	90	610	70	1710	282
91	91	615	69	1715	283
92	92	620	68	1720	284
93	93	625	67	1725	285
94	94	630	66	1730	286
95	95	635	65	1735	287
96	96	640	64	1740	288
97	97	645	63	1745	289
98	98	650	62	1750	290
99	99	655	61	1755	291
100	100	660	60	1760	292
101	101	665	59	1765	293
102	102	670	58	1770	294
103	103	675	57	1775	295
104	104	680	56	1780	296
105	105	685	55	1785	297
106	106	690	54	1790	298
107	107	695	53	1795	299
108	108	700	52	1800	300
109	109	705	51	1805	301
110	110	710	50	1810	302
111	111	715	49	1815	303
112	112	720	48	1820	304
113	113	725	47	1825	305
114	114	730	46	1830	306
115	115	735	45	1835	307
116	116	740	44	1840	308
117	117	745	43	1845	309
118	118	750	42	1850	310
119	119	755	41	1855	311
120	120	760	40	1860	312
121	121	765	39	1865	313
122	122	770	38	1870	314
123	123	775	37	1875	315
124	124	780	36	1880	316
125	125	785	35	1885	317
126	126	790	34	1890	318
127	127	795	33	1895	319
128	128	800	32	1900	320
129	129	805	31	1905	321
130	130	810	30	1910	322
131	131	815	29	1915	323
132	132	820	28	1920	324
133	133	825	27	1925	325
134	134	830	26	1930	326
135	135	835	25	1935	327
136	136	840	24	1940	328
137	137	845	23	1945	329
138	138	850	22	1950	330
139	139	855	21	1955	331
140	140	860	20	1960	332
141	141	865	19	1965	333
142	142	870	18	1970	334
143	143	875	17	1975	335
144	144	880	16	1980	336
145	145	885	15	1985	337
146	146	890	14	1990	338
147	147	895	13	1995	339
148	148	900	12	2000	340
149	149	905	11	2005	341
150	150	910	10	2010	342
151	151	915	9	2015	343
152	152	920	8	2020	344
153	153	925	7	2025	345
154	154	930	6	2030	346
155	155	935	5	2035	347
156	156	940	4	2040	348
157	157	945	3	2045	349
158	158	950	2	2050	350
159	159	955	1	2055	351
160	160	960	0	2060	352

Jumlah layanan yang dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 1.063 kali, maka berdasarkan tabel diatas jumlah populasi sebanyak 1.100 minimal sampel responden yang diambil adalah sebanyak 285 responden. Hasil survey kepuasan Masyarakat diketahui jumlah responden sebesar 447, hal ini sudah memenuhi jumlah minimal responden sesuai dengan formula Isaac dan Michael tersebut.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111.$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

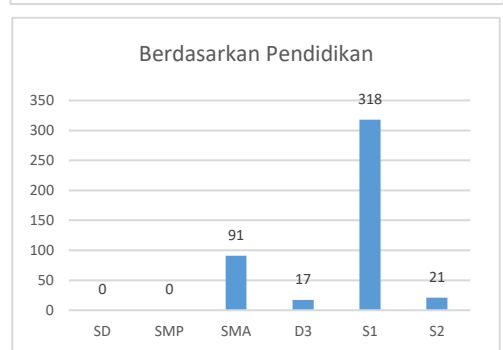
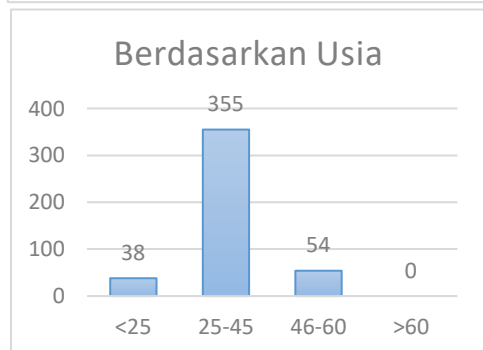
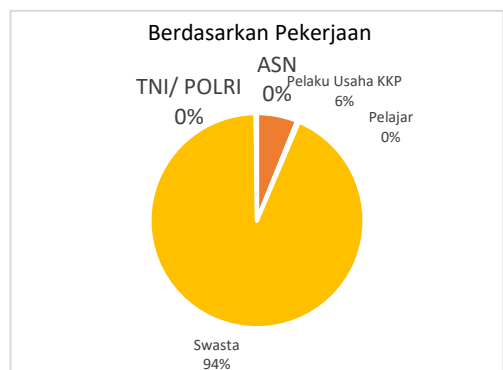
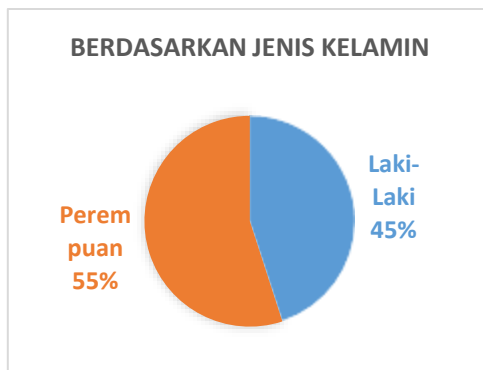
Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar KIPM Makassar.

Pada triwulan IV Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan survey terhadap 447 responden, dengan nilai Indeks Kepuasan IKM 3,93 atau sebesar **98,40** setelah dikonversi (**Sangat Baik**). Nilai IKM tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 3,36 atau capaian 111,82%. Apabila data Hasil IKM Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan dengan TW IV Tahun 2025, maka nilai unsur pelayanan dapat dilihat sebagai berikut:



NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan		Perubahan
		Triwulan III - 2025	Triwulan IV - 2025	
1	Kesesuaian persyaratan	3,885	3,944	↑
2	Kemudahan prosedur	3,874	3,942	↑
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3,871	3,933	↑
4	Kesesuaian biaya	3,865	3,933	↑
5	Kesesuaian produk	3,877	3,937	↑
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3,873	3,931	↑
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3,871	3,933	↑
8	Layanan konsultasi dan pengaduan	3,879	3,940	↑
9	Kualitas isi/sarana	3,873	3,933	↑
	Nilai IKM	96,85	98,40	
	Indeks	3,87	3,93	

Data Rincian Responden survey IKM Triwulan IV Tahun 2025 yaitu:



Jika dilihat nilai perunsur, nilai unsur yang paling rendah adalah unsur **kecepatan respon aplikasi**, unsur **Kesesuaian jangka waktu penyelesaian**, serta unsur **Kemudahan dalam penggunaan fitur** dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan unsur kesesuaian biaya, unsur Kesesuaian jangka waktu penyelesaian, serta unsur Kemudahan dalam penggunaan fitur walaupun nilai unsur tersebut sudah berada dalam kategori Sangat Baik.

Dalam pelayanan sertifikasi ekspor, Balai Besar KIPM Makassar menggunakan Aplikasi SIAP Mutu (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu) dalam rangka penerbitan SMKHP digunakan pertanggal 1 Maret 2025 secara serentak semua UPT BPPMHKP yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Namun dalam pelaksanaannya Aplikasi SIAP Mutu masih dalam tahap penyempurnaan dan masih ada fitur yang dibutuhkan bagi petugas pelayanan dan pengguna layanan.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan IV pada tahun 2024, maka nilai IKM pada triwulan IV 2025 mengalami peningkatan dari **3,77** menjadi **3,93**. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Balai Besar KIPM Makassar memperoleh respon positif dari masyarakat.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan III tahun 2025, maka nilai IKM pada triwulan IV 2025 mengalami peningkatan dari 3,87 menjadi 3,93.

Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Triwulan III Tahun 2025 ke Triwulan IV 2025 sejalan dengan layanan konsultasi petugas pelayanan pasca transisi penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Petugas pelayanan memberikan informasi dan solusi terhadap kebingungan pelaku usaha tentang penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan, serta petugas lebih komunikatif meminta kritik, saran dan masukan terhadap peningkatan pelayanan publik dari Balai Besar KIPM Makassar. Sehingga nilai IKM dapat ditingkatkan dari unsur Layanan konsultasi dan Pengaduan pada Triwulan IV Tahun 2025. Serta dengan penghargaan yang diterima oleh Balai Besar KIPM Makassar di Tahun 2025 pada pelayanan publik yang diberikan. Pada tanggal 2 Desember 2025, Balai Besar KIPM Makassar menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat “INFORMATIF” yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Bapak Sakti Wahyu Trenggono Nomor B.1272/MEN-KP/XII/2025.

Balai Besar KIPM Makassar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan:

- Tanggal 8 Oktober 2025, Sosialisasi Pelayanan publik ramah kelompok rentan. Sosialisasi dilaksanakan secara interaktif dengan menghadirkan narasumber dari Balla’ Inklusi Sulawesi Selatan yang menjelaskan Etika Pelayanan pada Kelompok Rentan, Prinsip Kesetaraan dan Non-Diskriminasi serta Aksesibilitas untuk kemudahan informasi dan prosedur;
- 07 Oktober 2025 Customer Service kedatangan tamu dari Unit Pengolahan Ikan PT. Celebes Ocean Fisheries untuk konsultasi mengenai aplikasi SIAP MUTU.
- 14 Oktober 2025 telah dilakukan briefing bagi petugas pelayanan oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar yang diikuti oleh seluruh pegawai yang bertugas dalam pelayanan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam briefing tersebut disampaikan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan petugas pelayanan

untuk mewujudkan pelayanan prima serta menghindari adanya komplain dari pelanggan;

- 4 Desember 2025 Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan dengan tujuan untuk menyusun standar pelayanan serta momentum untuk memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan mutu dan keamanan hasil perikanan. Peserta dalam forum tersebut berasal dari instansi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, unsur Pemerintah Daerah, akademisi, asosiasi usaha perikanan, LSM dan media massa;

Bukti komitmen petugas pelayanan dan IMUT/AIMUT tersebut menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Triwulan IV 2025 meningkat dari **3,87** menjadi **3,93**. Namun demikian peningkatan berkelanjutan melalui kritik dan saran pengguna layanan tetap dilakukan, sehingga kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dan dipertahankan.

Adapun kritik, saran dan masukan dari masyarakat melalui aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat terdapat tanggapan sebagai berikut;

- Kecepatan proses penerbitan sertifikat agar dipercepat;
- Beberapa fitur belum terdapat pada aplikasi yang dapat memudahkan pengguna layanan;

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
4.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1

5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	3
7.	PPPK	12
8.	PJLP	5
	TOTAL	37

Alokasi anggaran awal kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2025 yaitu 3987 EBA 994.002.B Semula Rp. 1.292.244.000, - dan terjadi revisi anggaran awal menjadi Rp. 356,509,000, -. Hingga Triwulan IV tahun 2025, anggaran yang sudah terealisasi sebanyak **Rp. 356,016,623,-** atau 99.86 % pada langganan daya dan jasa. Sehingga sisa anggaran sebesar Rp. **492,377,-**

Alokasi anggaran kegiatan indeks kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2024 yaitu Rp. 12.500.000,-. Pada RKAKL Triwulan IV tahun 2024 ini, terjadi revisi anggaran dimana anggaran untuk indeks Kepuasan Masyarakat dihilangkan dan dialihkan dari kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan (3990) ke kegiatan Dukungan Manajemen Internal (3987).

Anggaran dari Tahun 2024 dengan tahun 2025 berbeda sangat signifikan karena pada tahun 2025 anggaran untuk IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengambil pada anggaran Langganan daya dan jasa sebagai penunjang tersedianya sarana dan prasana pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu prioritas nasional karena dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan Asta Cita yang ke 5 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan

dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tools untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasaan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Yang mana Survey ini dapat mengetahui kritik, saran dan masukan dari Masyarakat pengguna layanan pada Balai Besar KIPM Makassar untuk memperbaiki layanan menjadi pelayanan publik yang prima.

IKU ini mendukung budaya ASN yang berakhlak dilingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan. ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini mencakup memahami kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai alat untuk mengetahui saran kritik masukan Masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik Balai Besar KIPM Makassar untuk meberikan pelayanan yang prima.

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai Besar KIPM Makassar dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasaan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Survey kepuasan Masyarakat ini sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Akar Masalah

Belum semua jenis layanan terutama bagian sertifikasi hulu yang dilakukan survey kepuasan Masyarakat oleh Inspektur/ Asisten Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi rencana aksi

Perlu dilakukan briefing/ sharing session kepada petugas pelayanan dan Inspektur/ Asisten Inspektur Mutu terkait masukan kepada pengguna layanan untuk perbaikan pelayanan publik.

Tindaklanjut Rekomendasi sebelumnya

- Postingan mengenai Janji Layanan dan Biaya Layanan di EBook Layanan pada media sosial
- 07 Oktober 2025 Customer Service melakukan pendampingan terhadap PT. Celebes Ocean Fisheries terkait pengisian aplikasi SIAPMUTU;
- 18 November 2025 Customer Service melakukan pendampingan terhadap PT. Zhongyi Chain Services untuk konsultasi mengenai pendaftaran nomor registrasi negara mitra;
- 19 Desember 2025 Customer Service melakukan pendampingan terhadap CV. Prima Indo Tuna untuk konsultasi mengenai model sertifikat TRACES baru Yang dimana hasilnya IKM meningkat di triwulan IV 2025 dari 96,85 menjadi 98,40.



IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai Besar KIPM Makassar Triwulan IV Tahun 2025, secara umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Makassar 109,07 (kategori Istimewa). dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	70	100
2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai Besar KIPM Makassar	70	97,66
3.	Rasio eks[ort ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan eksport lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	99	100
4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	75	91,23
5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	75	90,96
6.	Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	92	94,58
7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	71,5	100
8.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai Besar KIPM Makassar	86	90
9.	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	85	100
10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP	76	100
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT BALAI BESAR KIPM Makassar	3.36	3,93

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil Evaluasi kinerja Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan IV Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi sertifikasi CPIB dan CBIB kepada penyuluh perikanan dan pelaku usaha. (IKU1)
2. Melakukan koordinasi dengan Pembina mutu daerah dalam rangka pembinaan teknis di tingkat daerah sebelum pengajuan rekomendasi.. (IKU2)
3. Pertemuan/sharing session inspektur mutu terkait prosedur internal terhadap penyimpangan hasil uji setelah dilakukan investigasi. (IKU5)
4. Peningkatan kemampuan dan kompetensi analis laboratorium dalam bentuk sharing session ataupun mengikuti pelatihan internal atau eksternal dalam melakukan pengujian laboratorium sesuai standar internasional SNI ISO/IEC 17025:2017. (IKU 6)
5. Perlu dilakukan briefing/ sharing session kepada petugas pelayanan dan Inspektur/ Asisten Inspektur Mutu terkait masukan kepada pengguna layanan untuk perbaikan pelayanan publik. (IKU 16)

4.3 Tindaklanjut

Adapun rekomendasi pada triwulan III tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti pada triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi triwulan sebelumnya
Memperbanyak data dukung inspeksi berupa kondisi lokasi secara keseluruhan baik melalui foto maupun video sebelum kegiatan inspeksi dilaksanakan . (IKU1)

Tindaklanjut : 1). Tindak lanjut rekomendasi adalah telah memperbanyak pengumpulan data dukung inspeksi secara virtual berupa dokumentasi kondisi lokasi secara menyeluruh, baik melalui foto maupun video, sebelum pelaksanaan kegiatan inspeksi.

2. Rekomendasi triwulan sebelumnya :

Memperbanyak data dukung inspeksi berupa kondisi lokasi secara keseluruhan baik melalui foto maupun video sebelum kegiatan inspeksi dilaksanakan (IKU2)

Tindaklanjut : Telah dilengkapi dokumentasi kegiatan inspeksi HACCP/SKP di Unit Pengolahan Ikan (Terlampir).

3. Rekomendasi triwulan sebelumnya :

Menyampaikan laporan hasil uji pada instansi terkait (IKU3)

Tindaklanjut : Pada tanggal 1 desember 2025 telah menyampaikan hasil pengujian ke insatansi terkait yaitu Dinas Perikanan Kab. Takalar

4. Rekomendasi triwulan sebelumnya :

Penyusunan RPD tahun 2026 dilakukan dilakukan bersama dengan para katimja dan para penanggungjawab kegiatan untuk meningkatkan nilai IKPA 2026 (IKU 8)

Tindaklanjut : 1). Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan RPD 2026 yang dirangkaikan dengan rapat evaluasi kegiatan operasional tgl 19 Desember 2025, 2) .Pengelola anggaran telah memaksimalkan realisasi sesuai dengan RPD.

Lampiran Form Capaian Kinerja
Triwulan IV 2025

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Tim/ja	:	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan IV Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100
%Capaian	142,85	142,85	142,85	142,85	142,85	142,85	142,85	142,85	142,85

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<u>DESKRIPSI</u> - Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BPPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. - BPPMHKP Makassar saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan. - Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari : 1. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan; 2. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) 3. Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); 4. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) 5. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) 6. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

- Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.
- Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.
- Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.
- Cara Pembuatan pakan ikan yang baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.
- Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.
- Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk rumahan dan pengawasan mutu guna menghasilkan yang aman bermutu dan berkhasiat.
- Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{Xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan kemananan pangan.

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan

pangan F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

Xn = Jumlah dari Unsur Pembentuk

$$A/B/C/D/E/F = \frac{\text{Jumlah sertifikat yang terbit}}{\text{Jumlah permohonan}} \times 100\%$$

Adapun jumlah permohonan dan jumlah sertifikat yang terbit dapat dilihat pada matriks berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Permohonan Yang Lolos Verifikasi Berkas	Jumlah Sertifikat yang Terbit	Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Sertifikasi
1	Sertifikasi CPIB Kapal	4	4	100 %
2	Sertifikasi CBIB	0	0	0
3	Sertifikasi CPIB	2	2	100 %
4	Sertifikasi CPPIB	0	0	0
5	Sertifikasi CPOIB	0	0	0
6	Sertifikasi CDOIB	0	0	0

Dengan demikian realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan kemananan pangan Triwulan IV adalah 100 % sehingga capaian kinerja sebesar 142,85 %.

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian Triwulan IV Tahun 2024 dengan realisasi capaian Triwulan IV tahun 2025, maka realisasi pada triwulan IV tahun 2025 adalah sama yaitu 100%. karena seluruh permohonan yang masuk dapat ditindaklanjuti sampai dengan terbitnya sertifikat, namun dari segi anggaran dan jumlah output sertifikasi berbeda. Untuk anggaran di tahun 2024 di Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar Rp. 133.511.000 sedangkan anggaran yang tersedia di triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar Rp. 29.140.000 terjadi penurunan anggaran sebesar 358.17 % karena adanya efisiensi anggaran.

- Pada triwulan IV tahun 2025 tidak terdapat Permohonan sertifikasi CBIB, CPPIB, CPOIB dan CDOIB, namun telah dilakukan pengawasan mutu melalui kegiatan surveilan pada unit pembudidaya yang telah tersertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) sebanyak 1 unit. Adapun output kegiatan tersebut berupa Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS) yang diterbitkan setelah dilakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian. Untuk SKHS, telah diserahkan ke Pelaku Usaha atas nama PT. 2512. Pada triwulan IV tahun 2025 juga telah terbit 2 (dua) SKHS CPPIB tertanggal 27 dan 30 Oktober 2025 atas nama Koperasi Syariah Gapoktan Lanrisang dan BPBAP Takalar sebagai output dari kegiatan surveilan CPPIB yang telah dilaksanakan pada triwulan III.

SDM

- Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan Inspeksi CPIB Kapal dan Sosialisasi CPIB Kapal di Kabupaten Bone pada Triwulan IV sebanyak 7 orang, yang terdiri atas 4 Inspektur Mutu dan 3 Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Surveilans CBIB pada TW IV sebanyak 4 orang yang terdiri dari 3 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar dan 1 Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar;
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan inspeksi CPIB pada TW IV sebanyak 4 orang yang kesemuanya adalah Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.

ANGGARAN

- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 95.000.000 kemudian direvisi menjadi Rp 18.820.000 yang digunakan untuk Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer Rp. 18.820.000.
- Untuk anggaran pelaksanaan kegiatan sertifikasi produksi primer semula Rp. 18.820.000 menjadi Rp. 29.140.000 karena adanya revisi anggaran (relaksasi blokir).

PROGRAM NASIONAL

- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP " penangkapan ikan terukur berbasis kuota " yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP " pembangunan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan " yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi

kesehatan manusia.

ASPEK PEMANFAATANNYA

- Pemanfaatan realisasi anggaran TW IV Tahun 2025 sebesar Rp. 13.493.000,- atau sebesar 46.30 %, untuk perjalanan dinas inspeksi CPIB, surveilan CBIB dan belanja bahan.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- Pada tanggal 1-2 Oktober 2025 mengikuti kegiatan Sosialisasi CBIB dan CPIB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- Pada tanggal 8 Oktober 2025 mengikuti kegiatan Webinar Inovasi Teknologi dan Pengelolaan Perikanan Budidaya Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Profesi Akuakultur Indonesia (PROAKSI).
- Pada tanggal 22 -24 Oktober 2025, telah mengikuti pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) yang dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui metode Blended Learning.
- Pada tanggal 27 Oktober 2025 mengikuti FGD Inovasi Nutrisi dan Pakan Fungsional untuk meningkatkan kesehatan dan produktifitas dalam mendukung budidaya udang berkelanjutan di Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin.
- Pada tanggal 29–30 Oktober 2025, menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal dalam rangka pemberdayaan nelayan kecil di wilayah Kabupaten Bone, yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bone dan diikuti oleh 50 orang nelayan.
- Pada tanggal 24–25 November 2025, menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal dalam rangka pemberdayaan nelayan kecil di wilayah Kabupaten Bone, yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bone dan diikuti oleh 50 orang nelayan.
- Pada tanggal 1 Desember 2025, telah dilaksanakan pemahaman produksi pakan serta pengelolaannya dalam mendukung pembudidayaan ikan yang dilaksanakan secara hybrid.
- Pada tanggal 8 Desember 2025, telah mengikuti kegiatan sosialisasi proses sertifikasi CPIB Kapal melalui aplikasi SIAPMUTU yang dilaksanakan secara virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Statistik, Data dan Informasi Sekretariat Jendral KKP.
- Pada tanggal 15 Desember 2025 telah terbit Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2076/XII/Tahun 2025 Tentang Satuan Gugus Tugas Pengendalian Penyakit Ikan Provinsi Sulawesi Selatan yang melibatkan BPPMHKP Makassar sebagai anggota Satgas.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Pencapaian sertifikasi penjaminan mutu hulu masih dapat dimaksimalkan namun terkendala dengan :

- Masih kurangnya literasi dan kesadaran teknis unit pembudidaya dan unit pembenihan akan pentingnya sertifikasi CPIB dan CBIB.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya

- Melaksanakan sosialisasi sertifikasi CPIB dan CBIB kepada penyuluh perikanan dan pelaku usaha.

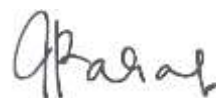
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya

Penanggung Jawab

- Tindak lanjut rekomendasi adalah telah memperbanyak pengumpulan data dukung inspeksi secara virtual berupa dokumentasi kondisi lokasi secara menyeluruh, baik melalui foto maupun video, sebelum pelaksanaan kegiatan inspeksi.

Makassar, 7 Januari 2026

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan



Sri Rahayu Setyaningsih

**DAFTAR RUANG LINGKUP SERTIFIKASI CPIB TRIWULAN IV TAHUN
2025**

No.	Nama Unit Pembenihan	Produk	Grade	No. Sertifikat
1	Ukkas Hamzah	Benih Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)	A	ID-CPIB-T-73-250139 Tanggal 30 Oktober 2025
2	UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Air Tawar Tanralili	Benih Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)	B	ID-CPIB-T-73-250154 Tanggal 28 November 2025

DAFTAR SERTIFIKASI CPIB KAPAL TRIWULAN IV TAHUN 2025

NO	NAMA KAPAL	URURAN KAPAL	TIPIS KAPAL	TANGGAL INSPEKSI	KOMODITAS	NAMA UPI YANG DIPASOK	NOMOR CPIB	MASA BERLAKU CPIB	GRADE
1	Gelaran Helang D1	20	Pemangrup	15 November 2025	Tuna Segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - M - TS - 201983	14 November 2025 - 14 November 2027	B
2	Galassa Puanama G1	21	Pemangrup	15 November 2025	Tuna Segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - M - TS - 201983	14 November 2025 - 14 November 2027	B
3	Elisa Jelas	30	Pemangrup	15 November 2025	Tuna Segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - M - TS - 201986	14 November 2025 - 14 November 2027	B
4	Elisa Baru B1 B2	26	Pemangrup	15 November 2025	Tuna Segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - M - TS - 201984	14 November 2025 - 14 November 2027	B

DOKUMENTASI KEGIATAN

**PELATIHAN CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB) DAN CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
(CPIB)**

22 – 24 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI KEGIATAN
INSPEKSI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB) DI UKKAS HAMZAH,
KABUPATEN MAROS
27 – 28 OKTOBER 2025**



**INSPEKSI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
DI UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI) AIR TAWAR TANRALILI KABUPATEN MAROS
26 NOVEMBER 2025**



**SURVEILAN CARA PEMBESARAN IKAN YANG BAIK (CBIB) DI PT.
2512 KABUPATEN BULUKUMBA
19 – 20 DESEMBER 2025**



**INSPEKSI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI ATAS KAPAL SECARA VIRTUAL
DI TRIWULAN IV**





PELATIHAN CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB) DI KABUPATEN BONE, 29-30 OKTOBER 2025

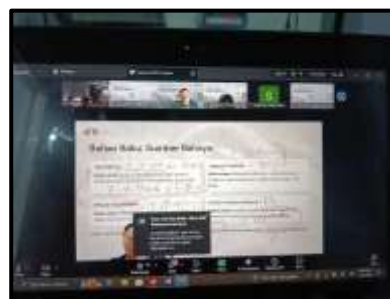


DOKUMENTASI KEGIATAN
PELATIHAN CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB) DI KABUPATEN BONE, 24-25 NOVEMBER 2025

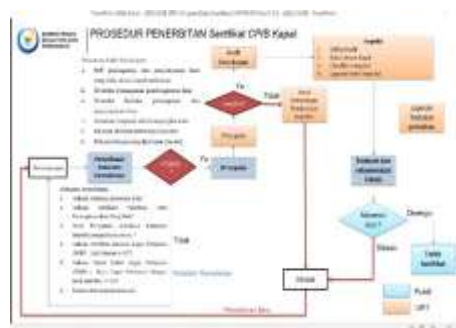




**PEMAHAMAN PRODUKSI PAKAN SERTA PENGELOLAANNYA DALAM MENDUKUNG PEMBUDIDAYAAN IKAN
01 DESEMBER 2025**



SOSIALISASI PROSES SERTIFIKASI CPIB KAPAL MELALUI SIAP MUTU SECARA VIRTUEL
08 DESEMBER 2025



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Tim/ja	:	Pengendalian kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan IV

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70			70
Realisasi	115,08	83,81	99,44	83,63	97,66	90,64			
% Capaian	164,4	119,73	142,05	119,47	139,51	129,48			

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu; Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Pada triwulan IV 2025 melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam Indikator Kinerja Utama yaitu : 1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk) 2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk) Kegiatan Sertifikasi Pasca Panen merupakan salah IKU yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua dan ke empat KKP yaitu

3. Prioritas kedua KKP yaitu Penerapan sistem kuota dalam penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian sumber daya dimana, setiap hasil tangkapan harus dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikasi SKP dan HACCP sebelum dapat diekspor ke negara tujuan, sehingga keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar global dapat meningkat.
4. Prioritas keempat KKP yaitu Pengembangan budidaya perikanan di laut, pesisir, dan darat yang memperhatikan aspek keberlanjutan dimana, setiap hasil budidaya harus dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikasi SKP dan HACCP sebelum dapat diekspor ke negara tujuan, sehingga keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar global dapat meningkat.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan melalui kegiatan inspeksi/sertifikasi SKP dan HACCP diperlukan sumberdaya manusia (Inspektur Mutu) yang berkompeten- ASN harus terus belajar dan mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

CARA PENGUKURAN

5. Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

Dimana

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan

GMPSOP

xn = Total dari unsur pembentuk (2)

Adapun target sertifikasi HACCP pada tahun 2025 sebanyak 272 sertifikat sedangkan target sertifikasi SKP pada tahun 2025 sebanyak 319 sertifikat. Pada rumus perhitungan di atas belum dijelaskan rumus perhitungan untuk memperoleh A dan B. Untuk memudahkan perhitungan maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat HACCP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah sertifikat yang expired (target)}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sertifikat SKP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100\%$$

Persyaratan dalam penerbitan SKP mengacu pada Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan SKP, sedangkan persyaratan dalam penerbitan sertifikasi HACCP mengacu pada Permen KP NO 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Pencapaian IKU ini dapat dilihat pada matriks berikut :

No	Kegiatan	TW IV 2025		
		Target/Rekomendasi	Realisasi	Persentase
1	Sertifikasi HACCP (A)	61	69	113,11%
2	Sertifikasi SKP (B)	90	74	82,22%

Catatan :

6. Realisasi sertifikasi HACCP mencapai 113,11%, karena terdapat beberapa UPI yang proses sertifikasi SKPnya sudah terbit sehingga bisa dilanjutkan ke sertifikasi HACCP.
7. Realisasi sertifikasi SKP mencapai 82,22%, karena terdapat beberapa rekomendasi SKP dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan revisi.

$$\%X = \frac{113,11 + 82,22}{2}$$

= 97,66 %

Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sebesar 97,66 %, dari target 70%. Dengan demikian capaian IKU ini adalah sebesar 139,51 %.

Adapun kegiatan pendukung pada IKU pasca panen adalah kegiatan sertifikasi Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan, sertifikat SPDI (Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan) diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan penyimpanan, pengadaan, sortasi dan grading serta yang melakukan kegiatan distribusi ikan dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai KBLI terkait, menerapkan cara distribusi ikan yang baik (CDIB) dan memenuhi persyaratan pembinaan dari Direktorat Teknis.

Kegiatan sertifikasi SPDI atau Sertifikasi Penerapan HACCP di Supplier mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan No 31 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point di Supplier.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, inspeksi penerapan HACCP di Supplier dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) unit pemasok dan telah diterbitkan sertifikat Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point di Supplier sebanyak 11 (sebelas) lembar sesuai ruang lingkup sertifikasi. Ke delapan unit pemasok tersebut berada di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai, kegiatan dilaksanakan secara virtual.

Jika dibandingkan dengan Triwulan III 2025, telah dilaksanakan inspeksi sertifikasi Penerapan Hazard Analysis And Critical di supplier kepada 16 (enam belas) unit pemasok dan diterbitkan sertifikat sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar sesuai dengan ruang lingkup.

Output dari kegiatan ini berupa sertifikat SKP dan HACCP serta didukung oleh sertifikasi SPDI atau CPIB supplier. Dengan adanya sertifikasi SKP dan HACCP ini, Unit Pengolahan Ikan atau UMKM dapat melakukan kegiatan ekspor produk perikanan dengan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terjamin serta memenuhi standar negara tujuan ekspor. Hal ini didukung dengan adanya sertifikasi SPDI atau CPIB supplier yang dapat menjamin mutu dan keamanan pasokan bahan baku yang masuk ke unit pengolahan dan UMKM.

Adapun kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada TW IV 2025 sebagai berikut :

1. Pada tanggal 8 – 10 Oktober 2025 Telah dilakukan Goes To Supplier dalam rangka Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Selayar, kegiatan ini merupakan kolaborasi Balai Besar KIPM Makassar dengan Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI);
2. Pada tanggal 20 - 21 Oktober 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan workshop pemindaian dan pengambilan sampel produk udang yang diekspor bebas dari radiasi radionuklida Sesium -137 yang dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP KKP;
3. Pada tanggal 11 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan Sosialisasi SHTI dan CoA Perikanan Tangkap yang diselenggarakan oleh PP Untia;
4. Pada tanggal 11 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan Sosialisasi Penerbitan CoA Perikanan Budidaya yang diselenggarakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP KKP;
5. Pada tanggal 21 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar berkolaborasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Maros mengadakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM pada Level UMKM dan Supplier yang dilaksanakan di Kantor Bupati Maros;
6. Pada tanggal 24 November 2025, Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu telah mengikuti Sosialisasi Teknis Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) untuk Penerbitan sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana, DJPDSKP KKP;
7. Pada tanggal 17 Desember 2025 Balai Besar KIPM Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Hulu Hilir kepada Peserta Magang dan Penyuluh Perikanan BRPBAPPP Maros;

Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 16 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengendalian dan pengawasan mutu serta pelayanan sertifikasi mutu hasil perikanan.

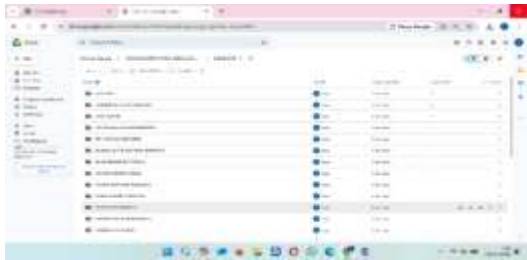
Anggaran awal kegiatan pasca panen pada tahun 2025 sebesar Rp. 210.000.000,- di blokir sebesar Rp. 169.228.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 43.012.000,- realisasi ditriwulan IV sebesar Rp.2.239.000,- atau

sebesar (5,20%). Jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan TW IV tahun 2024 sebesar (99,55%), maka realisasi di Triwulan IV 2025 mengalami penurunan menjadi 94,35% atau 5,25%.

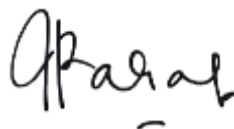
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Terdapat beberapa rekomendasi SKP dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan revisi.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Melakukan koordinasi dengan Pembina mutu daerah dalam rangka pembinaan teknis di tingkat daerah sebelum pengajuan rekomendasi.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Hasil Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
- Telah dilengkapi dokumentasi kegiatan inspeksi HACCP/SKP di Unit Pengolahan Ikan (Terlampir).  	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Makassar, 08 Januari 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja



Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi,M.Sc

DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI SKP

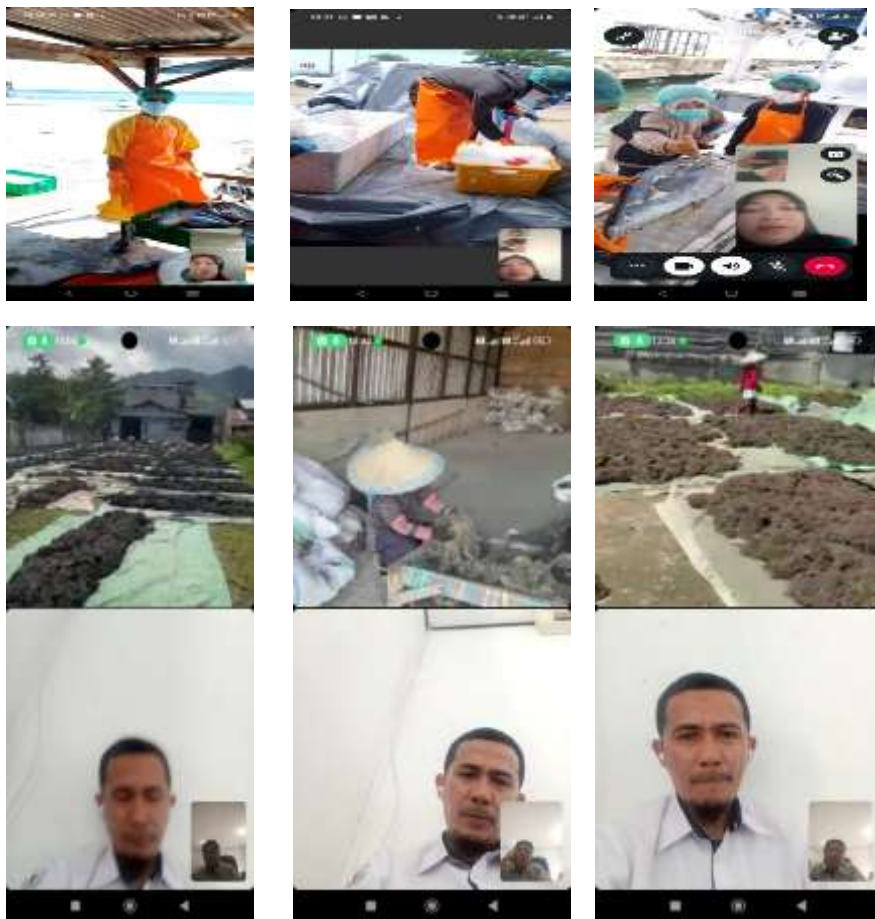


DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI KONSISTENSI PENERAPAN HACCP



DOKUMENTASI KEGIATAN SERTIFIKASI PENERAPAN HACCP DI SUPPLIER





1. Pada tanggal 8 – 10 Oktober 2025 Telah dilakukan Goes To Supplier dalam rangka Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Selayar, kegiatan ini merupakan kolaborasi Balai Besar KIPM Makassar dengan Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI)



2. Pada tanggal 20 - 21 Oktober 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan workshop pemindaian dan pengambilan sampel produk udang yang diekspor bebas dari radiasi radionuklida Sesium -137 yang dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP KKP;



3. Pada tanggal 11 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan Sosialisasi SHTI dan CoA Perikanan Tangkap yang diselenggarakan oleh PP Untia;



4. Pada tanggal 11 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan Sosialisasi Penerbitan CoA Perikanan Budidaya yang diselenggarakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP KKP;



5. Pada tanggal 21 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar berkolaborasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Maros mengadakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM pada Level UMKM dan Supplier yang dilaksanakan di Kantor Bupati Maros;



6. Pada tanggal 24 November 2025, Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu telah mengikuti Sosialisasi Teknis Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) untuk Penerbitan sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana, DJPDSKP KKP;



7. Pada tanggal 17 Desember 2025 Balai Besar KIPM Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Hulu Hilir kepada Peserta Magang dan Penyuluh Perikanan BRPBAPPP Maros;



8. Goes To Supplier dalam rangka Road to Bulan bakti Kelautan dan Perikanan pada tanggal 25 Oktober 2025 di Kepulauan Selayar



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)
Nama Tim/ja	:	Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan 4

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target		1	1	1		1			<u>1</u>
Realisasi		1	1	1		1			
%Capaian		100	100	100		100			

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4``

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Pada tahun 2025 terdapat penambahan IKU baru yaitu Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi), yang ditahun sebelum hanya berupa IKU pendukung. Balai Besar KIPM Makassar adalah salah satu unit kerja yang mendapatkan target lokasi monitoring cemaran perairan dari Kepala Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP pada, tahun 2025 lokasi monitoring 1 lokasi yaitu perairan wilayah Takalar yang terdiri dari 1 titik monitoring yaitu TPI Beba. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui apakah komoditi perikanan yang diperoleh dari perairan terpapar racun hayati laut dan logam berat serta mendapatkan data dan informasi pengujian kandungan racun hayati laut dan logam berat pada ikan sebagai bahan rekomendasi kepada Otoritas Kompeten. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu pada setiap semester dengan sasaran titik pendaratan ikan yang ditangkap di perairan Takalar atau di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan adanya data monitoring yang mutakhir sehingga menjadi bahan rekomendasi pengelolaan perikanan di perairan Makassar. Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan monitoring cemaran perairan meliputi : ➤ <u>Sarana dan Prasarana</u> : Penerapan standar sanitasi dan higienis pada TPI/PPI merupakan indikator jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipasarkan sehat dan aman untuk konsumsi ➤ <u>Pengambilan Contoh</u> uji yang diambil kemudian dibawa ke Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar untuk pengujian parameter logam berat (<i>Pb, Cd, Hg</i>) dan pengujian mikrobiologi untuk parameter <i>E.Coli, Salmonella</i> dan dikirim ke Laboratorium BUSKIPM untuk pengujian racun hayati laut parameter <i>ciguatoks</i> dikarenakan pengujian racun hayati belum masuk ruang lingkup di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar. Kegiatan monitoring cemaran perairan merupakan salah IKU yang mendukung Asta Cita ke - 2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar

mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu perikanan melalui kegiatan monitoring cemaran perairan di perlukan sumberdaya manusia (Inspektur mutu) yang berkompeten ASN harus terus belajar dan mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

Kegiatan monitoring cemaran perairan, berdasarkan program Tahunan yang telah disusun pada tahun 2025 memiliki 1 target lokasinya yaitu TPI Beba Kab. Takalar, dan dilaksanakan dalam 2 (dua) kali setahun.

Kegiatan monitoring cemaran perairan telah dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025 dengan titik lokasi monitoring cemaran perairan di TPI Beba Kab. Takalar .

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan IV meliputi :

1. Menyampaikan hasil pengujian monitoring cemaran perairan di TPI Beba Kab. Takalar pada tanggal 2 Desember 2025 pada Penanggungjawab TPI Beba
2. Mengikuti kegiatan Work shop Marine biotoxin yang dilaksanakan oleh Singapore food Agency (SFA) pada tanggal 12 Nopember 2025
3. Mengikuti Rapat Evaluasi dan koordinasi dengan tim Pusat Mutu Produksi Primer pada tanggal 24 Desember 2025

Tabel Hasil pengujian monitoring cemaran perairan di PPI Beba

No	Lokasi	Jenis ikan	Parameter Uji			E coli	Hasil Uji	
			Logam berat (Hg, Cd, Pb)	Ciguatoxin	Salamonella		TW III	TW IV
1	PPI Beba	Ikan Barakuda	√	<i>Negativ</i>	√	√	Bawah ambang batas	
		Ikan kaneke	√	<i>Negativ</i>	√	√	Bawah ambang batas	
		Ikan Katamba	√	<i>Negativ</i>	√	√	Bawah ambang batas	

Pada triwulan IV tahun 2025 tanggal 9 Oktober 2025 telah diterima hasil pengujian untuk parameter Ciguatoxin dari BUSPM Jakarta dengan hasil pengujiannya negatif /tidak terdeteksi pada ke 3 (tiga) sampel.

Anggaran awal kegiatan monitoring cemaran perairan pada tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- setelah buka blokir anggaran bernilai Rp. 8.240.000,-

Realisasi anggaran triwulan IV sebesar Rp. 1.170.000,- yang digunakan untuk pembelian sampel pengawasan mutu domestik dan pemantauan ketersediaan ikan pada masa natal tahun 2025 dan tahun baru 2026, dengan demikian realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar 99,90%

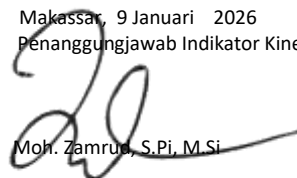
Sebagai perbandingan anggaran triwulan III sebesar Rp. 3.650.000,- atau sebesar 44,30% yang digunakan untuk pembelian sampel Pengawasan mutu dan biaya ATK computer supplies sehingga terjadi kenaikan realisasi dari triwulan III ke triwulan IV sebesar 55,6 %.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
Pada Keputusan Kepala BKIPM No. 96 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis monitoring cemaran perairan dinyatakan frekuensi pengambilan contoh dilakukan minimal 1 (satu) kali per triwulan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Mengikuti kegiatan rapat persiapan monitoring cemaran perairan yang di laksanakan oleh pusat mutu produksi primer untuk mendapatkan penjelasan detail terkait juknis tersebut	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Pada tanggal 1 desember 2025 telah menyampaikan hasil pengujian ke insatansi terkait yaitu Dinas Perikanan Kab. Takalar	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan

Makassar, 9 Januari 2026
 Penanggungjawab Indikator Kinerja



Moh. Zamrud, S.Pi, M.Si

HASIL PENGUJIAN CIGUATOXIN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
**BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**
JALAN RAYA SETU NOMOR 3 - KOTA CILANDI, JAKARTA TIMUR 13860
Telp. (021) 8358631
LAMARAN bbkpm@kcp.go.id / bbkpm@kcp.go.id

HASIL UJI

TEST RESULT

Referensi: 0181/BBKPM/KS.210/X/2025

Menyatakan /
This is certify that
1. Nama Pelanggan / Customer : BBKPM Makassar
2. Alamat / Address : Jl. Dakota No. 24 Sudiang Raya - Makassar
3. Tanggal Penerimaan / Receipt Date : 02 Oktober 2025
4. Kode Contoh Uji / Test Sample Code : 0181
5. Tanggal Pengujian / Date of analysis : 02 Oktober 2025

No	Bidang Pengujian / Test Field	Nama Contoh uji / Test sample Name	Berkas Lembar uji / Test sample Form	Parameter / Parameter	Hasil Uji/Hasil / Result (unit)	Persyaratan Mutu / Quality Requirement	Metode Acuan / Reference Method	Keterangan / Information
1	Lab. Kimia	Ikan Burayud 001	Seger	Ciguatera Ikan Buang Longkap	Negatif Tidak Terdeteksi		Mouse Bioassay	
2	Lab. Kimia	Ikan Kelambak 002	Seger	Ciguatera Ikan Buang Longkap	Negatif Tidak Terdeteksi		Mouse Bioassay	
3	Lab. Kimia	Ikan Kanekko 003	Seger	Ciguatera Ikan Buang Longkap	Negatif Tidak Terdeteksi		Mouse Bioassay	

Catatan /
Note
1. Hasil uji ini mewakili populasi yang disampaikan uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji.
2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (stempel Asli).
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan sesuai tertulis Kepala Balai Uji Standar KIPK Ditengah Uji.
The report of test shall not be reproduced (except for the completed one and with the written permission of the Head of Fish Quarantine and Inspection Standard Testing Laboratory, Ciguatera)

Jakarta, 02 Oktober 2025
Penanggungjawab Laboratorium***

BBKPM
Makassar

Shah Heruba Irawan Purnomo, S.P.
NIR 148505012006041002

F.7.8.2



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
**BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR**
JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEFON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 5551198
LAMARAN bbkpm@kcp.go.id / bbkpm@kcp.go.id

Nomor : B.3740/BBKPM.MKS/ TU.210/XI/2025 1 Desember 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pemberitahuan Hasil Pengujian Monitoring Cemaran Perairan dan Penilaian Kondisi Lingkungan

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
Di Takalar

Sehubungan dengan selesainya kegiatan monitoring cemaran perairan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar di semester II tahun 2025 dimana salah satu titik monitoring adalah PPI Beba Takalar, maka bersama ini disampaikan hasil pengujian pada lokasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan/standar. Adapun hasil penilaian kondisi lingkungan PPI Beba Takalar masih terdapat beberapa ketidaksesuaian pada fasilitas konstruksi serta sanitasi dan hygiene. Untuk itu, kami merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan sarana prasarana terutama kemiringan lantai, saluran pembuangan air, program pembersihan langit-langit, fasilitas toilet, ketersediaan es serta kebersihan peralatan dan alat angkut yang digunakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pii, Kepala BBKPM Makassar,



Ditandatangani Secara Elektronik
Mohammad Zamrud

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sibar dan Sibar Negara



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEFON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B.1835/BPPMHKP.3/TU.330/XII/2025 21 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Undangan Rapat

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer melalui kegiatan monitoring kesegaran ikan, residu bahan kimia berbahaya dan racun hayati laut (*marine biotoxine*) pada lingkungan perairan yang telah dilakukan pada 4 (empat) lokasi pada tahun 2025 dan rencana pelaksanaan pada tahun 2026 pada 10 (sepuluh) lokasi, bersama ini kami menyampaikan akan dilaksanakannya evaluasi dan koordinasi lebih lanjut terkait mekanisme pelaksanaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu atau Pejabat/Staf yang mewakili pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Rabu, 24 Desember 2025
waktu : Pukul 13.00 WIB s.d 16, 00 WIB
tempat : Ruang Rapat New Carpio GMB II Lantai 6 (secara hybrid)
Zoom meeting ID Rapat : 910 2157 9038
Password: 409862
agenda : a. Evaluasi pelaksanaan monitoring perairan tahun 2025;
b. Persiapan pelaksanaan monitoring perairan tahun 2026; dan
c. Hal lain yang berkembang dalam rapat

Demikian kami menyampaikan, atas perkenan dan dukungan baik yang diberikan, kami ucapkan terima kasih,

a.n. Kepala Badan
Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
Kepala Pusat Mutu Produksi Primer



Disandatangani
Secara Elektronik

Ari Prabowo

Tembusan:
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumentasi kegiatan Work Shop





Dokumentasi Kegiatan Rapat Evaluasi



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator (4)	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)
Nama Tim/ja	:	Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan IV

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	1	0	1	1	0	1	1	100	<u>1</u>
Realisasi	1	0	1	1	0	1	1	100	1
%Capaian	100	0	100	100	0	100	100	100	100

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik merupakan salah satu IKU yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas KKP yaitu: - Program Prioritas Kedua KKP yaitu penerapan sistem kuota dalam penangkapan dan memastikan keberlanjutan sumber daya ikan, dimana pada kegiatan pengawasan mutu BPPMHKP Makassar memastikan produk hasil perikanan tangkap yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan. - Program Prioritas Ketiga KKP yaitu pengembangan budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, baik untuk komoditas ekspor maupun konsumsi lokal, dimana pada kegiatan pengawasan mutu BPPMHKP Makassar memastikan produk hasil perikanan hasil budidaya yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain dan instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir. Dalam hal ini BPPMHKP memiliki peran penting antara lain: 1. Pengawasan Mutu: BPPMHKP melakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan. 2. Pengendalian Mutu: BPPMHKP melakukan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kualitas dan keamanan pangan.

Dengan demikian BPPMHKP juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu perikanan, diperlukan sumberdaya manusia (Inspektur Mutu) yang berkompeten: ASN harus terus belajar mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

Pada tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebanyak 1 lokasi yaitu kota Makassar dengan jumlah 1 lokus. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester. Adapun lokasi pengawasan sentra penyedia pangan sehat yaitu pasar tradisional.

Pada Triwulan IV tahun 2025 telah terbit hasil pengujian sampel pengawasan mutu domestik yang dilaksanakan pada Triwulan III 2025. Adapun hasil pengujian sampel pada parameter pengujian Organoleptik, ALT, *Echerichia coli*, *Salmonella spp*, Formalin dan Histamin menunjukkan tidak adanya penyimpangan hasil uji.

Pada triwulan IV tahun 2025 tidak terdapat target pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik, namun Balai Besar KIPM Makassar hanya melaporkan hasil pengawasan perikanan domestik yang dilaksanakan pada triwulan III tahun 2025 dan telah diverifikasi oleh tim BPPMHKP Oleh Pusat Mutu Pasca Panen. Selain itu Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam negeri sehubungan ketersediaan stok ikan pada Pelaksanaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Berbagai upaya dilaksanakan antara lain turun langsung ke lapangan memantau stok ikan di sentra penyedia pangan sehat (TPI Labuang Kab. Maros), melakukan diskusi dengan pelaku utama yang melakukan aktivitas jual beli ikan serta melakukan pengawasan mutu produk perikanan untuk memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan bermutu.

Rangkaian kegiatan terdapat pengambilan sampel yang dilakukan di TPI Labuang, terdapat 5 jenis sampel yaitu ikan cakalang segar, ikan ekor kuning segar, udang vannamei segar, cumi-cumi segar dan ikan bandeng segar. Telah terbit hasil pengujian sampel pengawasan mutu domestik sehubungan ketersediaan stok ikan pada Pelaksanaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di laboratorium penguji Balai Besar KIPM Makassar dengan target pengujian Organoleptik, ALT, *Echerichia coli*, *Salmonella spp*, Formalin dan Histamin. Hasil pengujian menunjukkan tidak adanya penyimpangan hasil uji atau sesuai yang dipersyaratkan.

Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik tahun 2025 merupakan salah satu indikator kinerja yang tidak mendapatkan alokasi anggaran karena adanya kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran. Namun kebijakan pemerintah tersebut tidak menjadi penghalang pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik.

Sebagai pembanding pagu anggaran untuk kegiatan pengawasan mutu domestik pada triwulan IV tahun 2024 sebesar sebesar Rp. 60.000.000. Adapun realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp. 57.235.865 atau 95,39%.

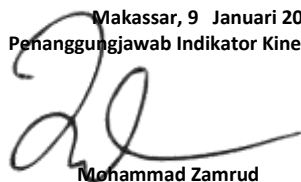
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Balai Besar KIPM Makassar belum menyampaikan hasil pengujian sampel pada kegiatan pengawasan mutu domestik dan pemantauan ketersediaan pasokan ikan menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada instansi terkait.
- Keterlibatan Balai Besar KIPM Makassar pada kegiatan operasi pasar tradisional yang dilaksanakan secara berkala oleh Pemerintah Kota Makassar belum optimal.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Rekomendasi rencana aksi di triwulan I tahun 2026 yaitu: 1. Menyampaikan hasil pengujian sampel pada kegiatan pengawasan mutu domestik dan pemantauan ketersediaan pasokan ikan menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada instansi terkait. 2. BPPMHKP Makassar akan berkoordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan kegiatan pengawasan mutu domestik di tahun 2026.	Katimja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Telah dilaporkan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik Triwulan III kepada Dinas Perikanan dan pertanian Kota Makassar pada bulan November 2025	Katimja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Makassar, 9 Januari 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja



Mohammad Zamrud

Di TPI Labuang Kabupaten Maros



Hasil Uji sampel TPI Labuang Maros

[illegible]

10. <http://www.elsevier.com/locate/locate/jbiotec>

1. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 1-10.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Tim/ja	:	Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan IV Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	99	99	99	99	99	99	99		99
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	
% Capaian	101	101	101	101	101	101	101	101	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Tw 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Sistem Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tumbuh seiring dengan perkembangan tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan pangan di tataran internasional yang semakin ketat, dan tidak hanya fokus pada mutu dan keamanan dari produk akhir. Sistem jaminan mutu dan keamanan terhadap proses merupakan tuntutan dan penerimaan masyarakat dunia (internasional) akan keberterimaan pangan, termasuk hasil perikanan. Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh internasional, harus dipenuhi oleh seluruh negara pengekspor, yang dinyatakan pada sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang menyertai setiap produk yang dipasarkan, baik untuk pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor. Meningkatnya daya saing produk perikanan harus diiringi dengan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berbasis kualitas sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar KIPM Makassar tahun 2025 -2029. Salah satu isu strategisnya adalah peningkatan gizi anak melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan, yang kaya akan nutrisi seperti ikan dan rumput laut Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektifitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Usaha Pembenihan, Pembesaran dan Unit Pengolahan Ikan serta hasil pengujian contoh. Peningkatan ekspor perikanan ke negara tujuan merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pada Asta Cita ke 5 terdapat tiga kegiatan utama yaitu peningkatan ekspor produk perikanan tangkap, pembangunan industri hilir dan industri penangkapan ikan serta penjaminan mutu dan keamanan pangan akuatik komoditas perikanan budi daya.

Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Balai Besar KIPM Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ke negara tujuan.

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rasio kegiatan pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar wilayah Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini dibuktikan diterimanya SMKHP di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan dari negara tujuan.

Perhitungan IKU ini berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$X = \frac{A - B}{A}$$

X : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A : SMKHP yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B : Jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan

IKU ini menggunakan formulasi diatas sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$X : \frac{\text{Jumlah SMKHP ekspor yang memenuhi syarat mutu} - \text{penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah SMKHP mutu ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$$

$$\frac{(3.349 - 0)}{3.349} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU ini di triwulan IV tahun 2025 adalah 100% karena tidak ada penolakan dari negara tujuan. Jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan didapatkan nilai yang sama antara Triwulan IV tahun 2025 dan triwulan IV tahun 2024 yaitu 100 %.

Pada triwulan IV tahun 2025 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 47.997,14 ton senilai Rp. 1,95 T dengan jumlah sertifikat ekspor (SMKHP) yang diterbitkan sebanyak 3.349 sertifikat. Sebagai perbandingan, pada triwulan III tahun 2025 tercatat

volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 49.982,96 ton senilai Rp. 1,75 T dengan jumlah SMKHP yang diterbitkan sebanyak 3.358 sertifikat. Berdasarkan data tersebut pada triwulan IV terjadi penurunan frekwensi penerbitan SMKHP sebesar 0,27 % dan volume ekspor sebesar 3,97 % jika dibandingkan triwulan IV tahun 2024, namun terjadi kenaikan persentase nilai ekspor sebesar 11,42 %.

Sebagai perbandingan, volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan pada triwulan IV tahun 2024 sebanyak 53,62 ton senilai Rp. 1,847 T dengan jumlah SMKHP yang diterbitkan sebanyak 2.796 sertifikat. Jika dibandingkan triwulan IV tahun 2025 dan triwulan IV tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah SMKHP sebesar 19,78 % dan nilai sebesar 5,6 % di triwulan IV tahun 2025, namun dari jumlah volume ekspor terjadi penurunan sebesar 10,5 %.

Data pada triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan tidak terdapat kasus penolakan produk perikanan yang dikirim ke negara tujuan. Pada triwulan IV tahun 2025 memiliki kondisi yang sama dengan triwulan III tahun 2024 yaitu tidak adanya kasus penolakan produk perikanan.

Kegiatan sertifikasi ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu sebanyak 20 orang serta didukung oleh tenaga PPPK sebanyak 13 orang dan PJLP sebanyak 2 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu, serta pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Sejalan dengan peningkatan pelayanan sertifikasi ekspor produk perikanan, terdapat beberapa kegiatan peningkatan kompetensi, pemberian penghargaan, undangan mengikuti kegiatan eksternal maupun kunjungan dari pihak eksternal untuk mendukung IKU ini. Kegiatan tersebut diikuti oleh petugas pelayanan maupun inspektur mutu antara lain sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Waktu Kegiatan
1.	Peningkatan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan	BPPMHKP Makassar	08 Oktober 2025
2.	Briefing Siang Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	14 Oktober 2025
3.	Pelepasan ekspor komoditi perikanan dari kab. Maros yang dirangkaikan dengan peringatan hari ikan nasional	BPPMHKP Makassar	21 November 2025
4.	BPPMHKP Makassar menghadiri ekspor perdana frozen cephalopod	PT. Nirvana Niaga Sejahtera	15 Desember 2025
5.	BPPMHKP Makassar menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Maros sebagai Instansi yang Berperan Aktif Dalam Peningkatan Ekspor Produk Perikanan	Pemerintah Kabupaten Maros	17 Desember 2025
6.	BPPMHKP Makassar menghadiri pelepasan ekspor serentak sinergi Nusantara dari delapan penjurur wilayah Indonesia	Kementerian Perdagangan RI	17 Desember 2025
7.	Rapat koordinasi penguatan SMKHP dan pengembangan laboratorium rujukan wilayah Indonesia Timur	BPPMHKP Makassar	29 Desember 2025

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu :

1. Monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra.
2. Monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP
3. Investigasi kasus penolakan ekspor di negara tujuan.

I. Monitoring dan Evaluasi Nomor Registrasi Negara Mitra

Pada triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra sebanyak 4 (empat) UPI. Adapun UPI yang telah di monitoring adalah :

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan	Inspektur Mutu
1.	PT. Aiki Mega Jaya Utama	05 November 2025	Waode Suharni Arfiandi
2.	PT. Biru Laut Nusantara	05 November 2025	Fatima Tayang Wara Zakaria
3.	PT. Jireh Komoditi	05 November 2025	Kamaruddin Patmawati
4.	PT. Buana Laut Nusantara	05 November 2025	Anugrah Ekayani Taufiq

Monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra (Noreg) dilakukan untuk mengetahui efektifitas penggunaan nomor registrasi oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI). Sasaran kegiatan pada triwulan IV tahun 2025 adalah 4 (empat) UPI yang memiliki nomor registrasi di beberapa negara mitra seperti China, Republik Korea, Arab Saudi, Kanada dan Vietnam. Berdasarkan hasil monev noreg yang paling aktif digunakan oleh UPI tersebut adalah ekspor dengan tujuan negara China. Di triwulan IV tahun 2025 terjadi buka blokir anggaran tetapi belum mengakomodir kegiatan perjalanan dinas sehingga kegiatan ini dilakukan secara daring.

II. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan SMKHP

Pada triwulan IV tahun 2025 BPPMHKP Makassar telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada 3 (tiga) UPI yang melaksanakan ekspor ke negara tujuan. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut ini.

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan	Inspektur Mutu
1.	CV. Anugrah Bintang Cemerlang	02 Oktober 2025	Suprianto Andi Muhammad Haedar
2.	PT. Giwang Citra Laut	02 Oktober 2025	Mohammad Zamrud Taufiq Erwin Wijaya
3.	PT. Lintas Antar Nusa	08 Oktober 2025	Waode Suharni Fatima Tayang Erwin Wijaya

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada UPI dilakukan berdasarkan profiling Unit Pengolahan Ikan dalam kegiatan pelayanan sertifikasi ekspor ke negara tujuan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan monev adalah memastikan bahwa kegiatan penilaian kesesuaian penerbitan SMKHP pada pelaku usaha berjalan sesuai ketentuan regulasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai serta memudahkan BPPMHKP Makassar dalam melakukan penilaian ke pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya pelaku usaha ekspor. Hasil dari kegiatan monev ini menjadi dasar dalam pemberian skoring tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penerbitan SMKHP. Kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP dilaksanakan secara tatap muka dengan memanfaatkan kendaraan dinas. Pada triwulan IV telah dilakukan buka blokir anggaran tetapi belum mengakomodir kegiatan perjalanan dinas.

III. Investigasi Kasus Penolakan Ekspor Di Negara Tujuan

Pada triwulan IV tahun 2025 tidak terdapat notifikasi penolakan ekspor dari negara tujuan di UPT BPPMHKP Makassar, namun berdasarkan data hasil uji laboratorium terdapat beberapa produk perikanan yang menyimpang sehingga dilakukan investigasi secara virtual. Adapun UPI yang di investigasi adalah sebagai berikut:

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan Investigasi	Produk	Penyebab	Inspektur Mutu
1.	PT. Wahyu Pradana Bina Mulia	20 Oktober 2025	Air dan Es	Penyimpangan Hasil Uji Laboratorium kimia (Fe)	Andi Rahmaniar DJ Ardiana
2.	PT. Lintas Antar Nusa	23 Oktober 2025	Air Asin	Penyimpangan Hasil Uji Lab Total Zat padat terlarut	Habrin Yake Muzakir
3.	CV. Maros Timur Jaya	03 November 2025	Air dan Es	Penyimpangan hasil uji parameter Besi (Fe) Terlarut pada Air dan Es serta Total Zat Padat	Habrin Yake Muzakir

				Terlarut (TDS) pada Es	
4.	PT. Global Maju Pratama	27 November 2025	Air	Penyimpangan hasil uji laboratorium parameter Zat Padat Terlarut (TDS)	Habrin Yake Muzakir
5.	PT. Sinar Graha	04 Desember 2025	Frozen Pelagic Fish (Steak Tenggiri)	Penyimpangan hasil uji parameter kimia Timbal (Pb)	Habrin Yake Muzakir

Kegiatan yang mendukung IKU ini beserta pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Lock Pagu	Realisasi Anggaran TW IV 2025	Persentase Realisasi
1.	7010.ABR.001 Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0
2.	3989.QIC.002 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	0	0
3.	3989.BIA.001 Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0

Alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini pada tahun 2025 sebesar Rp. 45.000.000. Adapun anggaran untuk indikator kinerja sampai dengan TW IV tidak terealisasi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 57.000.000 dengan realisasi Rp. 56.841.000 dimana terjadi penurunan pagu anggaran sebesar 25%.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 beluma ada anggaran yang terealisasi disebabkan buka blokir anggaran telah dilaksanakan tetapi belum mengkomodir kegiatan perjalanan dinas.

Pada triwulan IV tahun 2024 dan triwulan IV tahun 2025 telah terealisasi kegiatan pendukung yaitu monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi negara mitra sebesar 100 %, namun dari segi anggaran tidak berjalan maksimal di tahun 2025 disebabkan karena buka blokir anggaran telah dilaksanakan tetapi belum mengkomodir kegiatan perjalanan dinas.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Belum tersedia prosedur internal terhadap penyimpangan hasil uji setelah dilakukan investigasi

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Pertemuan/sharing session inspektur mutu terkait prosedur internal terhadap penyimpangan hasil uji setelah dilakukan investigasi	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Telah dilaksanakan kegiatan monev nomor registrasi negara mitra dibulan November sebanyak 4 (empat) UPI.	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan

Makassar, 07 Januari 2026
 Penanggungjawab Indikator Kinerja

Mohammad Zamrud

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Peningkatan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan tanggal 08 Oktober 2025



2. Briefing Siang Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu Pada Tanggal 14 Oktober 2025



3. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan SMKHP pada Unit Pengolahan Ikan



4. Investigasi Penolakan Ekspor di Negara Tujuan



5. Ekspor Produk Perikanan dari Kabupaten Maros Pada Kegiatan Hari Ikan Nasional tanggal 21 Nopember 2025.



6. Ekspor Perdana Frozen Cephalopod PT. Nirvana Niaga Sejahtera tanggal 15 Desember 2025.



7. Pemberian Penghargaan Kepada BPPMHKP Makassar dari Pemerintah Kabupaten Maros pada tanggal 17 Desember 2025



8. Pelepasan Ekspor Serentak Sinergi Nusantara Dari Delapan Penjuru Wilayah Indonesia pada tanggal 17 Desember 2025



9. Rapat Koordinasi Penguatan SMKHP dan Pengembangan Laboratorium Rujukan Wilayah Timur pada tanggal 29 – 31 Desember 2025



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
Nama Tim/ja	:	Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan IV Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	75	75	75	75	75	75	75		75
Realisasi	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23		
%Capaian	121,64	121,64	121,64	121,64	121,64	121,64	121,64		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4`

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
• Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. • ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. • Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi: 1. Ruang Lingkup; 2. Acuan Normatif; 3. Persyaratan Umum; 4. Persyaratan Struktural; 5. Persyaratan Sumber Daya; 6. Persyaratan Proses; 7. Persyaratan Sistem Manajemen • Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji diperoleh dengan menggunakan rumus : $\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ dimana : $\bar{X}$ = Rata rata $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2 , 3, ... n n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

- Hasil verifikasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian di Balai Besar KIPM Makassar dihitung oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP berdasarkan rumus di atas. Berdasarkan surat dari Kepala Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP Nomor B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Penyampaian Capaian Kinerja Sistem Manajemen Mutu sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, maka Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai sebesar 90,96 dari target sebesar 75. Sehingga output kegiatan penerapan sistem manajemen mutu telah terealisasi sebesar 121,64 %.
- Sebagai perbandingan, capaian nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu dengan beberapa UPT BPPMHKP dapat disandingkan sebagai berikut :
 - Balai KIPM Semarang dengan nilai 92,02. Maka untuk perbandingan ini, masih lebih rendah dengan selisih 1,06 poin.
 - Balai KIPM Denpasar dengan nilai 86,57. Maka untuk perbandingan ini, Balai Besar KIPM Makassar lebih tinggi dengan selisih 4,39 poin.

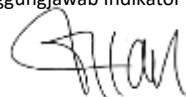
Dari bechmarking tersebut diatas maka Balai Besar KIPM Makassar masih memerlukan perbaikan berkelanjutan terhadap indikator-indikator penilaian terutama pada indikator yang menjadi temuan ketidaksesuaian.
- Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian adalah kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar. Selama Triwulan IV Tahun 2025, terdapat 1.923 kali pengujian laboratorium yang terdiri dari :
 1. Pengujian Organoleptik sebanyak 149 kali
 2. Pengujian Mikrobiologi sebanyak 1.161 kali
 3. Pengujian Kimia sebanyak 443 kali
 4. Pengujian Air dan Es sebanyak 170 kali
- Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 18 orang mulai dari Manager Puncak hingga analis dan staf laboratorium yang kompeten dalam melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium.
- Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.
- IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan dengan memberikan pelayanan laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan.
- Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan IV tahun 2025 mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 36.537.000,- di Triwulan I Tahun 2025 menjadi Rp. 112.446.000,- di Triwulan IV Tahun 2025. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2025 meningkat sebesar 60,6% dari sebelumnya sebesar Rp. 70.000.000,- di tahun 2024.
- Pada Triwulan IV Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu telah direalisasikan sebesar Rp. 103.003.210,- atau sebesar 91,60% dari anggaran tahun 2025. Sisa anggaran sebesar Rp. 9.442.790,- sudah tidak dapat direalisasikan karena adanya anggaran penanganan limbah laboratorium yang berlebih.
- Pada Triwulan IV Tahun 2025 ini telah dilakukan beberapa kali kegiatan peningkatan kompetensi laboratorium diantaranya :
 - 16/10/2025 Webinar Growth Promotion Test as Part of Microbiology Media ISO 11133 oleh DKSH
 - 03/11/2025 Pelatihan Online Pengelolaan Limbah oleh Maja Sains
 - 12/11/2025 ASEAN Training Workshop Online on Marine Biotoxins oleh Singapore Food Agency
 - 25/11/2025 Webinar Basic & Analisa Atomic Absorption Spectrophotometer oleh Maja Sains
 - 26/11/2025 Pelatihan Online Good Laboratory Practices oleh Pusat Manajemen Mutu
 - 27/11/2025 Pelatihan Online Pemahaman Pengujian Proximat Produk Perikanan oleh Pusat Manajemen Mutu
 - 2-3/12/2025 Workshop Teknik Audit SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Pusat Manajemen Mutu
 - 18/12/2025 Webinar Safety Microbiology Laboratory oleh Maja Sains
 - 23/12/2025 Pelatihan Online Essential Microbiology Testing From ISO Standards to Innovative Alternative Methods oleh DKSH
- Pada tanggal 25 November 2025 Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP melaksanakan Verifikasi Official Control untuk melihat konsistensi pengujian laboratorium dalam rangka official control di Balai Besar KIPM

dengan evaluator Martono dan Danar Kristiasari. Hasilnya terdapat 5 temuan yang telah dilakukan tindakan perbaikan pada tanggal 24 Desember 2025. Hasil verifikasi official control Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai 88,33 (sangat baik). • Pada tanggal 10 November 2025 terdapat kunjungan praktek kerja lapang mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin sebanyak 40 orang dalam rangka menggali ilmu dan pengalaman pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar. • Selama Triwulan IV tahun 2025, terdapat 7 mahasiswa Jurusan Perikanan Universitas Hasanuddin yang melaksanakan magang di Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar dan terdapat 4 orang lulusan perguruan tinggi yang melaksanakan magang berdasarkan program pemagangan nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Program magang ini memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada peserta magang dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan khususnya di bidang pengujian laboratorium. • Pada tanggal 7 – 8 November 2025 terdapat kunjungan Kepala Pusat Manajemen Mutu ke Balai Besar KIPM Makassar dalam rangka memantau progress persiapan pembangunan laboratorium rujukan yang di biayai dari anggaran SBSN tahun 2026. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Pusat Manajemen Mutu memberikan arahan rencana strategis pembangunan laboratorium rujukan. Rencananya Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar akan mendapatkan peralatan tambahan untuk penambahan ruang lingkup uji laboratorium Balai Besar KIPM Makassar. • Pada tanggal 29-31 Desember 2025 Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Rapat Koordinasi Penguatan SMKHP dan pengembangan Laboratorium Rujukan Wilayah Timur yang diikuti oleh 6 UPT BPPMHKP lingkup kawasan Indonesia Timur untuk mengkonsolidasikan rencana pengembangan metode uji laboratorium rujukan.
--

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar akan dijadikan laboratorium rujukan Wilayah Timur Indonesia dengan beberapa ruang lingkup baru. Potensi masalah yang ada adalah kemampuan analis dalam melaksanakan pengujian untuk ruang lingkup yang akan di tambahkan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Peningkatan kemampuan dan kompetensi analis laboratorium dalam bentuk sharing session ataupun mengikuti pelatihan internal atau eksternal dalam melakukan pengujian laboratorium sesuai standar internasional SNI ISO/IEC 17025:2017	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Telah dilakukan pelatihan peningkatan kompetensi analis laboratorium pada Triwulan IV Tahun 2025.	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Makassar, 8 Januari 2026
 Penanggungjawab Indikator Kinerja



Muhammad Irfan Rais

**LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI ANALIS LABORATORIUM
TRIWULAN IV TAHUN 2025**



**LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN VERIFIKASI OFFICIAL CONTROL
PUSAT PENGENDALIAN MUTU BPPMHKP
TANGGAL 25 NOVEMBER 2025**



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
Nama Timja	:	Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan IV Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	75	75	75	75	75	75	75		75
Realisasi	93,33	89,93	91,58	90,96	90,96	90,96	90,96		
%Capaian	124,29	119,91	122,11	121,28	121,28	121,28	121,28		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
- ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga Inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. - Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (ISO 17020). - Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi: - Persyaratan Umum - Persyaratan Struktural - Persyaratan Sumberdaya - Persyaratan Proses - Persyaratan Sistem Manajemen - Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah kegiatan surveilan penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Selama Triwulan IV Tahun 2025, terdapat 75 kali pelaksanaan surveilan penerapan HACCP. - Perhitungan nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi berdasarkan manual IKU menggunakan rumus sebagai berikut : $\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ dimana : $\bar{X}$ = Rata-rata $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, ..., n n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan - Hasil verifikasi Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi di Balai Besar KIPM Makassar dihitung oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP berdasarkan rumus di atas. Berdasarkan surat dari Kepala Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP nomor B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Penyampaian Capaian Kinerja Sistem Manajemen Mutu sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 maka Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai sebesar 90,96 dari target sebesar 75. Sehingga output kegiatan penerapan sistem manajemen mutu telah terealisasi sebesar 121,28 %.

- Sebagai perbandingan, capaian nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu dengan beberapa UPT BPPMHKP dapat disandingkan sebagai berikut :
 1. Balai Besar KIPM Surabaya II dengan nilai 91,30. Maka untuk perbandingan ini, masih lebih rendah dengan selisih 0,34 poin.
 2. Balai KIPM Mataram dengan nilai 84,18. Maka untuk perbandingan ini, Balai Besar KIPM Makassar lebih tinggi dengan selisih 6,78 poin.

Dari benchmarking tersebut diatas maka Balai Besar KIPM Makassar masih memerlukan perbaikan berkelanjutan terhadap indikator-indikator penilaian terutama pada indikator yang menjadi temuan ketidaksesuaian.
- Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 21 orang mulai dari Manager Puncak hingga inspektur mutu hasil perikanan yang telah memiliki nomor registrasi inspektur mutu dan/atau telah mengikuti pelatihan HACCP dasar.
- Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi ini mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.
- IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Kompeten dimana ASN dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas sesuai dengan tantangan yang ada. Dengan adanya perubahan tugas dan fungsi dalam penjaminan mutu hulu hingga hilir, ASN inspektur mutu dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan mengupdate regulasi-regulasi terbaru.
- Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar Triwulan IV tahun 2025 yang mengalami perubahan menjadi Rp. 27.304.000,- dari sebelumnya sebesar Rp. 3.500.000,- di Triwulan I Tahun 2025. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2025 meningkat sebesar 36,52% bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Hingga Triwulan IV Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu telah direalisasikan sebesar Rp. 27.254.000,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 50.000,- merupakan sisa anggaran dari kegiatan yang tidak terserap.
- Pada tanggal 25 November 2025 Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP melaksanakan Verifikasi Quality Management System untuk melihat konsistensi pelaksanaan SNI ISO/IEC 17020:2012 di Balai Besar KIPM dengan evaluator Martono dan Danar Kristiasari. Hasilnya terdapat 7 temuan yang telah dilakukan tindakan perbaikan pada tanggal 24 Desember 2025. Dari hasil verifikasi tersebut, lembaga inspeksi Balai Besar KIPM Makassar memperoleh penilaian 88,33 (sangat baik).
- Pada tanggal 26 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti Webinar Integrasi Sistem Manajemen Mutu yang diikuti oleh inspektur mutu Balai Besar KIPM Makassar untuk meningkatkan pemahaman inspektur mutu mengenai penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012 yang diintegrasikan dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO 9001:2015.
- Pada tanggal 1 – 2 Desember 2025 telah dilakukan re-akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 oleh Badan Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup Surveilans HACCP. Hasilnya terdapat 17 temuan penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012 dan 3 temuan penyaksian (witness). Tindakan perbaikan paling lambat harus diselesaikan pada tanggal 1 Februari 2026.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Sertifikat Akreditasi Lembaga Inspeksi Balai Besar KIPM Makassar SNI ISO/IEC 17020:2012 dengan nomor akreditasi LI-089-IDN telah dilakukan re-akreditasi. Terdapat 17 temuan penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012 dan 3 temuan witness lembaga inspeksi. Potensi masalah yang perlu diperhatikan adalah belum efektifnya tindak lanjut tindakan perbaikan temuan re-akreditasi yang memiliki tenggat waktu yang semakin dekat, yaitu tanggal 1 Februari 2026.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Melakukan penyelesaian temuan re-akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 sesegera mungkin sebelum tenggat waktu yang ditentukan.	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Berdasarkan rekomendasi tindak lanjut triwulan sebelumnya, telah dilakukan re-Akreditasi terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012 pada tanggal 1-2 Desember 2025.	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Makassar, 8 Januari 2026
 Penanggungjawab Indikator Kinerja



Muhammad Irfan Rais

LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN RE-AKREDITASI SNI ISO/IEC 17020:2012
TANGGAL 1 – 2 DESEMBER 2025



**LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN VERIFIKASI QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
PUSAT PENGENDALIAN MUTU BPPMHKP
TANGGAL 25 NOVEMBER 2025**



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (8)
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan IV 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggarannya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	92	92	92	92	92				<u>92</u>
Realisasi	100	97,28	97,28	96,42	94,58				
%Capaian	109	105,75	105,75	104,80	102,80				

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)	
DESKRIPSI Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi OM-SPAN. Penilaian IKPA diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Ruang lingkup : PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 mengatur mengenai pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objektif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA dan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh DJPB. Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja Pengukuran IKPA meliputi 3 aspek : 1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari: a. Revisi DIPA bobot 10 % b. Deviasi halaman 3 DIPA bobot 15% 2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari: a. Penyerapan anggaran bobot 20%	

- b. Belanja Kontraktual bobot 10%
 - c. Penyelesaian Tagihan bobot 10%
 - d. Pengelolaan UP dan TUP bobot 10%
 - e. Dispensasi Surat Perintah Membayar bobot 0%
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini adalah capaian output. Bobot capaian output adalah 25%.

Total Konversi Bobot pada Aspek pengukuran dan Indikator Kinerja pada TW IV Tahun Anggaran 2025 adalah 100%

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Capaian nilai IKPA Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 94,58 persen dari target 92 persen.

Capaian Kinerja IKPA diperoleh sebagai berikut:

Capaian kinerja IKPA = (Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran) / Konversi Bobot 100 %

Perhitungan perolehan dari Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran, Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan Indikator pendukung pada masing-masing adalah hasil perhitungan otomatis dari Aplikasi Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi Monev PA

Berikut tampilan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran Triwulan IV tahun 2025 pada Balai Besar KIPM Makassar.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sumber: Rengas : DA/SH/0000

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengalokasian UP dan TUP	Capaian Output					
1	136	002	407596	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100,00	77,96	96,48	80,00	100,00	100,00	100,00	94,58	100%	0,00	94,58	
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
					Nilai Akhir	10,00	11,68	19,60	8,00	10,00	10,00	25,00					
					Nilai Rata-rata	88,93		94,87				100,00					

Dibawah ini merupakan tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran:

- Tabel perbandingan capaian kinerja pelaksanaan anggaran TW III 2025 dan TW IV 2025

Indikator kinerja	Periode TW III 2025 (TQ4=92)		Periode TW IV 2025 (TQ4=92)	
	Bobot	Nilai Akhir	Bobot	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	10
Deviasi Hal III DIPA	15	11,56	15	11,68
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	20	19,86	20	19,9
Belanja Kontraktual	10	10	10	8
Penyelesaian Tagihan	10	10	10	10
Pengelolaan UP dan TUP	10	10	10	10
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	25	25	25
Dispensasi SPM (Pengurang)	0	0	0	0
Nilai Total	100	96,42	100	94,58
Nilai IKPA setelah konversi		96,42		94,58
Capaian (Realisasi/Target Q2)		104,80		102,80

Pada tabel diatas terlihat adanya penurunan nilai IKPA pada TW IV 2025 dibandingkan TW III 2025 sebesar 2 persen namun capaian realisasi masih melampaui target IKU 8 yang telah ditetapkan di awal tahun. Penurunan TW IV 2025 dipengaruhi oleh Belanja kontraktual.

Tidak maksimalnya realisasi Belanja Kontraktual pada IKPA bulan Desember 2025 disebabkan oleh adanya rencana kegiatan kontraktual pada tahun anggaran 2025 berupa pekerjaan penambahan daya listrik dari 23.000 VA menjadi 66.000 VA dengan nilai sebesar Rp68.820.000. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan karena adanya pertimbangan teknis dan penyesuaian kondisi lapangan yang menyebabkan pekerjaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 belum mencapai 100% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp10.350.854.000. Sisa anggaran yang tidak terserap terutama disebabkan oleh beberapa faktor administratif dan kebijakan yang berada di luar pelaksanaan program utama kantor Balai Besar KIPM Makassar. Yaitu:

1. Terdapat pagu anggaran yang diblokir sebesar Rp189.258.000 sehingga tidak dapat direalisasikan.
2. Terdapat pengembalian belanja pegawai berupa uang makan dan tunjangan kinerja, baik ASN maupun PPPK, dengan total pengembalian sebesar Rp101.672.000, yang merupakan hasil penyesuaian hak kepegawaian dan koreksi administratif.
3. Terdapat belanja yang tidak terealisasi akibat kebutuhan yang tidak jadi dilaksanakan, seperti kegiatan kalibrasi sebesar Rp9.314.000, akumulasi sisa belanja barang lainnya dalam jumlah relatif tidak material
4. Pembatalan kontrak penambahan daya listrik senilai Rp68.820.000 yang tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan teknis dan kehati-hatian pelaksanaan.

Secara keseluruhan, total anggaran yang tidak dapat diserap akibat blokir dan belanja tersebut hanya sekitar 3,7% dari total pagu, sehingga realisasi anggaran secara umum tetap mencerminkan kinerja pelaksanaan anggaran yang baik dan efektif.

- Tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran TW IV 2025 dan TW IV 2024

Indikator kinerja	Periode TW IV 2024 (TQ4=93,78)		Periode TW IV 2025 (TQ4=92)	
	Bobot	Nilai Akhir	Bobot	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	10
Deviasi Hal III DIPA	15	13,82	15	11,68
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	20	19,15	20	19,9
Belanja Kontraktual	10	9,2	0	8
Penyelesaian Tagihan	10	10	0	10
Pengelolaan UP/TUP	10	9,93	10	10
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	25	25	25
Dispensasi SPM (Pengurang)	0	0	0	0
Nilai Total	100	97,16	100	94,58
Nilai IKPA setelah konversi		97,16		94,58
Capaian (Realisasi/Target Q2)		103,60		102,80

Pada tabel diatas terlihat adanya penurunan nilai IKPA pada TW IV 2025 dibandingkan TW IV 2024 sebesar 0,8. Salah satu indikator penyebab penurunan tersebut terdapat pada indikator perencanaan anggaran Deviasi Hal III DIPA

SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 10 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK
- Surat Perintah Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor: B.005/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tgl 2 Januari 2025 dengan beranggotakan 1 Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

ANGGARAN dan ASPEK PEMANFAATANNYA

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan manajemen keuangan dan layanan perkantoran gaji dan tunjangan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan manajemen keuangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp23.450.000. Pagu pada kegiatan ini terblokir sepenuhnya.
- Layanan perkantoran gaji dan tunjangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp6.734.232.000 setelah revisi. Pada TW IV 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 6.632.028.852 atau 98,48 persen. Output dari layanan perkantoran gaji dan tunjangan adalah pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar.

Total pagu anggaran untuk mendukung capaian kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebesar Rp6.757.682.000 dengan realisasi anggaran 6.632.028.852 atau 98,14 persen. sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan IV 2024, kegiatan pada indikator kinerja ini hanya didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp9.468.000 Setelah revisi dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.440.000 atau 99,70 persen. terdapat penurunan realisasi anggaran pada Triwulan IV 2025. Hal ini disebabkan pada Triwulan IV 2025 pagu anggaran kegiatan layanan manajemen keuangan masih terblokir seluruhnya dan pagu anggaran sebagai pendukung pada indikator yang sama pada Triwulan IV 2024 sangat kecil.

PROGRAM NASIONAL

Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita.

LAMPIRAN KEGIATAN TRIWULAN IV 2025 IKU 8

- Tangkap Layar IKPA Triwulan IV 2025 pada Aplikasi Monev PA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sumber: Dokumen : 18/01/2025

No	Kode KPPN	Kode SA	Kode Subter	Uraian Subter	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dipenuhi SPN (Pengantar)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Realisasi DPA	Deviasi Haluan II DPA	Penyisipan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP	Capaian Output				
1	106	002	42758	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100.00	77.96	89.48	80.00	100.00	100.00	100.00	94.58	100%	0.00	94.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.68	19.90	8.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Rapor	88.93			94.87			100.00				

- Kegiatan penyusunan RPD yang dirangkaikan dengan Rapat Evaluasi dan Kegiatan Operasional tgl 19 Desember 2025



Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
Kurang optimalnya monitoring pelaksanaan belanja kontraktual

Rekomendasi rencana aksi Triwulan I 2026	Penanggung Jawab
- Melaksanakan monitoring belanja kontraktual melalui briefing pagi/sharing session antar pengelola anggaran di awal tahun untuk meminimalisir tidak terserapnya kegiatan belanja kontraktual di akhir tahun.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi Triwulan III 2025	Penanggung Jawab
- Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan RPD 2026 yang dirangkaikan dengan rapat evaluasi kegiatan operasional tgl 19 Desember 2025 - Pengelola anggaran telah memaksimalkan realisasi sesuai dengan RPD.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 6 Januari 2026
 Penanggungjawab Indikator Kinerja



Karwit, S.Pi

LAMPIRAN 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan IV 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	71,5	71,5		71,5	71,5		71,5		71,5
Realisasi	100	93,44		88,53	100				
%Capaian									

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4``

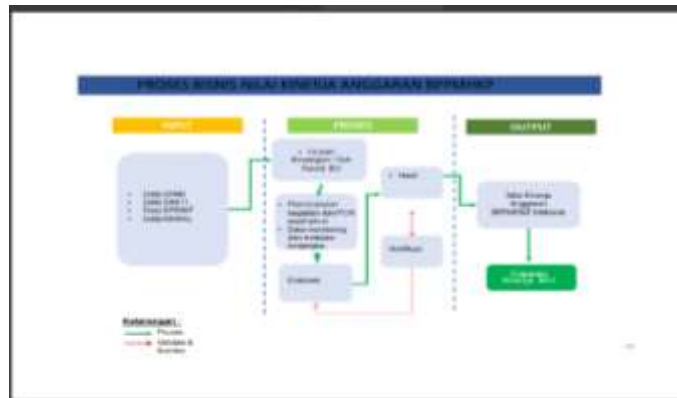
Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Menteri keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk: • Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan; • Penyusunan revidi angka dasar; • Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenan; dan • Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga; dan/atau pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar dan praktisi. Untuk memantau Nilai Kinerja Anggaran, Kementerian Keuangan telah membuat suatu aplikasi yaitu Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap organisasi dapat selalu memantau dashboard kinerja anggaran dan melakukan peningkatan pada aspek-aspek penunjang Nilai Kinerja Anggaran tersebut. Pada triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja ini antara lain : • Penyusunan revisi anggaran Aplikasi Monev Kementerian Keuangan pengukuran Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan pada 2 kategori yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya Nilai Kinerja Anggaran didasarkan dari 4 aspek yaitu Aspek Penyerapan, Konsistensi, Capaian realisasi Output, dan Nilai Efisiensi.

Berikut adalah proses bisnis terbentuknya data pada dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu



Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu

Penjelasan Dashboard Nilai Kinerja Anggaran Triwulan IV tahun 2025



1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 47,29 %
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 50 %

Nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 47,29% yang terlihat pada aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id> sudah dapat menjelaskan kondisi riil nilai kinerja perencanaan anggaran yang ada di Balai Besar KIPM Makassar. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id> sudah terupdate yang dibuktikan dengan statemen pada aplikasi yaitu "Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi".

Jika dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2025 anggaran sebesar 9,2% terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada Triwulan IV Tahun 2025 menjadi 47,29%. Hal ini disebabkan karena sudah optimalnya realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV sebesar 77,86% dibandingkan pada TW III anggaran sebesar 77,05%. Data detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian nilai perencanaan anggaran Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 100 persen dari target 71,5, dimana nilai perencanaan juga berintegrasi dengan nilai IKPA. Nilai tersebut tidak menggambarkan nilai sebenarnya, hal ini disebabkan karena adanya Nota Dinas dari Sekretaris Jenderal KKP Nomor: 138/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan IV TA 2025.



Untuk mendukung tercapainya IKU ini, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 9 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK

Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas Balai Besar KIPM Makassar.

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran dan layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan Perencanaan dan penganggaran
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 17.407.000,-. Pada TW IV 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 17.406.459,- Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.
- Layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 313.110.000,-. Pada TW IV 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 312.839.527,- Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.

Pada Triwulan IV Tahun 2025 terdapat buka blokir anggaran sebesar Rp. 1.620.576.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan dukungan manajerial (3987) sebesar Rp. 1.420.698.000, kegiatan

pengendalian dan pengawasan mutu (3989) sebesar Rp. 159.628.000 dan kegiatan manajemen mutu (7010) sebesar Rp. 40.250.000. Buka blokir anggaran berdampak positif terhadap kinerja anggaran Triwulan IV disebabkan anggaran yang tersedia dapat segera dibelanjakan sesuai kegiatan, program yang sempat tertunda akibat blokir anggaran dapat dilanjutkan dan diselesaikan tepat waktu serta target fisik dan manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Selain itu buka blokir anggaran menyebabkan ketidaksesuaian rencana penarikan dana yang telah disusun pada awal Triwulan.

Pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta cita.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Buka blokir anggaran akhir tahun belum terserap secara maksimal terutama di belanja 52;
- Buka blokir anggaran diakhir tahun berpotensi terjadinya pembelanjaan yang kurang efektif, tidak tepat sasaran dan ketidaksesuaian prioritas.

Rekomendasi rencana aksi triwulan I 2026	Penanggung Jawab
- Rapat/briefing terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran; - Identifikasi resiko buka blokir anggaran.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi TW IV Tahun 2025	Penanggung Jawab
- Briefing personil dukungan manajerial terkait percepatan penyerapan anggaran tanggal 22 Oktober 2025;	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 8 Januari 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja



Karwit, S.Pi

Dokumentasi Briefing Personil Dukungan Manajerial Terkait Percepatan Anggaran Tanggal 22 Oktober 2025



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator (10)	:	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan IV 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintah yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	100	100	100	100	100	100	100	-	<u>100</u>
Realisasi	100	100	100	100	100	100	-	-	-
%Capaian	100%	100%	100%	100%	100	100	-	-	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4``

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Deskripsi : Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemerisa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir; Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern; Indikator kinerja “Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)” dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut : $\% P = (A/B) \times 100\%$ Keterangan : %P = Persentase penyelesaian temuan; A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan; B = Nilai temuan BPK tahun 2025;

Pada triwulan IV tahun 2025 tidak terdapat pemeriksaan BPK, sehingga realisasi dari IKU ini dinilai mencapai 100%, jika dibandingkan TW III, TW II dan TW I 2025 yaitu 100% jadi Tahun 2025 ini capaian realisasinya 100%. Dengan demikian penyelesaian temuan BPK pada lingkup Balai Besar KIPM Makassar dinilai konsisten.

Kegiatan yang Dilaksanakan :

Pada triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan guna mendukung tercapainya indikator ini, yakni dengan melakukan pemeriksaan, verifikasi dan validasi terhadap seluruh bukti tagihan belanja untuk menentukan bahwa tagihan tersebut layak untuk dilakukan pembayaran. Dengan aktivitas tersebut diharapkan pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku sehingga tidak ada temuan dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional baik internal maupun eksternal;

Persentase penyelesaian temuan BPK mendukung Misi Asta Cita ke-7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan Korupsi dan Narkoba”. Hal ini karena dengan adanya IKU ini dapat mendorong instansi pemerintah dalam hal ini Balai Besar KIPM Makassar untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta mematuhi penyelesaian temuan BPK tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu “Akuntabel” ASN bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;
- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);

Pada TW IV tahun 2025 terdapat kegiatan audit BPK berdasarkan Surat Pemberitahuan BPK nomor 184/B/S/DJPKN-IV/PPA.02/11/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang akan dilaksanakan selama 30 hari sejak tanggal 24 November s/d 31 Desember 2025. Adapun lokasi sampling audit di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTT dan Kalimantan Barat. Provinsi Sulawesi Selatan tidak menjadi lokasi sampling audit tetapi mengumpulkan data Rekapitulasi Belanja Modal dan Belanja Barang Kontraktual TA 2025.

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja 3987.EBA.994.002.0C dan 0H adalah sebesar Rp. 196.283.000,- yang terdiri dari :

- Layanan Perkantoran, Perawatan Kendaraan Bermotor semula Rp. 135.310.000,- menjadi 141.683.000,-;
- Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu anggaran sebesar Rp. 54.600.000,-

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah direalisasikan anggaran Rp. 196.143.552,- atau 99.9% yang digunakan untuk Layanan perkantoran, Perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp. 141.564.319,- dan Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu sebesar Rp. 54.579.233,-

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Belum optimalnya Sistem pengendalian internal keuangan terkait verifikasi berjenjang

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan Tahun 2026	Penanggung Jawab
Melaksanakan rapat SPIP membahas verifikasi keuangan secara berjenjang;	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

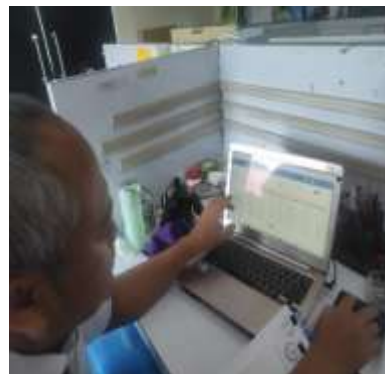
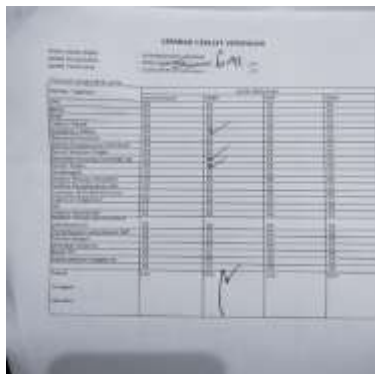
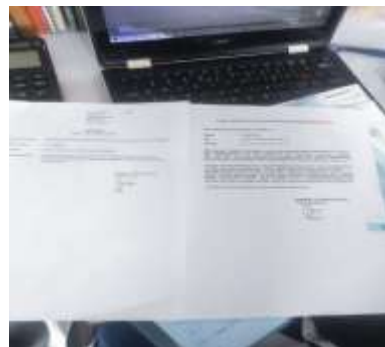
Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi TW III Tahun 2025	Penanggung Jawab
Telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh bukti tagihan belanja, dan dituangkan dalam lembar checklist;	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 8 Januari 2026
Penanggung Jawab,



Karwit

Dokumentasi : Kegiatan verifikasi keuangan BPPMHKP Makassar



LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) TW IV BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator (11)	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan IV

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target			81			87	87		87
Realisasi			85.96			87.97			
%Capaian			106			101			

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
DESKRIPSI Menurut UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi. 1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. 2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. 3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Target Tahunan IP ASN Tahun 2025 adalah 87 dengan periode pelaporan Semester I nilai target 81 dan Semester II nilai target 87.

Nilai Realisasi IP ASN sampai dengan triwulan IV 2025 adalah **87.97**

Dengan keterbatasan anggaran, TIM Kepegawaian Balai Besar KIPM Makassar berupaya melakukan pengembangan kompetensi ASN dengan Optimalisasi teknologi, perencanaan strategis dan kolaborasi.

❖ Optimalisasi teknologi

1. Cara Budi Daya Ikan yang Baik diikuti oleh 4 orang Inspektur Mutu Ahli Muda dan Ahli Pertama
2. Penggunaan aplikasi Portal KKP bagi PPPK diikuti oleh 1 orang PPPK
3. Growth Promotion Test as Microbiology iso 11133 diikuti oleh 13 orang ASN
4. Kupas Tuntas Soal Udang diikuti oleh 5 orang ASN
5. Penguatan sektor Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pembangunan ekonomi bali diikuti oleh 1 orang ASN
6. Radiation Awareness Dialogue on Aquatic diikuti oleh 8 orang ASN
7. Asistensi penilaian arsip usul musnah di lingkungan SKIPM Cirebon diikuti 2 orang ASN
8. Ketidakpastian pengukuran kualitatif dan Kuantitatif mikrobiologi diikuti oleh 12 orang ASN
9. Rakor Penyelamatan Arsip Kabinet Indonesia Maju dan Arsip Kemaritiman diikuti oleh 1 orang
10. Penanganan dan Pengelolaan Limbah Laboratorium diikuti oleh 1 orang ASN
11. Temu teknis sub jejaring Laboratorium pengujian pangan indonesia sektor Kelautan dan Perikanan diikuti oleh 2 orang ASN
12. ASEAN Training Workshop on Marine Biotxin diikuti oleh 1 orang ASN
13. Sosialisasi CDIB untuk penerbitan SPDI diikuti oleh 1 orang ASN
14. Basic & teknik Analisa dengan Instrument Atomic Absorption Spectrophotometer diikuti oleh 15 orang ASN
15. Pemahaman Integrasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, dan SNI ISO/IEC 17020:2012 diikuti oleh 5 orang ASN
16. Pemahaman Good Laboratory Practices diikuti oleh 3 orang ASN
17. SCS_E-Certificate_Monthly Microbiology Webinar diikuti oleh 1 orang ASN
18. Pemahaman Pengujian Proksimat (Kadar Air, Kadar Garam, dan Kadar Abu) pada Produk Hasil Perikanan diikuti oleh 11 orang ASN
19. Pemahaman Produksi Pakan serta Pengelolaannya dalam Mendukung Pembudidayaan Ikan diikuti oleh 14 orang ASN
20. Pemahaman Prinsip-prinsip Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), dan Jenis Obat Ikan dan Penggunaan yang Aman dan Efektif diikuti oleh 3 orang ASN
21. Seminar Diseminasi Hasil Laboratorium Acuan BUSPM diikuti oleh 2 orang ASN
22. Inovasi Produksi Pakan Alami Perikanan Budi Daya diikuti oleh 1 orang ASN
23. Forum Konsultasi Publik Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi yang dikecualikan KKP diikuti oleh 2 orang ASN
24. Budaya Kerja ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan diikuti oleh 2 orang ASN
25. Panduan Praktis Mengoptimalkan Pajak UMKM diikuti oleh 1 orang ASN
26. Peningkatan Produksi Udang Windu berbasis Ekosistem ISPIKANI diikuti oleh 8 orang ASN
27. FGD Pengembangan Budi Daya Rumput Laut diikuti oleh 7 orang ASN

❖ Perencanaan strategis dan kolaborasi :

1. Pelatihan HACCP Dasar dalam rangka mendukung kontaminasi pencegahan Cesium-137 diselenggarakan Pusat Mutu Pasca Panen bekerjasama dengan BPPSDM yang diikuti oleh 1 orang ASN
2. Pelatihan pembentukan Inspektur Mutu (Noreg) diselenggarakan Pusat Mutu Pasca Panen bekerjasama dengan BPPSDM diikuti oleh 1 orang ASN
3. Badan Mutu KKP Makassar berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Penataran Peserta Magang Batch III yang diselenggarakan oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros

4. Badan Mutu KKP Makassar gelar forum konsultasi publik, dengan narasumber dari Badan Mutu KKP Makassar, Ombudsman RI Perwakilan Sulsel dan Bank Papua cabang Makassar
5. Badan Mutu KKP Makassar menjadi salah satu narasumber kegiatan penyadartahuan publik dalam Peringatan Hari Ikan Nasional dengan tema “Konsumen Cerdas : Penuhi Gizi, Laut Lestari” yang diselenggarakan oleh Marine Buddies Makassar
6. Dinas Perikanan Kabupaten Bone bekerja sama dengan Badan Mutu KKP Makassar melaksanakan kegiatan Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal sebagai narasumber
7. Badan Mutu KKP Makassar bekerja sama dengan Bank Papua Cab.Makassar melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada level UMKM dan Supplier sebagai narasumber
8. Badan Mutu KKP Makassar mengikuti kegiatan Sosialisasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan Certificate of Admissibility (CoA) Perikanan Tangkap yang dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Untia
9. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar menghadiri kegiatan Forum Ilmiah Kepiting Berkelanjutan dengan tema “Masa Depan Kepiting: Inovasi Keberlanjutan” yang diselenggarakan oleh Pusat Kolaborasi Riset Kepiting Berkelanjutan Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
10. Dinas Perikanan Kabupaten Bone bekerja sama dengan Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Makassar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal
11. Badan Mutu KKP Makassar mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pusat Kolaborasi Riset Shrimp Tech Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan Universitas Hasanudin bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros
12. Badan Mutu KKP Makassar menjalin kerja sama dengan lembaga Balla Inklusi dengan kegiatan pelayanan publik yang ramah bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas

Peningkatan kompetensi menjadikan budaya kerja berupa sikap dan perilaku Aparatur Sipil negara untuk melaksanakan tugas sesuai pelatihan/keterampilan yang telah dimiliki. Pelatihan yang dilaksanakan akan menambah wawasan yang akan merubah pola pikir dalam menyesuaikan diri dengan perubahan jangka pendek dan jangka panjang sehingga bisa menangani masalah atau tugas yang tidak terduga secara efektif.

Indikator Nilai IP ASN tercapai selain pengembangan kompetensi sebagai berikut :

1. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN BBKIPM Makassar, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 = -
 - b. Pendidikan S-2 :
 - S2 Keahlian : 7 orang :
 1. Ir Habrin Yake, M.M
 2. Andi Rahmaniar Dj, ST.,M.Si
 3. Kamaruddin, S.P, M.S
 4. Kamdani, S.Pi, M.M
 5. Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P
 6. Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi., M.Sc
 7. Fatima Tayang, S.St.Pi, MM
 13. S2 Pelaksana : 1 orang
 1. Rahma Tenri Aben
 - c. Pendidikan S-1 /D-IV :
 - S-1 /D-IV Keahlian : 12 orang
 1. Waode Suharni, S.Pi
 2. Bakhtiar, S.Pi
 3. Moh. Fahri, S. Pi
 4. Wara Zakaria Sapan, A.PI
 5. Muhammad Irfan Rais, S.Pi
 6. Patmawati M, S.St.Pi
 7. Erlina Kadang, S.Kom

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Sebagai perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Balai Besar KIPM Jakarta I dengan nilai IP ASN 84.89 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 87.97 masih lebih tinggi dengan selisih 3.08

BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	16	2312	92.48%	3177	79.42%	25	83.33%	5	100%	84.89	TINGGI
----------------------------	----	------	--------	------	--------	----	--------	---	------	-------	--------

2. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Pesisir dan Pulau Pulau kecil dengan nilai IP ASN 83.63 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 87.97 masih lebih tinggi dengan selisih 4.34

DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	44	2352	94.08%	2893	72.32%	2591	86.37%	5	100%	83.66	TINGGI
---	----	------	--------	------	--------	------	--------	---	------	-------	--------

Sumber data : <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/1296> pertanggal 4 Januari 2026

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN

Balai Besar KIPM Makassar, mempunyai SDM Aparatur Sipil Negara sebanyak 37 Pegawai yang sebelumnya 34 pegawai, pegawai mutasi masuk sebanyak 3 orang yang UPT sebelumnya Adalah Stasiun KIPM Palu, Stasiun KIPM Ternate dan Stasiun KIPM Kendari

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Subbagian Umum	1
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
7.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	3
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2
10.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
11.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1
12.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	1
13.	Pelaksana	10
	Total	37

Anggaran

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2024 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 77.285.000
- Anggaran Setelah revisi sebesar Rp. 73.833.000
- Realisasi Rp. 73.434.365 (99.46%)

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2025 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 18.064.000
- Anggaran setelah blokir Rp. 0

Triwulan IV

- Anggaran Setelah Blokir sebesar Rp.8.600.000
- Realisasi Rp. 8.542.000 (99.32%)

Program Nasional

Pada indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar KIPM Makassar memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita, dengan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara akan meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan publik.

Aspek Pemanfaatan

Kompetensi ASN Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar bermanfaat bagi kemajuan organisasi dan individu, IP ASN merupakan area pengembangan diri dalam Upaya peningkatan profesionalitas sebagai ASN dan IP ASN sebagai kontrol sosial agar ASN bertindak professional dalam kaitan pelayanan publik.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Potensi permasalahan dapat timbul dengan adanya pengurangan alokasi anggaran yang dapat berdampak pada peningkatan kompetensi pegawai khususnya untuk pelatihan yang membutuhkan pertemuan klasikal dan praktek langsung.
- Kesadaran ASN dalam mengentry data sertifikat pada aplikasi MyASN tepat waktu perlu ditingkatkan

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya

Penanggung Jawab

- Aparatur Sipil Negara mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi secara luring dan daring
- Pelatihan dengan pemanfaatan Sumberdaya internal

Ketua TIM Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
1. Aparatur Sipil Negara telah mengikuti Pelatihan secara daring dengan dibuktikan nilai IP ASN yang meningkat. 2. Penyampaian update sertifikat pada aplikasi MyASN di Whatsapp group	Ketua TIM Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 6 Januari 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Karwa

DOKUMENTASI NILAI IP ASN

Pada <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/1296>

The screenshot shows a web application titled "IP ASN 2025" with a navigation bar containing "Dashboard", "Ekstensi", "Pegawai", "FAQ", and "IP ASN 2024". The main content area displays a table with the following data:

ID	IP Range	Status
1	192.168.1.1/24	TNGG
2	192.168.1.2/24	TNGG
3	192.168.1.3/24	TNGG
4	192.168.1.4/24	TNGG
5	192.168.1.5/24	TNGG
6	192.168.1.6/24	TNGG
7	192.168.1.7/24	TNGG
8	192.168.1.8/24	TNGG
9	192.168.1.9/24	TNGG
10	192.168.1.10/24	TNGG
11	192.168.1.11/24	TNGG
12	192.168.1.12/24	TNGG

Dengan rincian per pegawai

IP ASN 2025														
#	Nama	Kualifikasi			Kompetensi					Etnika		Disiplin		TGTSL
		Reguler Pendidikan	IP	Keterampilan	Etika dan Perilaku	Etika Teknis	Etika dan IP	IP	Praktik Kerja	IP	Integritas	Disiplin	IP	
1	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
2	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
3	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
4	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
5	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
6	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
7	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
8	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
9	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
10	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
11	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
12	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
13	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
14	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
15	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000

IP ASN 2025														
#	Nama	Kualifikasi			Kompetensi					Etnika		Disiplin		TGTSL
		Reguler Pendidikan	IP	Keterampilan	Etika dan Perilaku	Etika Teknis	Etika dan IP	IP	Praktik Kerja	IP	Integritas	Disiplin	IP	
16	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
17	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
18	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
19	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
20	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
21	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
22	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
23	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
24	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
25	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
26	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
27	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
28	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
29	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000
30	Andriani	5.0	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10000

Lampiran 12. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan IV tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	86	86	86	86	86	86	86		86
Realisasi	49,61	71,5	71,5	80,25	90	90	90		
%Capaian	57,68	83,13%	83,13%	93,31 %	104.65	104.65	104.65		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4``

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu : 1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 % Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa : Renstra 2025-2029, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi. Yang sudah dilaksanakan sampai triwulan IV tahun 2025 yaitu : penyusunan RKAKL dan Rencana Aksi Renja dan Renstra mencapai 30 %. 2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 % Pengukuran Kinerja ini telah terselesaikan Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa : Penyusunan Manual IKU tahun 2025 yang telah diselesaikan pada triwulan I terealisasi mencapai 30%

3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %

Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2025, dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Kinerja Triwulan I , Triwulan II, Triwulan III, triwulan IV dan Tahunan.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah disampaikan Laporan Kinerja Triwulan I , II, III, dan IV sehingga realisasi tercapai 15 %

4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai Besar KIPM Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai Besar KIPM Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja . Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerjaku yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan evaluasi kinerja secara internal dan eksternal realisasi tercapai 25 % .

Bobot realisasi capaian :

= Parameter 1 (30 %) + parameter 2 (30 %) + parameter 3 (15 %) + parameter 4 (25 %)
= 100 %.

Realisasi capaian = $\frac{\text{Bobot realisasi capaian}}{\text{Target}} \times 100 \%$

$$\begin{aligned} &= \frac{100}{86} \times 100 \\ &= 116,27 \% \end{aligned}$$

Namun dilihat dari Aplikasi Kinerjaku dan Surat Kepala Badan BPPMHKP Nomor Surat 1/BPPMHKP.1/RC.610/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA. 2025 UPT lingkup BPPMHKP, terdapat perbedaan hasil penilaian yaitu 90 (A), dengan rincian sebagai berikut :

No	Parameter	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	27
2.	Pengukuran Kinerja	30	27
3	Pelaporan Kinerja	15	13,5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,5
Jumlah			90

Dengan demikian untuk kinerja AKIP diperlukan upaya peningkatan kinerja pada semua parameter kinerja.

Adapun pencapaian indikator ini Triwulan IV tahun 2025 yaitu 90 (A) ini melebihi dari target 86 sehingga capaian kinerja iku ini 104,65 %. Jika dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2025 yaitu 93,31 %, mengalami peningkatan sebesar 11.34 %. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan IV tahun 2024 yaitu 102.19 % maka tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2.46 %.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan IV adalah :

1. Telah melakukan penginputan data dukung rencana aksi triwulan III pada aplikasi kinerjaku berupa pagu anggaran yang mendukung setiap indikator, realisasi anggaran, masalah, rekomendasi dan tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, penginputan data dukung tersebut dilakukan setiap triwulanan.
2. Tanggal 13 Oktober 2025 finalisasi Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025-2029.
3. Tanggal 28 November 2025 telah dilakukan penilaian kinerja AKIP dari Sekretariat Badan BPPMHKP dan telah dilakukan perbaikan LKE pada Aplikasi Kinerja untuk Penilaian Mandiri SAKIP.

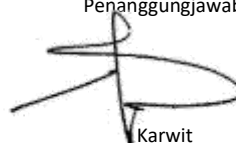
- Penilaian Mandiri SAKIP mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu “ Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini disebabkan karena dengan adanya penilaian mandiri sakis dapat meningkatkan output dari program kegiatan yang terdapat dalam Tugas dan Fungsi Balai Besar KIPM Makassar. - IKU ini mendukung terciptanya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu “Akuntabel” ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, hal ini disebabkan karena setiap pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi dipertanggungjawabkan secara tertulis dan disertai dengan dokumentasi kegiatan yang detail dan lengkap. Untuk pemanfaatan melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 42.795.000 yang mengalami blokir sebanyak 100 %. jika dibandingkan pemanfaatan anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dengan pagu Rp 38.668.000,- teralisasi anggaran sebesar sebesar Rp 38.655.199 atau 99.96 % - Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)
--

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
- Potensi masalah dapat terjadi jika monitoring terhadap capaian kegiatan tidak berjalan optimal

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Melakukan monitoring output kegiatan dan realisasi anggaran	Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Briefing personil dukungan manajerial terkait percepatan penyerapan anggaran tanggal 22 Oktober 2025;	Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 9 Oktober 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja



Karwit

DOKUMENTASI KEGIATAN



LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator (13)	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan IV

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tatakelola pemerintahan yang Efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	85	85	85	85	85	85	85		85
Realisasi	100	94,12	94,12	100	100	100	100		
% Capaian	117,65	110.73	110.73	117,65	117,65	117,65	117,65		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan= Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Diskripsi :

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makassar berdasarkan LHP dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh unit kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan pada unit kerja}} \times 100 \%$$

Kegiatan yang Dilakukan :

Pada triwulan IV tahun 2025 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga realisasi indikator kinerja ini mencapai 100. Jika dibandingkan dengan pencapaian nilai Indikator Kinerja pada triwulan yang sama pada Tahun 2024 sama-sama mencapai nilai 100. Demikian pula jika dibandingkan dengan periode sebelumnya triwulan III tahun 2025 realisasi indikator kinerja ini mencapai 100.

Anggaran :

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan anggaran dari DIPA Tahun 2025 pada mata anggaran 3987.EBA.994.002.0A, 3987.EBA.994.002.0G dan 3987.EBA.994.002.0I, dengan pagu anggaran semula Rp. 1.850.843.000,- setelah adanya revisi anggaran menjadi Rp.2.064.505.000,- yang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.2.060.401.068,- atau 99,80% yang digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, belanja honor output kegiatan, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

Jika dibandingkan alokasi anggaran pada triwulan IV tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 822.011.000,- maka terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 60,18%. Demikian pula dengan besaran persentase penggunaan anggaran jika dibandingkan dengan periode yang sama triwulan IV tahun 2024 yang hanya mencapai 86,30%.

Sumberdaya Manusia :

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang.

Program Nasional, Budaya Kerja dan Pemanfaatan :

Indikator kinerja ini jika tercapai maka akan mendukung keberhasilan program prioritas KKP maupun Program Prioritas Nasional Asta Cita. Indikator kinerja ini secara spesifik mendukung Program Prioritas Nasional Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”.

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja Ber-AHLAK di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu “Akuntabel” dimana ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Tercapainya target kinerja ini mencerminkan bahwa organisasi telah melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan dengan akuntabel dan tepat waktu.

Aspek pemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan IKU ini yaitu memberikan informasi mengenai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, sehingga dapat mengambil tindakan dan Keputusan secara cepat, tepat dan akurat.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Operator SIDAK melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Itjen secara berkala.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
- Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Itjen pada aplikasi SIDAK periode Triwulan IV Tahun 2025.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

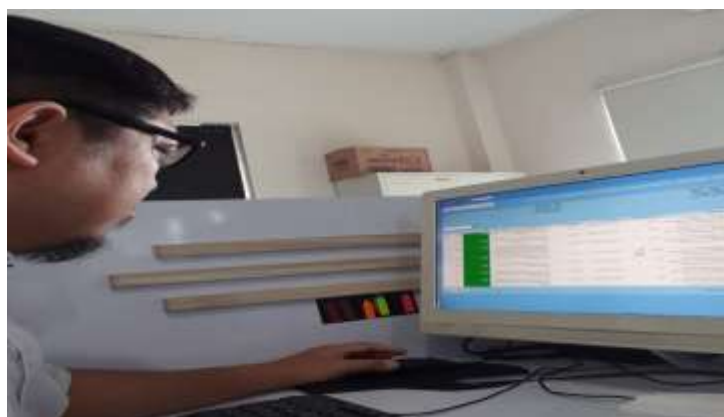
Makassar, 09 Januari 2026
 Penanggungjawab Indikator
 Kinerja

Karwit

Tampilan layar pada aplikasi SIDAK
<https://sidak.kkp.go.id/beranda/9/373>



ID	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tanggal Masuk	Alamat	Status	Kategori
100	Adi Nugroho Pratomo	L	1998-01-01	2020-01-01	Jl. Sudirman No. 100, Jakarta	Baru	Baru
101	Budi Santoso	P	1995-03-15	2020-01-01	Jl. Diponegoro No. 50, Semarang	Baru	Baru
102	Citra Lestari	P	1999-05-20	2020-01-01	Jl. Veteran No. 25, Surabaya	Baru	Baru
103	Dani Pratomo	L	1997-08-10	2020-01-01	Jl. Pahlawan No. 15, Bandung	Baru	Baru
104	Eva Nurhidayah	P	1996-11-05	2020-01-01	Jl. Merdeka No. 30, Yogyakarta	Baru	Baru
105	Fajar Nugroho	L	1998-02-28	2020-01-01	Jl. Satrio No. 40, Jakarta	Baru	Baru
106	Gita Lestari	P	1999-04-12	2020-01-01	Jl. Sudirman No. 60, Jakarta	Baru	Baru
107	Hani Pratomo	L	1997-06-03	2020-01-01	Jl. Diponegoro No. 70, Semarang	Baru	Baru
108	Irena Santoso	P	1996-09-18	2020-01-01	Jl. Veteran No. 80, Surabaya	Baru	Baru
109	Jaka Nugroho	L	1998-12-01	2020-01-01	Jl. Pahlawan No. 90, Bandung	Baru	Baru
110	Kiki Lestari	P	1999-01-25	2020-01-01	Jl. Merdeka No. 100, Yogyakarta	Baru	Baru



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Tim Kerja	:	Dukungan Manajemen
Periode Laporan	:	Triwulan IV

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja (14)	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	76	76	76	76	76	76	76	76	76,00
Realisasi	99,06	100	100	100	100	100	100	100	
% Capaian	130,34	131,57	131,57	131,57	131,57	131,57	131,57	131,57	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Dengan adanya kebijakan pemanfaatan anggaran yang posisi Blokir anggaran pengadaan barang/ jasa (<i>lock pagu</i>) pada triwulan IV sehingga pagu anggaran Rencana Umum Pengadaan (RUP) mengalami perubahan atau peningkatan yang semula pada triwulan III sebesar Rp. 2.892.982.000,- menjadi Rp. 3.241.329.000,-. Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%) menggunakan rumus sebagai berikut : $\text{Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Rp. 3.242.871.000}}{\text{Rp. 3.242.871.000}} \times 100\% = 100\%$ Dengan demikian realisasi IKU pada triwulan IV adalah sebesar 100 % dari target 76 % atau capaiannya sebesar 131,57 %. Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan III sebesar 131,57 %. Jadi untuk capaian realisasi Rencana Umum Pengadaan pada triwulan III dan triwulan IV yang nilai pagu paket yang diinput dengan nilai yang diumumkan adalah sama.

- Paket Penyedia sebanyak 7 kegiatan Manajemen Mutu dengan jumlah anggaran Rp. 164.750.000,-
- Paket Penyedia sebanyak 10 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 16.368.000,-
- Paket Penyedia sebanyak 31 kegiatan Dukungan Manajemen Internal dengan jumlah anggaran Rp. 2.992.933.000,-
- Paket E-Purchasing sebanyak 1 kegiatan Dukungan Manajemen Internal dengan jumlah anggaran Rp. 68.820.000,-

No.	Kode	Nama Program	Pagu Program (Rp.)	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu terumumkan (Rp.)	Selish (Rp.)	Persentase
1	EC	Program dan Nilai Tambah Daya Saing Industri	403,122,000	195,558,000	181,118,000	14,440,000	92.62 %
2	WA	Program Dukungan Manajemen	3,213,500,000	3,061,753,000	3,061,753,000	0	100 %

The screenshot shows the SRUP (Sistem Rujukan dan Pengiraan) web application. The header includes the SRUP logo and navigation links: Rujukan, RUP, Cari Paket, Rujukan Data, Statistik, Rujukan, ENQ, Berita, Dashboard, Kertas Kerja, and Rujukan. The main content area displays a table of program data with columns: No, Kode, Nama Program, Rujukan Program, Rujukan Pengiraan, Rujukan Kertas Kerja, Jumlah, and Persentase. Two rows of data are visible: 1. EC, Program Rujukan dan Pengiraan, 400,000,000, 100,000,000, 100,000,000, 100,000,000, 100.00%. 2. NA, Program Rujukan dan Pengiraan, 400,000,000, 100,000,000, 100,000,000, 100,000,000, 100.00%.

- Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP pada tanggal 24 s.d 25 November 2025;

- Mengikuti Desiminasi Pencatatan RUP untuk Tahun Anggaran 2026 Lingkup KKP

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2025 sebanyak 7 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).

Pada triwula IV telah dilakukan pergeseran/ revisi anggaran sehingga Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp. 110.652.000,- yang terdiri dari :

1. 3987.EBA.994, 002.OE Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja = Rp. 37,152,000,-
2. 3987.EBA.994, 002.OF Kesehatan dan Daya Tahan Tubuh = Rp. 73.500.000,-

Pada triwulan IV 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. 110.650.000,- dengan persentase 99,99 %.

Indikator Kinerja Utama ini tidak bisa dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2024 karena IKU ini merupakan IKU baru di Tahun Anggaran 2025.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis Web (*Web based*) mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu “ Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini disebabkan karena dengan adanya aplikasi SIRUP maka transparansi pada pengelolaan sistem pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, masyarakat dapat secara langsung mengakses pengadaan barang dan jasa.

Manfaatnya sebagai berikut :

1. SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
2. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.
3. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.
4. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/sirup;
5. Untuk mengukur akuntabilitas dan tranparansi Balai Besar KIPM Makassar dalam pengadaan barang/ jasa

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah : Update perubahan kegiatan dan anggaran (revisi) belanja pengadaan barang dan jasa tidak tersampaikan ke bagian admin pengelola aplikasi SIRUP.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Setiap perubahan kegiatan dan anggaran pengadaan (revisi) disampaikan atau dikomunikasikan dengan pengelola aplikasi SIRUP	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Operator telah menginput data kegiatan dan anggaran dalam portal SIRUP.go.id dengan cermat dan lebih teliti sehingga nilai paket pengadaan yang diinput sesuai dengan nilai paket yang terumumkan	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Makassar, 7 Januari 2026
Penanggung jawab Indikator



Karwit, S.Pi

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) TRIWULAN IV – 2025

REUP RENCANA UMUM PENGADAAN

TAKWIM ANGGARAN 2025

KUPE	Kementerian Dalam Negeri
Instansi Kerja	Biro Kerja Kantor dan Pengadaan Ruk. dan Keuangan
PAKTA	Ministerial Control S.P. WF

REUP RENCANA UMUM PENGADAAN

REUP RENCANA UMUM PENGADAAN

REUP RENCANA UMUM PENGADAAN									
REUP RENCANA UMUM PENGADAAN									
REUP RENCANA UMUM PENGADAAN									
REUP RENCANA UMUM PENGADAAN									
REUP RENCANA UMUM PENGADAAN									
REUP RENCANA UMUM PENGADAAN									
REUP RENCANA UMUM PENGADAAN									
REUP RENCANA UMUM PENGADAAN									
REUP RENCANA UMUM PENGADAAN									
REUP RENCANA UMUM PENGADAAN									

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

Source: *International Journal of Health Services*, 1990, 20(1), 10-20.

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

FOTO DOKUMENTASI INPUT DATA RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)



FOTO DOKUMENTASI MENGIKUTI DESIMINASI PENCATATAN RUP TAHUN ANGGARAN 2026 LINGKUP KKP



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator (15)	:	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Tim/ja	:	Timja Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan IV Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian 2025	Target 2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	-	-	-	-	-	75	75	-	75
Realisasi	-	-	75,19	75,19	75,51	75,51	75,51	75,51	-
% Capaian	-	-	100,25	100,25	101,68	100,68	101,68	100,68	-

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Tw.1, Tw.2, Tw.3 dan Tw.4;

Sm.1 = Capaian Q1 + Capaian Q2;

Sm.2 = Capaian Q3 + Capaian Q4;

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025;

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)
Deskripsi : - Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima; - Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, perlu melakukan pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja di instansi pemerintah; - Balai Besar KIPM Makassar telah menyandang predikat WBK sejak tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2018. Untuk mempertahankan predikat tersebut, maka Balai Besar KIPM Makassar harus konsisten dalam penerapannya khususnya penanaman nilai-nilai integritas kepada seluruh jajaran pegawai Balai Besar KIPM Makassar beserta <i>stakeholder</i> yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; - Sesuai surat Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.360/BPPMHKP.1/OT.720/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal Persiapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan PPMHKP Tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar bersama 4 UPT lainnya ditetapkan sebagai unit kerja yang akan dilakukan penilaian implementasi WBK dan WBBM oleh TPI (Tim Penilai Internal) KKP Tahun 2025-2026; - Target indikator kinerja ini bersifat tahunan, sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah diperoleh hasil penilaian dari BPPMHKP. Berdasarkan penilaian dari tim penilai internal BPPMHKP diperoleh nilai total 75,19 atau 100,25% dari target, yang terdiri dari komponen pengungkit 37,16 dan komponen hasil 38,03.

Kegiatan yang Dilaksanakan :

- Pada triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai wujud implementasi zona integritas WBK pada Balai Besar KIPM Makassar, diantaranya adalah :
 - (a) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa penataan ruang pelayanan dan ruang tunggu, penataan papan informasi digital, dan pemasangan poster pengelolaan pengaduan;
 - (b) Melaksanakan apel pagi setiap hari Senin yang dipimpin oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar atau pejabat lain yang ditunjuk. Pada apel pagi tersebut disampaikan himbauan penerapan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai, penerapan nilai-nilai kebangsaan dan internalisasi ASN Ber-AKHLAK;
 - (c) Guna meningkatkan kualitas pelayanan khususnya untuk pelanggan berkebutuhan khusus, pada tanggal 8 Oktober 2025 dilakukan sosialisasi “Etika Berinteraksi untuk Penyandang Disabilitas” dengan nara sumber dari Balla Inklusi Makassar yang diikuti oleh seluruh pegawai. Pada sosialisasi tersebut dipaparkan materi dan dipraktikkan teknik melayani pelanggan berkebutuhan khusus dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab untuk pendalaman terhadap materi yang disampaikan. Pada akhir sesi dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar KIPM Makassar dengan Balla Inklusi Makassar;
 - (d) Pada bulan Oktober 2025 beberapa pegawai yang terpilih telah melakukan pengisian SPI (Survei Penilaian Integritas) yang dilaksanakan oleh KPK. Tujuan SPI tersebut adalah untuk memetakan risiko korupsi, mengukur tingkat integritas di instansi publik (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah), dan mendorong perbaikan sistem pencegahan korupsi agar pelayanan publik lebih bersih, transparan, dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi publik (pegawai, pengguna layanan, dan ahli);
 - (e) Pada tanggal 14 Oktober 2025 telah dilakukan briefing bagi petugas pelayanan oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar yang diikuti oleh seluruh pegawai yang bertugas dalam pelayanan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam briefing tersebut disampaikan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan petugas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima serta menghindari adanya komplain dari pelanggan;
 - (f) Pada tanggal 22 Oktober 2025 dilaksanakan briefing pegawai lingkup Dukungan Manajemen oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar. Tujuan dilaksanakannya briefing adalah untuk menyelaraskan pemahaman, memberikan instruksi atau arahan, meningkatkan motivasi kerja pegawai serta memastikan bahwa koordinasi di tingkat tim dukungan manajemen terjalin dengan baik guna mendukung kinerja organisasi;
 - (g) Pada tanggal 3 November 2025 dilaksanakan internalisasi oleh tim agen perubahan dengan tema “Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja”. Pada internalisasi tersebut disampaikan pola pikir yang merupakan pergeseran cara pandang, sikap mental, dan keyakinan dasar seseorang atau organisasi untuk menjadi lebih konstruktif, adaptif, dan profesional, sementara perubahan budaya kerja diartikan sebagai transformasi nilai, kebiasaan, perilaku, dan praktik kerja kolektif dalam organisasi agar selaras dengan tujuan baru, yang keduanya sering kali dilakukan bersamaan untuk meningkatkan integritas, kinerja, dan pelayanan;
 - (h) Pada tanggal 26 November 2025 dilakukan sosialisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPPMHKP dengan nara sumber Inspektorat IV Inspektorat Jenderal KKP yang diikuti peserta dari UPT lingkup BPPMHKP. Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan tersebut secara daring. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan seluruh pegawai lingkup BPPMHKP dapat memahami dan menerapkan kebijakan pengelolaan konflik dan pengendalian gratifikasi sesuai regulasi yang berlaku;
 - (i) Pada bulan Desember 2025, Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dengan sasaran 24 orang responden para pengguna layanan. Survey tersebut bertujuan untuk memetakan persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan publik dan penerapan WBK pada Balai Besar KIPM Makassar. Hasil yang dicapai adalah (1) Nilai : 95,55; (2) Mutu Pelayanan : A; dan (3) Kinerja Unit Layanan : Sangat Setuju;
 - (j) Pada tanggal 4 Desember 2025 Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan dengan tujuan untuk menyusun standar pelayanan serta momentum untuk memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan mutu dan keamanan hasil perikanan. Peserta dalam forum tersebut berasal dari instansi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, unsur Pemerintah Daerah, akademisi, asosiasi usaha perikanan, LSM dan media massa;
 - (k) Pada tanggal 22 Desember 2025 bertepatan dengan Hari Ibu, dilakukan sosialisasi oleh tim agen perubahan dengan tema “Disiplin dan Pengembangan Diri”. Pada sosialisasi disampaikan betapa pentingnya disiplin dan pengembangan diri guna menunjang kinerja organisasi. Tujuan disiplin dan pengembangan diri adalah untuk membangun kehidupan yang teratur, produktif, dan memuaskan

dengan menciptakan kebiasaan baik, meningkatkan fokus, serta memperkuat karakter untuk mencapai tujuan hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, memperbaiki hubungan, dan membangun ketahanan diri menghadapi tantangan. Keduanya saling melengkapi, di mana disiplin menjadi fondasi untuk terus berkembang secara pribadi dan profesional, sementara pengembangan diri memberikan alat untuk memperkuat disiplin tersebut menuju kesuksesan;

- Perhitungan nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebagai berikut :
 - (1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
 - (2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
 - (3) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,50 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,00;
 - (4) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15,00;
 - (5) Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP;

Sumberdaya Manusia :

- Sumberdaya manusia yang terlibat dalam penerapan kinerja ini adalah seluruh pegawai lingkup Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 60 orang, yang terdiri dari ASN (PNS 37 orang, PPPK 12 orang, PPPK Paruh Waktu 6 orang) dan non ASN 5 orang;

Anggaran :

- Alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja ini pada tahun 2025 semula sebesar Rp. 12.489.000,-, namun setelah adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah, anggarannya dialihkan menjadi Rp. 0,-. Anggaran untuk operasional zona integritas WBK menyatu dengan anggaran keperluan perkantoran.

Program Nasional :

- Penerapan zona integritas WBK merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini berarti Asta Cita ke 7 fokus pada peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang adil dan upaya berkelanjutan dalam pemberantasan korupsi dan pemberantasan narkoba. Asta Cita ke 7 juga sejalan dengan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan makanan dan susu gratis di sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan produktivitas lahan pertanian;
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir, Balai Besar KIPM Makassar secara konsisten telah menerapkan zona integritas WBK. Hal ini dapat mendukung terwujudnya program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan ke 3 “Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, serta ke 4 “Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”.

Aspek Pemanfaatan :

- Penerapan nilai-nilai integritas menuju WBK pada suatu unit kerja memiliki berbagai manfaat, yakni :
 - (a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
 - (b) Mencegah terjadinya korupsi;
 - (c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
 - (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - (e) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
 - (f) Meningkatkan reputasi instansi pemerintah;
 - (g) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024;

Target indikator kinerja ini bersifat tahunan. Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Badan PPMHKP Nomor B.179/BPPMHKP.1/OT.710/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 Hasil Penilaian ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 diperoleh nilai total 75,51 atau 100,68% dari target 75, yang terdiri dari komponen pengungkit 37,48 dan komponen hasil 38,03. Rekapitulasi hasil penilaian tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

No.	Unsur	Bobot Nilai	Perolehan Nilai	%
1	2	3	4	5
A.	Pengungkit :	60,00	37,48	
I.	Pemenuhan :	30,00	27,61	92,02
1	Manajemen Perubahan	4,00	3,55	88,63
2	Penataan Tatalaksana	3,50	2,92	83,33
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,36	87,16
4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	4,57	91,38
5	Penguatan Pengawasan	7,50	7,22	96,25
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00	100,00
II.	Reform :	30,00	9,88	32,92
1	Manajemen Perubahan	4,00	3,17	79,17
2	Penataan Tatalaksana	3,50	2,33	66,62
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	3,50	70,00
4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	5,00	100,00
5	Penguatan Pengawasan	7,50	6,88	91,67
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00	100,00
	Total Pengungkit		37,48	62,47
B.	Hasil	40,00	38,03	
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,50	22,50	100,00
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survey Eksternal; Indeks Persepsi Anti Korupsi/IPAK)	17,50	17,50	100,00
b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	5,00	100,00
2	Pelayanan Publik yang Prima	17,50	15,53	88,75
a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50	15,53	88,75
	Total Hasil		38,03	95,08
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi		75,51	

Akar Masalah (Mengapa Hal Tersebut Terjadi ?)

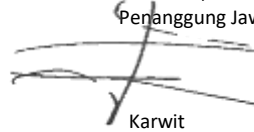
- Potensi kelambatan pemenuhan dokumentasi bukti penerapan zona integritas WBK oleh masing-masing penanggung jawab unsur dikarenakan penanggung jawab unsur lambat mengolah data penerapan WBK yang menjadi tanggung jawabnya;

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan Berikutnya	Penanggung Jawab
- Ketua tim WBK mengingatkan penyampaian dokumen implementasi WBK secara berkala kepada penanggung jawab unsur; - Tim Sekretariat memastikan pemenuhan fasilitas pendukung penerapan WBK;	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan Sebelumnya	Penanggung Jawab
- Nota Dinas Ketua Tim WBK kepada penanggung jawab unsur WBK tentang penyampaian dokumen implementasi WBK; - Diakukan pemenuhan fasilitas pendukung penerapan WBK (spanduk, banner, dan penataan ruang pelayanan);	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 6 Januari 2026

Penanggung Jawab Indikator Kinerja,


Karwit

Dokumentasi Kegiatan :

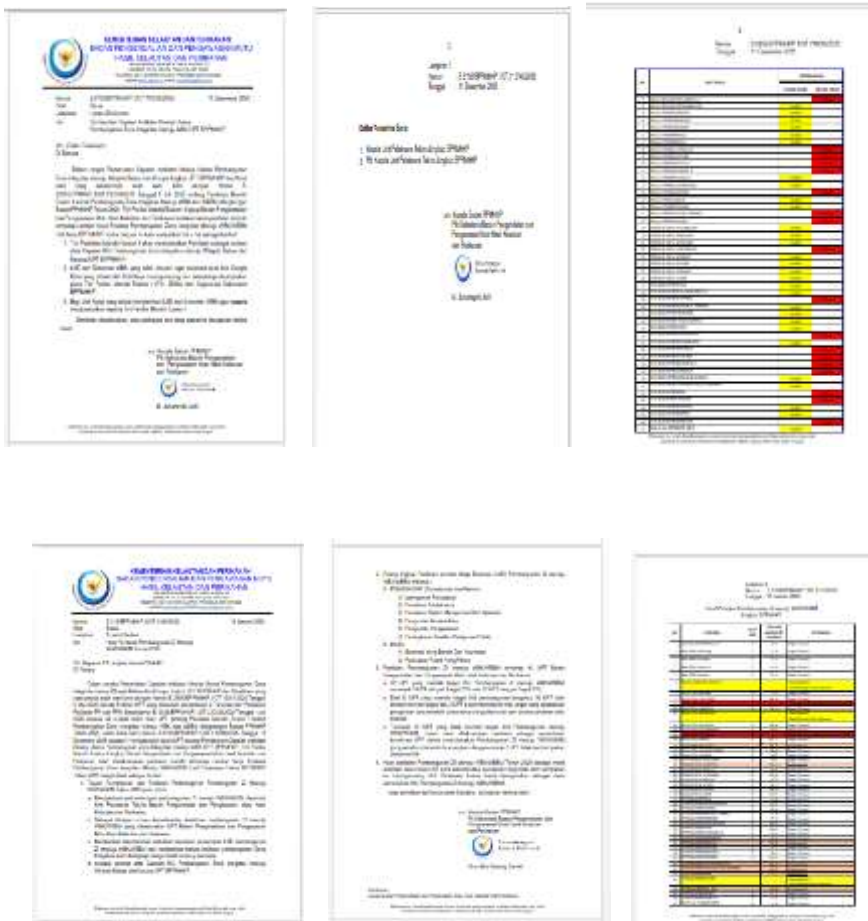
No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1	2	3	4
1	08-10-2025	Sosialisasi “Etika Berinteraksi untuk Penyandang Disabilitas” oleh nara sumber dari Balla Inklusi Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar KIPM Makassar dengan Balla Inklusi	
			
2	14-10-2025	Briefing bagi Petugas Pelayanan	
			

3	22-10-2025	Briefing Personil Dukungan Manajemen	
			
4	03-11-2025	Sosialisasi Agen Perubahan “Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja”	
			
5	26-11-2025	Sosialisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi	

			
6	04-12-2025	Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan	
			
7	22-12-2025	Sosialisasi Agen Perubahan “Disiplin dan Pengembangan Diri”	
			

8	24-12-2025	Penegasan Tidak Menerima Gratifikasi Pada Momen Perayaan Hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026	
			





Hasil Penilaian WBK oleh Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, melalui link berikut.

<https://tinyurl.com/MakassarLKEBPPMHKP2025>

LAMPIRAN 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)
Nama Tim/ja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan IV 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	88	88	88	88	3,36	3,36	3,36		3,36
Realisasi	93,32	92,84	92,84	96,85	3,93	3,93	3,93	3,93	
%Capaian	106,04	105,5	105,5	110,06	111,82	111,82	111,82	111,82	

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14> .

Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SURvey kepuasAN masyarakat) melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.

Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM Makassar survey dilakukan terhadap 11 (Sebelas) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu:

- Laporan hasil uji mutu produk perikanan
- Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)
- Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
- Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)
- Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)

- Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:

Formula Isaac & Michael					
$S = X^2 NP / (1-P)^2 d^2 (N-1) + X^2 P / (1-P)$					
X ² = Nilai chi square tabel = 3.841 dimana df = 1 dan α = 5% = 0.05 P = Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka P = 0.5) N = Jumlah Populasi d = tingkat toleransi kesalahan (0.05)					
$S = \frac{3.841 \times 48 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05^2 \times 47) + (3.841 \times 0.5 \times 0.5)}$					
$S = \frac{46.092}{1.14} = 40.43 \approx 41$					

Jumlah layanan yang dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 1.063 kali, maka berdasarkan tabel diatas jumlah populasi sebanyak 1.100 minimal sampel responden yang diambil adalah sebanyak 285 responden. Hasil survey kepuasan Masyarakat diketahui jumlah responden sebesar 447, hal ini sudah memenuhi jumlah minimal responden sesuai dengan formula Isaac dan Michael tersebut.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111.$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

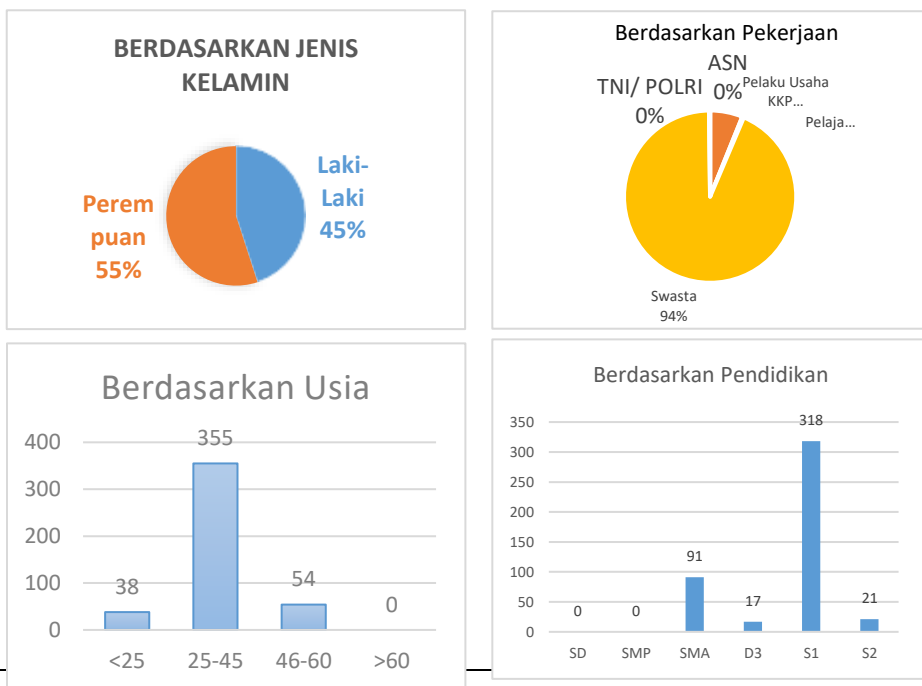
$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar KIPM Makassar.

Pada triwulan IV Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan survey terhadap 447 responden, dengan nilai Indeks Kepuasan IKM 3,93 atau sebesar **98,40** setelah dikonversi (**Sangat Baik**). Nilai IKM tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 3,36 atau capaian 111,82%. Apabila data Hasil IKM Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan dengan TW IV Tahun 2025, maka nilai unsur pelayanan dapat dilihat sebagai berikut:

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan		Perubahan
		Triwulan III - 2025	Triwulan IV - 2025	
1	Kesesuaian persyaratan	3,885	3,944	↑
2	Kemudahan prosedur	3,874	3,942	↑
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3,871	3,933	↑
4	Kesesuaian biaya	3,865	3,933	↑
5	Kesesuaian produk	3,877	3,937	↑
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3,873	3,931	↑
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3,871	3,933	↑
8	Layanan konsultasi dan pengaduan	3,879	3,940	↑
9	Kualitas isi/sarana	3,873	3,933	↑
	Nilai IKM	96,85	98,40	
	Indeks	3,87	3,93	

Data Rincian Responden survey IKM Triwulan IV Tahun 2025 yaitu:



Jika dilihat nilai perunsur, nilai unsur yang paling rendah adalah unsur **kecepatan respon aplikasi**, unsur **Kesesuaian jangka waktu penyelesaian**, serta unsur **Kemudahan dalam penggunaan fitur** dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan unsur kesesuaian biaya, unsur Kesesuaian jangka waktu penyelesaian, serta unsur Kemudahan dalam penggunaan fitur walaupun nilai unsur tersebut sudah berada dalam kategori Sangat Baik.

Dalam pelayanan sertifikasi ekspor, Balai Besar KIPM Makassar menggunakan Aplikasi SIAP Mutu (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu) dalam rangka penerbitan SMKHP digunakan pertanggal 1 Maret 2025 secara serentak semua UPT BPPMHKP yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Namun dalam pelaksanaannya Aplikasi SIAP Mutu masih dalam tahap penyempurnaan dan masih ada fitur yang dibutuhkan bagi petugas pelayanan dan pengguna layanan.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan IV pada tahun 2024, maka nilai IKM pada triwulan IV 2025 mengalami peningkatan dari **3,77** menjadi **3,93**. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Balai Besar KIPM Makassar memperoleh respon positif dari masyarakat.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan III tahun 2025, maka nilai IKM pada triwulan IV 2025 mengalami peningkatan dari 3,87 menjadi 3,93.

Meningkatkannya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Triwulan III Tahun 2025 ke Triwulan IV 2025 sejalan dengan layanan konsultasi petugas pelayanan pasca transisi penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Petugas pelayanan memberikan informasi dan solusi terhadap kebingungan pelaku usaha tentang penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan, serta petugas lebih komunikatif meminta kritik, saran dan masukan terhadap peningkatan pelayanan publik dari Balai Besar KIPM Makassar. Sehingga nilai IKM dapat ditingkatkan dari unsur Layanan konsultasi dan Pengaduan pada Triwulan IV Tahun 2025. Serta dengan penghargaan yang diterima oleh Balai Besar KIPM Makassar di Tahun 2025 pada pelayanan publik yang diberikan. Pada tanggal 2 Desember 2025, Balai Besar KIPM Makassar menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat "INFORMATIF" yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Bapak Sakti Wahyu Trenggono Nomor B.1272/MEN-KP/XII/2025.

Balai Besar KIPM Makassar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan:

- Tanggal 8 Oktober 2025, Sosialisasi Pelayanan publik ramah kelompok rentan. Sosialisasi dilaksanakan secara interaktif dengan menghadirkan narasumber dari Balla' Inklusi Sulawesi Selatan yang menjelaskan Etika Pelayanan pada Kelompok Rentan, Prinsip Kesenjangan dan Non-Diskriminasi serta Aksesibilitas untuk kemudahan informasi dan prosedur;
- 07 Oktober 2025 Customer Service kedatangan tamu dari Unit Pengolahan Ikan PT. Celebes Ocean Fisheries untuk konsultasi mengenai aplikasi SIAP MUTU.
- 14 Oktober 2025 telah dilakukan briefing bagi petugas pelayanan oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar yang diikuti oleh seluruh pegawai yang bertugas dalam pelayanan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam briefing tersebut disampaikan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan petugas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima serta menghindari adanya complain dari pelanggan;

- 4 Desember 2025 Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan dengan tujuan untuk menyusun standar pelayanan serta momentum untuk memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan mutu dan keamanan hasil perikanan. Peserta dalam forum tersebut berasal dari instansi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, unsur Pemerintah Daerah, akademisi, asosiasi usaha perikanan, LSM dan media massa;

Bukti komitmen petugas pelayanan dan IMUT/AIMUT tersebut menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Triwulan IV 2025 meningkat dari **3,87** menjadi **3,93**. Namun demikian peningkatan berkelanjutan melalui kritik dan saran pengguna layanan tetap dilakukan, sehingga kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dan dipertahankan.

Adapun kritik, saran dan masukan dari masyarakat melalui aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat terdapat tanggapan sebagai berikut;

- Kecepatan proses penerbitan sertifikat agar dipercepat;
- Beberapa fitur belum terdapat pada aplikasi yang dapat memudahkan pengguna layanan;

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
4.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	3
7.	PPPK	12
8.	PJLP	5
	TOTAL	37

Anggaran

Alokasi anggaran awal kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2025 yaitu 3987 EBA 994.002.B Semula Rp. 1.292.244.000, - dan terjadi revisi anggaran awal menjadi Rp. 356,509,000, -. Hingga Triwulan IV tahun 2025, anggaran yang sudah terealisasi sebanyak **Rp. 356,016,623,-** atau 99.86 % pada langganan daya dan jasa. Sehingga sisa anggaran sebesar Rp. **492,377,-**

Alokasi anggaran kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2024 yaitu Rp. 12.500.000,-. Pada RKAKL Triwulan IV tahun 2024 ini, terjadi revisi anggaran dimana anggaran untuk Survei Kepuasan Masyarakat dihilangkan dan dialihkan dari kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan (3990) ke kegiatan Dukungan Manajemen Internal (3987).

Anggaran dari Tahun 2024 dengan tahun 2025 berbeda sangat signifikan karena pada tahun 2025 anggaran untuk IKU Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) mengambil pada anggaran Langganan daya dan jasa sebagai penunjang tersedianya sarana dan prasana pelayanan publik.

Program Nasional

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu prioritas nasional karena dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan Asta Cita yang ke 5 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan

birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tools untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasaan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Yang mana Survey ini dapat mengetahui kritik, saran dan masukan dari Masyarakat pengguna layanan pada Balai Besar KIPM Makassar untuk memperbaiki layanan menjadi pelayanan publik yang prima.

ASN BERAHLAK

IKU ini mendukung budaya ASN yang berakhlak dilingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan. ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini mencakup memahami kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai alat untuk mengetahui saran kritik masukan Masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik Balai Besar KIPM Makassar untuk memberikan pelayanan yang prima.

Aspek Pemanfaatan

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai Besar KIPM Makassar dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasaan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Survey kepuasan Masyarakat ini sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Belum semua jenis layanan terutama bagian sertifikasi hulu yang dilakukan survey kepuasan Masyarakat oleh Inspektur/ Asisten Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Perlu dilakukan briefing/ sharing session kepada petugas pelayanan dan Inspektur/ Asisten Inspektur Mutu terkait masukan kepada pengguna layanan untuk perbaikan pelayanan publik.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
- Postingan mengenai Janji Layanan dan Biaya Layanan di EBook Layanan pada media sosial - 07 Oktober 2025 Customer Service melakukan pendampingan terhadap PT. Celebes Ocean Fisheries terkait pengisian aplikasi SIAPMUTU; - 18 November 2025 Customer Service melakukan pendampingan terhadap PT. Zhongyi Chain Services untuk konsultasi mengenai pendaftaran nomor registrasi negara mitra; - 19 Desember 2025 Customer Service melakukan pendampingan terhadap CV. Prima Indo Tuna untuk konsultasi mengenai model sertifikat TRACES baru. Yang dimana hasilnya IKM meningkat di triwulan IV 2025 dari 96,85 menjadi 98,40.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Makassar, 9 Januari 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja


Karwit

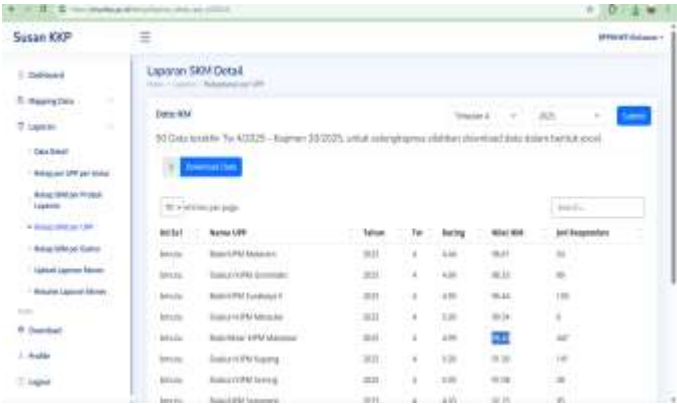
DOKUMENTASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN IV TAHUN 2025



Infografis Nilai IKM Triwulan IV Tahun 2025



Screenshot Dashboard Aplikasi SUSAN KKP



Screenshot Aplikasi SUSAN KKP yang memperlihatkan nilai IKM Triwulan IV Tahun 2025

The screenshot displays the 'Survei Kepuasan Masyarakat' (Community Satisfaction Survey) interface. It is titled 'Unit : Balai Besar KPH Makassar'. The 'Data kepanitia' (Committee Data) section lists several members with their full names and IDs. The 'Data responden' (Respondent Data) section shows a 'Balai Syng' (Syng Station) with a date of '26-10-2025 19:46'. Below this, there are fields for 'Nama' (Name), 'Jenis Kelamin' (Gender), and 'Jenis Pekerjaan' (Occupation), with a 'Balai Syng' (Syng Station) field also present.

Screenshot tampilan isian survey kepuasan masyarakat pada aplikasi SUSAN KKP

DOKUMENTASI PENGISIAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN IV TAHUN 2025



DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN



DOKUMENTASI BRIEFING PETUGAS PELAYANAN



**DOKUMENTASI ASISTENSI KEPADA PENGGUNA APLIKASI SIAP MUTU
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Oktober 2025



November 2025



Desember 2025



DOKUMENTASI FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2025



**DOKUMENTASI POSTINGAN
PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN PREDIKAT “INFORMATIF”**

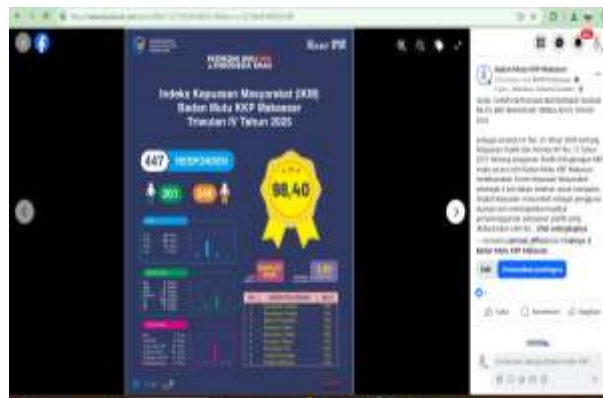


DOKUMENTASI PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN IV TAHUN 2025

- Instagram



- Facebook



- X/Twitter



- Website PPID KKP



- Website KKP



- WHATSAPP GRUP SIAP MUTU



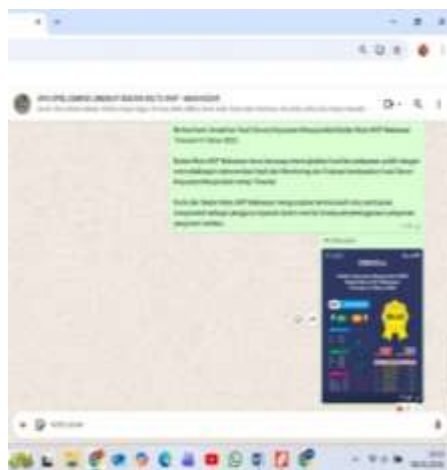
- SIPPN



- Digisign



- Whatsapp Grup UPI



PENANGANAN PENGADUAN TRIWULAN IV TAHUN 2025



